



Minerva Access is the Institutional Repository of The University of Melbourne

Author/s:

Setiawan, K;Beech Jones, BA;Diprose, R;Savirani, A

Title:

Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia.

Date:

2020-12-23

Citation:

Setiawan, K., Beech Jones, B. A., Diprose, R. & Savirani, A. (2020). Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia.. The Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment (MAMPU), The University of Melbourne and Universitas Gadjah Mada.

Persistent Link:

<https://hdl.handle.net/11343/258471>



PERJALANAN PEREMPUAN DALAM MENGGERAKKAN PERUBAHAN:

Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan
Undang-undang Desa di Indonesia

Editor dan Pengulas Naskah

Ken M.P. Setiawan
Bronwyn A. Beech Jones
Rachael Diprose
Amalinda Savirani

Penyunting

Bronwyn A. Beech Jones
Annisa Sabrina Hartoto

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Indonesia, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif, lihat Diprose, R., A. Savirani, K.M.P. Setiawan, dan N. Francis, 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327> . Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Untuk merujuk kumpulan ini:

Setiawan, K.M.P., B.A. Beech Jones, R. Diprose, dan A. Savirani [Eds]. 2020. Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124332>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Para editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada atas dedikasi dan kerja keras mereka—Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niemi Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Kumpulan ini terwujud berkat para perempuan desa yang telah berjuang keras mengatasi ketidakadilan gender dan memperbaiki kesejahteraan komunitas mereka di desa-desa di seluruh Indonesia. Koleksi cerita perjalanan hidup ini terwujud berkat organisasi masyarakat sipil (OMS) yang telah mendukung para perempuan di daerah perdesaan, seiring advokasi yang lebih luas dalam mengurangi ketidakadilan gender. Setiap hari para kader, staf, pekerja lapangan dan pendamping berupaya untuk memperjuangkan hak perempuan dan menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung dan memberdayakan perempuan di daerah perdesaan Indonesia, serta membentuk kebijakan dan program di skala yang lebih luas.

Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi yang telah mendukung penelitian ini dalam berbagai cara, baik di lapangan, maupun dalam *workshop* perencanaan dan analisis yang kolaboratif, acara diskusi dan seminar, serta waktu yang disediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan mitra organisasi MAMPU di level nasional, yaitu 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) serta mitra lokal mereka—Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini, Stewart Norup, dan segenap tim MAMPU atas masukan-masukan yang diberikan dalam penulisan kumpulan ini, serta dukungan penuh selama penelitian, khususnya Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Pada akhirnya, terima kasih dari para editor dan penulis kepada semua partisipan dalam penelitian ini, terutama perempuan yang telah berbagi secara terbuka tentang pengalaman mereka. Cerita dan wawasan semua perempuan yang berada di halaman kumpulan ini membuktikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keteguhan, dan kekuatan dalam membawa perubahan bagi komunitas mereka. Kami berharap perspektif dan pengalaman hidup mereka akan terus memberikan pelajaran dan inspirasi sebagaimana yang kami rasakan dalam proses wawancara, penelitian dan penulisan kumpulan ini.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	ii
Daftar Singkatan dan Istilah	v
Perempuan Menggerakkan Perubahan di Desa-Desa Indonesia.....	1
<i>Ken M.P. Setiawan, Bronwyn A. Beech Jones, Rachael Diprose dan Amalinda Savirani</i>	
Bagian 1: Peningkatan Akses Perlindungan Sosial	13
Ati	14
<i>Koordinator Desa Pekka, Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur</i> Indah Surya Wardhani dan Anastasia Imelda Cahyaningrum	
Mita.....	17
<i>Kader Pekka, Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur</i> Indah Surya Wardhani dan Anastasia Imelda Cahyaningrum	
Lasinem	19
<i>Koordinator Divisi Pendidikan Sekolah Perempuan, Gresik, Jawa Timur</i> Galih Prabaningrum dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka	
Lastri.....	22
<i>Koordinator Sekolah Perempuan Level Kabupaten, Gresik, Jawa Timur</i> Galih Prabaningrum dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka	
Hj. Aminah	26
<i>Ketua Serikat Pekka Desa dan Kelompok Papadaan, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan</i> Devy Dhian Cahyati dan Anastasia Imelda Cahyaningrum	
Hj. Farah	30
<i>Ketua Kelompok Pekka Setia Kawan, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan</i> Devy Dhian Cahyati dan Anastasia Imelda Cahyaningrum	
Laila.....	33
<i>Ketua Kelompok Sekolah Perempuan, Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan</i> Ulya Niemi Efrina Jamson dan Hening Wikan Sawiji	
Julianti	37
<i>Ketua Kelompok Rumput Laut Sekolah Perempuan, Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan</i> Ulya Niemi Efrina Jamson dan Hening Wikan Sawiji	
Bagian 2: Perlindungan Buruh Migran	41
Gita.....	42
<i>Ketua DESBUMI, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat</i> Mustaghfiroh Rahayu dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka	
Hj. Nisa	45
<i>Ketua Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat</i> Mustaghfiroh Rahayu dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka	

Bagian 3: Perbaikan Kondisi Kerja	48
Mia.....	49
<i>Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera, Deli Serdang, Sumatera Utara</i>	
Devy Dhian Cahyati dan Bellicia Angelica Tanvil	
Widyati	52
<i>Anggota SPPR Kreatif Bunda, Bantul, D.I. Yogyakarta</i>	
Mustaghfiroh Rahayu dan Nadlirotul Ulfa	
Bagian 4: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Perempuan	55
Hatini.....	56
<i>Ketua KWT dan Kader Kesehatan Reproduksi 'Aisyiyah, Cirebon, Jawa Barat</i>	
Desi Rahmawati dan Nadlirotul Ulfa	
Srikandi.....	59
<i>Kader 'Aisyiyah, Cirebon, Jawa Barat</i>	
Desi Rahmawati dan Nadlirotul Ulfa	
Sulis	62
<i>Anggota FAKTA-DAMAR, Tanggamus, Lampung</i>	
Azifah R. Astrina dan Nadlirotul Ulfa	
Mariana	65
<i>Koordinator Desa FAKTA-DAMAR, Tanggamus, Lampung</i>	
Azifah R. Astrina dan Nadlirotul Ulfa	
Bagian 5: Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan.....	68
Tari	69
<i>Wakil Ketua Serikat Perempuan Independen, Labuhan Batu, Sumatera Utara</i>	
Azifah R. Astrina dan Smita Tanaya	
Laeli.....	72
<i>Ketua Kelompok Konstituen Desa, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat</i>	
Hening Wikan Sawiji dan Wigke Capri Arti	
Husnul	75
<i>Anggota Kelompok Konstituen Desa, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat</i>	
Hening Wikan Sawiji dan Wigke Capri Arti	
Veronika.....	78
<i>Ketua Kelompok Wanita Tani Fauana, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur</i>	
Longgina Novadona Bayo dan Smita Tanaya	
Yohana	82
<i>Pendiri YABIKU dan Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur</i>	
Longgina Novadona Bayo dan Smita Tanaya	
Daftar Pustaka	86

Daftar Singkatan dan Istilah

'Aisyiyah	Organisasi kemasyarakatan didirikan pada 1917 dan berasosiasi dengan Muhammadiyah Mitra MAMPU – dalam penelitian ini di Cirebon, Jawa Barat	Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia Mitra MAMPU – dalam penelitian ini di Lombok Timur, NTB dengan mitra lokal Perkumpulan Panca Karsa	Dusun	Bagian dari suatu desa atau kelurahan
BITRA	Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia Mitra MAMPU – dalam penelitian ini di Deli Serdang, Sumatera Utara	FAKTA	Forum berbagi informasi Kesehatan yang dibentuk oleh Kelompok Wanita Katolik dan Jaringan Mitra Perempuan (JMP) di Lampung sejak tahun 1990an. Lalu bermitra dengan DAMAR
BKKBD	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	FPL	Forum Pengada Layanan Mitra MAMPU – dalam penelitian ini di Timor Tengah Utara, NTT, dengan mitra lokal YABIKU dan Labuhan Batu, Sumatera Utara, dengan mitra lokal SPI Labuhan Batu
BPD	Badan Permusyawaratan Desa, atau Badan Perwakilan Desa	HKSR	Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Itsbat Nikah	Penetapan tentang kebenaran (keabsahan) pernikahan
BSA	Balai Sakinah 'Aisyiyah Kelompok perempuan yang didukung 'Aisyiyah	JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa	Kades	Kepala Desa
CSO	<i>Civil Society Organisation</i> – organisasi masyarakat sipil (OMS)	Kadus	Kepala Dusun
DAMAR	Lembaga Advokasi Perempuan Salah satu pendiri Konsorsium PERMAMPU dan mitra MAMPU – dalam penelitian ini di Tanggamus, Lampung dengan mitra lokal FAKTA	KAPAL Perempuan	Institut KAPAL Perempuan Lingkaran Pendidikan Alternatif Mitra MAMPU – dalam penelitian ini di Gresik, Jawa Timur, dengan mitra lokal KPS2K, dan Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan dengan mitra lokal YKPM
Dana Desa	Dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.	Kaur Kesra	Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat
DESBUMI	Desa Peduli Buruh Migran Inisiatif Migrant CARE guna menyediakan pelayanan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga mereka terkait proses migrasi yang aman.	KB	Keluarga Berencana
Dinas KBPPPA	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dinkes	Dinas Kesehatan	KK	Kartu Keluarga
Diskoperindag	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	KK	Kepala Keluarga
		(Program) KLIK	Kelompok Konstituen Kelompok yang dibentuk BaKTI
		KPS2K	Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi
		KTP	Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan Mitra lokal KAPAL Perempuan di Gresik
		Kuwu	Kartu Tanda Penduduk
			Kepala Desa di Cirebon

KWT	Kelompok Wanita Tani	PNPM Mandiri	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
LBK	Layanan Berbasis Komunitas	Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
Migrant CARE	Mitra MAMPU – dalam penelitian ini di Lombok Tengah, NTB	PPK	Perkumpulan Panca Karsa, mitra lokal Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB
Musdes	Musyawahar Desa Forum pengambilan keputusan di tingkat desa di mana keputusan dipertimbangkan dan diambil secara <i>consensus</i>	Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Musdus	Musyawahar Dusun Rapat pengambilan keputusan di tingkat dusun	Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
Muslimat	Organisasi massa khusus perempuan di bawah Nahdlatul Ulama	RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Musrenbang	Musyawahar Rencana Pembangunan	RW	Rukun Warga, bagian dari suatu dusun
Musrenbangda	Musyawahar Rencana Pembangunan Daerah	Sekolah Perempuan	Sekolah informal khusus perempuan yang dibentuk oleh KAPAL Perempuan dan mitra mereka
Musrenbangdes	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa	SPI Labuhan Batu	Serikat Perempuan Independen Mitra lokal FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara
NTB	Nusa Tenggara Barat	SPPR	Sekolah Peningkatan Kapasitas Perempuan Pekerja Rumahan Program pelatihan dan peningkatan kesadaran kritis yang dilaksanakan BITRA di desa penelitian di Deli Serdang
NTT	Nusa Tenggara Timur	SPPR	Serikat Perempuan Pekerja Rumahan di Bantul, Yogyakarta
NU	Nahdlatul Ulama, Organisasi Islam tradisional yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi	SLRT	Sistem Layanan Rujukan Terpadu
Pangkep	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan	TKI	Tenaga Kerja Indonesia
PEKKA	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga	TKW	Tenaga Kerja Wanita
Pekka	Serikat dan kelompok yang dibentuk dan dipimpin perempuan kepala keluarga di tingkat desa	TTU	Timor Tengah Utara
Pekon	Sebutan untuk desa di desa penelitian di Lampung	YABIKU	Yayasan Amnaut Bife Kuan Mitra lokal FPL di Timor Tengah Utara
Perda	Peraturan Daerah	YASANTI	Yayasan Annisa Swasti Mitra MAMPU – dalam penelitian ini di Bantul, D.I. Yogyakarta
Perdes	Peraturan Desa	YKPM	Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat Mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan
PKH	Program Keluarga Harapan		
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		
PMI	Pekerja Migran Indonesia		

Perempuan Menggerakkan Perubahan di Desa-desa Indonesia

Ken M.P. Setiawan, Bronwyn A. Beech Jones, Rachael Diprose, dan Amalinda Saviraniⁱ

Keberagaman budaya dan agama di Indonesia, serta luasnya wilayah kepulauan nusantara, menghadirkan tantangan yang kompleks dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Khususnya, di banyak daerah pedesaan, tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah serta mengakarnya norma sosial budaya kerap membatasi ruang gerak dan pilihan perempuan, menempatkan mereka dalam ranah domestik dan di luar kehidupan publik dan pengambilan keputusan. Banyak perempuan, khususnya mereka yang mengalami kemiskinan yang paling berat dan kronis di seluruh dimensi kesejahteraan mereka, sering kurang memiliki pengetahuan dasar, dokumen-dokumen penting, ataupun kepercayaan diri untuk mengakses pelayanan sosial. Kemiskinan juga menyebabkan banyak perempuan mencari nafkah di luar lingkungan lokal mereka, misalnya sebagai pekerja migran melalui jalur yang tidak terorganisir dengan baik, ilegal, dan berisiko tinggi. Akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemahaman tentang, misalnya, kesehatan reproduksi juga terbatas, dan kekerasan berbasis gender adalah kenyataan yang dihadapi banyak perempuan.

Selama dua dasawarsa reformasi, perempuan, dan gerakan perempuan Indonesia, termasuk banyak organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bekerja untuk kesetaraan dan inklusivitas gender berhasil mengadvokasi perubahan-perubahan terkait dengan peraturan, kebijakan dan program, baik yang baru maupun revisi program yang telah ada, untuk menangani ketidaksetaraan tersebut. Di antara perubahan ini, sejak tahun 2004 partai politik diwajibkan untuk menjamin 30 persen calon dalam pemilihan adalah perempuan.ⁱⁱ Kuota gender ini mempercepat representasi kesetaraan perempuan sebagai kandidat politisi, khususnya pada pemilihan tahun 2019 di mana empat puluh persen calon yang bertarung adalah perempuan.ⁱⁱⁱ Salah satu pencapaian penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sebagai hasil lobi yang intensif oleh wakil gerakan perempuan dan kolaborasi mereka bersama dengan pemimpin di pemerintahan. UU PKDRT ini menegakkan sebuah mekanisme hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan. Perubahan legislatif tersebut merupakan pencapaian yang penting dan telah memperkuat upaya banyak OMS yang menjalankan program dan layanan untuk mendukung dan memberdayakan perempuan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, pada waktu yang sama, masih ada tantangan di negara yang begitu beragam seperti Indonesia, di mana perbaikan masih belum merata, khususnya di daerah yang miskin dan pedesaan. Keikutsertaan perempuan dalam politik, khususnya, masih terbatas, terutama di daerah pedesaan Indonesia perempuan masih rentan dikeluarkan dari proses politik.^{iv} Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pun masih tinggi, dengan jumlah lebih dari 430.000 kasus dilaporkan pada 2019.^v

Sejak dimulainya demokratisasi, Indonesia memulai program desentralisasi yang ambisius untuk menggeser kekuasaan politik dan ekonomi dari pusat ke tingkat sub-nasional. Dilaksanakan sejak 2001, undang-undang dan kebijakan ini menjadi kunci untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang demokratis di tingkat lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses menentukan prioritas pembangunan. Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu langkah penting dalam proses ini. Menurut Undang-Undang ini, sekitar 75.000 desa di Indonesia masing-masing menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) untuk prioritas dan upaya pembangunan mereka dalam bentuk Dana

Desa. Penekanan Undang-Undang ini terhadap keadilan gender dan pengambilan keputusan yang demokratis merupakan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa.

Kumpulan ini adalah bagian dari penelitian kolaboratif yang dilakukan pada tahun 2019 oleh tim peneliti perempuan dari The University of Melbourne dan Universitas Gadjah Mada tentang Aksi Kolektif Perempuan dan UU Desa di Indonesia. Dalam penelitian ini, kami menelusuri sejauh mana dan melalui mekanisme apa aksi kolektif lokal perempuan memengaruhi pelaksanaan UU Desa yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Ini termasuk cara bagaimana perempuan berupaya menyuarakan aspirasi mereka dan bertindak, serta peran dan strategi yang digunakan oleh OMS untuk mendukung perempuan. Analisis Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis^{vi} ini menemukan bahwa, meskipun menghadapi banyak tantangan, perempuan desa di seluruh kepulauan Indonesia sedang menciptakan perubahan untuk diri mereka sendiri dan masyarakat, dengan menantang berbagai norma sosial dan hambatan struktural lainnya untuk kesetaraan gender. Dukungan yang diberikan oleh OMS^{vii} kepada perempuan desa di lokasi penelitian memang sudah membantu beberapa kelompok perempuan yang paling rentan, termasuk perempuan kepala keluarga melalui peningkatan akses ke program perlindungan sosial, meningkatkan perlindungan pekerja migran, memperbaiki kondisi pekerjaan, meningkatkan nutrisi dan kesehatan perempuan, dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Lebih jauh lagi, seperti terbukti dalam kisah hidup perempuan di kumpulan ini, dukungan yang diberikan telah memfasilitasi tumbuhnya agensi yang lebih besar bagi perempuan. Walaupun ada sebagian perempuan yang telah berada di jalur ini dengan kecepatan yang lebih pelan dan bertahap, bagi yang lain dukungan OMS memberikan kesempatan baru, yang bagi banyak perempuan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Kumpulan ini berisi kisah perjalanan hidup 21 perempuan dari desa-desa yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (sesuai kode etik, semua nama telah disamarkan).^{viii} Di setiap desa penelitian, OMS memulai dan/atau memperkuat intervensi untuk mendukung kesetaraan gender, aksi kolektif dan pemberdayaan perempuan. Kisah-kisah ini memberikan wawasan yang unik tentang pencapaian, tantangan dan mimpi perempuan yang melampaui beberapa skala dan ranah, dan menunjukkan kompleksitas hidup perempuan di perdesaan Indonesia, khususnya bagi perempuan dari kelompok rentan. Kisah-kisah tersebut menyoroti perjalanan, ketahanan, dan ketetapan hati perempuan dalam menghadapi perlawanan dan, pada akhirnya, mengurangi ketidakadilan gender dan memperkuat inklusivitas gender. Kisah-kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran OMS—yang bekerja untuk kesetaraan gender dan memfasilitasi agensi dan pemberdayaan perempuan di akar rumput—yang mendukung suara dan agensi perempuan dalam perjalanan ini.

Kisah dalam kumpulan ini membuktikan bagaimana aksi kolektif perempuan telah menghasilkan pencapaian yang beragam di level desa. Secara bersamaan, perempuan telah membentuk kebijakan desa dan berkontribusi kepada pendapatan desa. Contohnya, Tari (Labuhan Batu, Sumatera Utara), Laeli (Lombok Timur), dan Yohana (Timor Tengah Utara) terlibat secara aktif dalam penyusunan peraturan desa dan kabupaten tentang hak-hak perempuan dan anak. Di Lombok Tengah, survei yang dilakukan oleh Gita dan perempuan desa lainnya bersama mitra daerah Migrant CARE, Perkumpulan Panca Karsa, sangat berharga dalam mengubah kebijakan tingkat desa agar memperbaiki perlindungan pekerja migran yang ingin berangkat, yang sedang di luar negeri dan yang sudah pulang. Di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Hj. Aminah berperan penting dalam pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Sementara, di Gresik, Cirebon dan Bantul, aksi kolektif perempuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam musyawarah desa.

Dengan dukungan OMS, kelompok perempuan juga meningkatkan pengetahuan tentang dan akses ke pelayanan sosial dan administrasi, dan memperluas kemampuan perempuan untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan. Di Bangkalan dan Hulu Sungai Utara, Mita dan Hj. Farah terlibat secara aktif dalam upaya peningkatan akses perempuan kepada dokumen-dokumen penting, termasuk akta kelahiran dan surat nikah, melalui Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi

PEKKA – KLIK PEKKA. Di Lampung dan Gresik, Sulis dan Lastri membantu perempuan mengakses jaminan kesehatan nasional melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Demikian pula, di Gresik, Cirebon dan Tanggamus, Lasinem, Srikandi dan Sulis meningkatkan pengetahuan dan akses perempuan terhadap informasi dan pemeriksaan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi perempuan. Di banyak desa kelompok simpan pinjam memperkuat kesempatan dan kapasitas ekonomi perempuan, yang juga dicapai dengan menawarkan pelatihan keterampilan agar perempuan dapat mengembangkan usaha kecil mereka sendiri, seperti yang dituturkan dalam kisah dari Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sedangkan di kepulauan Pangkajene, Laila dan Julianti menerapkan keterampilan advokasi yang mereka pelajari melalui partisipasi dalam kelompok Sekolah Perempuan, dan berhasil mengkampanyekan elektrifikasi tenaga surya dan akses air bersih. Perempuan di konteks desa yang beragam ini telah meningkatkan inklusi politik dan berpartisipasi aktif memengaruhi pengambilan keputusan. Kisah mereka mendokumentasikan perjalanan perempuan, baik secara individu maupun secara kolektif, dengan pendampingan dari organisasi sipil untuk mencapai hasil-hasil ini.

Ketika menulis kisah perjalanan perempuan, pewawancara berusaha untuk mengedepankan suara dan ekspresi perempuan itu sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk mengutamakan ujaran perempuan dan cara mereka bercerita tentang kehidupannya. Hal ini merupakan komitmen pewawancara saat menerapkan metode penelitian feminis, dan juga merupakan cerminan hubungan yang dibangun dengan perempuan dan komunitas selama penelitian ini.^{ix} Kisah-kisah ini merupakan cerita pengalaman dan lintasan perubahan yang sangat pribadi, menjelaskan ketahanan perempuan ketika menghadapi kesulitan, dan ketetapan hati mereka untuk mengatasi tantangan ini.

Walaupun kisah-kisah ini menceritakan perjalanan individu, banyak perempuan ketika menyampaikan pendapat dan pengalaman, memakai kata “kita” daripada “saya”. Dalam membagi harapan untuk masa depan, perempuan merujuk pada kebutuhan dan potensi perempuan di desa, bukan cita-cita pribadinya. Contohnya, ketika ditanya tentang harapan untuk masa depan, Farah menjawab bahwa dia ‘termotivasi karena saya ingin menambah ilmu dan membentuk perempuan menjadi seorang pemimpin.’ Ini menunjukkan, walaupun kisah-kisah ini menceritakan perjalanan individu, tidak bisa dilepaskan dari pengalaman dan aspirasi kolektif. Pengantar ini menempatkan kisah-kisah perempuan dalam konteks sejarah organisasi perempuan Indonesia, sebelum menyatukan benang-benang merah dari kisah-kisah perjalanan hidup ini untuk menjalin pemahaman tentang proses-proses yang dilalui perempuan untuk memberdayakan diri dalam kelompok, dan apa yang didapatkan perempuan dalam perjalanan pribadi dan kolektif untuk berkembang.

Permulaan Organisasi Perempuan Indonesia: Yang Memungkinkan dan Membatasi Perubahan

Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang perkumpulan perempuan untuk mengadvokasi perbaikan kehidupan mereka. Pada awal abad kedua puluh beberapa surat kabar perempuan didirikan, seperti *Poetri Hindia*, *Poetri Mardika*, dan *Soenting Melajoe*. Surat kabar ini mengandung testimoni perempuan mengenai tantangan yang mereka hadapi dan upaya perempuan untuk membangun masyarakat dan memajukan pendidikan.^x Periode tersebut ditandai oleh perkembangan pesat aksi kolektif perempuan melalui jaringan, organisasi massa, dan kelompok perempuan. Pada tahun 1914, organisasi perempuan yang bernama Sapa Tresna, yang setelahnya menjadi ‘Aisyiyah, dibentuk. Sapa Tresna berafiliasi dengan organisasi Islam modernis, Muhammadiyah, dan memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan perempuan dan anak perempuan. Organisasi massa Islam tradisional, Nahdlatul Ulama, mendirikan sayap perempuan, Muslimat, pada tahun 1946, yang empat tahun setelahnya diiringi oleh pendirian Fatayat untuk perempuan muda dengan perhatian yang sama kepada pendidikan dan kesehatan. Dengan fokus tersebut organisasi-organisasi ini menangani isu yang penting bagi perempuan, namun mereka tidak mengadvokasi secara langsung partisipasi politik

perempuan ataupun hak-hak sipil dan politik. Sampai hari ini, organisasi Islam tersebut mempunyai pengaruh yang besar: mereka berkedudukan hampir di seluruh Indonesia dan mampu menjangkau lapisan akar rumput.^{xi}

Kebangkitan nasionalisme dan periode setelah kemerdekaan memberikan daya gerak untuk partisipasi politik perempuan dengan aktif dalam kehidupan politik dan mendirikan organisasi perempuan. Namun, pada waktu yang sama, wacana pemerintah menetapkan perempuan sebagai 'ibu bangsa' dan 'penenun kesatuan nasional', peran hegemonik perempuan yang sebagian besar tidak bisa dilawan.^{xii} Bahkan, organisasi kiri perempuan Gerwani, yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak menantang sifat keibuan perempuan, akan tetapi menyatukannya dengan aktivisme politik.^{xiii} Setelah kudeta tahun 1965, periode ini yang lebih terbuka dan mendorong organisasi dan partisipasi politik perempuan berakhir secara mendadak dan dengan penuh kekerasan. Peristiwa ini juga membasmi banyak organisasi dan bentuk partisipasi politik lainnya.

Di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto (1966-1998), kelompok perempuan di tingkat masyarakat akar rumput nyaris dihilangkan sepenuhnya, kecuali kelompok agama (seperti pengajian) dan organisasi kemasyarakatan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).^{xiv} Di bawah Orde Baru, pembentukan lembaga korporatis negara, seperti PKK, merupakan bagian dari mekanisme kontrol negara. Dengan cara ini negara mencoba untuk depolitisasi masyarakat. Lembaga korporatis negara dipaksa untuk menaati ideologi negara, Pancasila.^{xv} Dengan demikian, PKK berada di bawah negara yang didominasi laki-laki, dan tercermin dari strukturnya di mana pemimpin PKK adalah istri dari pejabat pemerintah. Lebih lanjut, kebijakan Orde Baru mempromosikan keluarga inti dan keibuan, dan peran perempuan terbatas di ranah domestik.^{xvi} Di tingkat desa, PKK menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang disokong negara dan menyebarkan ideologi gender resmi negara bahwa istri dan ibu bertanggungjawab untuk melayani kepala keluarga laki-laki dan membesarkan anak-anak.^{xvii}

Namun, dari pertengahan tahun 1980an dan selama dekade 1990an, makin banyak perempuan melibatkan diri dalam gerakan yang lebih luas, dan dalam jaringan aktivis yang merujuk kepada gerakan hak asasi manusia internasional dan ide feminis yang menantang rezim Orde Baru dan ideologi gendernya. Organisasi perempuan yang muncul pada waktu ini termasuk Pusat Informasi dan Komunikasi Kalyanamitra, LBH-APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dan Yasanti – Yayasan Annisa Swasti.^{xviii} Setelah rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998, membuka ruang untuk organisasi masyarakat sipil dan merupakan katalisator bagi peningkatan aksi politik perempuan.^{xix} Jaringan, serikat, dan organisasi masyarakat sipil baru muncul baik di tingkat nasional maupun lokal di seluruh Indonesia, termasuk banyak OMS yang ikut serta dalam penelitian ini yang menjadi dasar kumpulan cerita ini. Di tingkat negara pengakuan terhadap hak dan isu perempuan khususnya tergambar dengan pendirian Komnas Perempuan, sebuah lembaga negara yang independen, pada tahun 1998.

Pasca periode otoriter ini juga menimbulkan perubahan struktur dalam organisasi perempuan yang didirikan oleh Orde Baru. PKK mengganti nama, menjadi 'Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga'. Nama baru ini menekankan 'pemberdayaan' sebagai peran utama PKK, bukan 'pembinaan' seperti sebelumnya. Walaupun PKK tetap berada di bawah payung Kementerian Dalam Negeri, sekarang pemimpin PKK dipilih oleh anggotanya dan lembaga ini telah berusaha untuk memprioritaskan partisipasi perempuan dalam politik serta kesetaraan gender.^{xx} Namun, PKK masih dipengaruhi oleh prioritas pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan fokus tradisional PKK terhadap peran perempuan sebagai ibu dan istri sulit diubah. Dalam banyak kasus, keanggotaan PKK cenderung didominasi oleh perempuan elit desa dan ini membatasi kemampuan organisasi untuk mendorong agenda pemberdayaan, khususnya untuk perempuan perdesaan yang paling rentan.

Memfasilitasi dan Membangun Agensi Perempuan

Sebagaimana dibahas sebelumnya, terlepas dari sejarah panjang pengorganisasian perempuan dan kelompok dan organisasi perempuan yang sudah ada sebelumnya, di seluruh lokasi penelitian dalam studi ini, pada awal periode cakupan penelitian ini, perempuan tidak selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau partisipasi dalam kelompok yang bertujuan untuk menantang struktur kekuasaan dan norma gender. Hambatan inklusi gender secara khusus sering dipengaruhi norma sosial tentang peran gender dan cara struktur kewenangan dan kekuasaan dikonstruksi dalam masyarakat. Kerangka ini seringkali mengistimewakan jaringan tertentu, keluarga, dan kelompok lain yang telah lama terlibat dan berpengaruh dalam kehidupan desa dan pengambilan keputusan politik.^{xxi} Perundangan baru, khususnya UU Desa dalam konteks ini, belum tentu menghasilkan pengambilan keputusan dan penetapan prioritas pembangunan desa yang lebih inklusif, meskipun memiliki tujuan dan upaya untuk memperkuat pembangunan berbasis masyarakat. Hal ini terutama berlaku bagi perempuan yang lebih rentan, misalnya perempuan yang mengalami kemiskinan dan tantangan lainnya di berbagai bidang ekonomi dan sosial.^{xxii} Di banyak desa di seluruh Indonesia, walaupun ada alokasi dari Dana Desa untuk perempuan, dana ini biasanya diberikan kepada PKK saja, yang pada umumnya didominasi oleh perempuan elit. Akibatnya, memperkuat perpecahan berbasis kelas di tingkat lokal.^{xxiii}

Untuk memberikan dukungan kepada perempuan desa dengan tujuan untuk memperbaiki pemberdayaan perempuan, langkah awal yang diambil oleh banyak OMS yang terlibat dalam studi ini adalah kolaborasi dengan kelompok perempuan yang sudah ada, serta mendukung diversifikasi dan memperluas keanggotaan dan fokus kelompok, atau mendirikan kelompok dan inisiatif baru. Seperti yang akan diuraikan di bawah dan dalam analisis komparatif lainnya, kelompok ini memberikan ruang yang aman bagi perempuan untuk terhubung dengan perempuan lain, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun keterampilan mereka.^{xxiv} Partisipasi perempuan dalam kelompok dan aktivitas ini, memfasilitasi meningkatnya agensi perempuan dan kecenderungan untuk terlibat dalam aksi kolektif. Kisah-kisah dalam kumpulan ini membukukan pengalaman perempuan di daerah-daerah Indonesia yang berbeda—konteks yang pada awalnya tidak ada banyak kesamaan di antaranya. Di beberapa daerah, penduduk desa sangat kuat menolak perempuan yang berperan dalam kehidupan publik, sedangkan desa lain jauh lebih kondusif terhadap partisipasi perempuan. Penelitian kami membuktikan bahwa, walaupun kadang-kadang perbedaan antara lokasi-lokasi penelitian sangat menonjol, pada akhirnya pengalaman berkelompok menggerakkan perempuan dalam aksi kolektif dan mengambil peran langsung dalam kepemimpinan. Begitu juga bagi beberapa perempuan, berdasarkan pengalaman hidupnya sebelumnya, lebih mudah mengambil peran yang lebih berpengaruh atau menjadi pemimpin ketika kesempatan itu muncul. Sedangkan perempuan yang lain belum mempertimbangkan bahwa mereka memiliki kemampuan ini, khususnya bagi perempuan dari kelompok yang lebih rentan.

Satu contoh perempuan yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam organisasi perempuan sebelumnya adalah Lasinem dari Gresik. Lasinem berasal dari keluarga yang kurang mampu dan mempunyai persepsi bahwa peran perempuan yang sudah menikah terbatas dalam ranah domestik. Namun, Sekolah Perempuan memberikan Lasinem kesempatan untuk memperluas pengetahuannya. Secara bertahap, Lasinem menjadi lebih aktif dan akhirnya ia menjadi seorang pemimpin. Kisah Tari menggambarkan bahwa ia dan perempuan lainnya pada awalnya tidak berminat untuk bergabung dalam organisasi perempuan, karena dianggap kurang memberikan bermanfaat. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari pun menjadi lebih aktif dalam kelompok dan akhirnya muncul sebagai seorang pemimpin.

Kemudian ada perempuan yang kurang berpengalaman dalam organisasi perempuan, namun merasa lebih percaya diri karena adanya pengalaman lain dalam kehidupannya. Pengalaman ini mengurangi hambatan untuk bergabung dalam aksi kolektif perempuan dan pemerintahan desa. Misalnya, Husnul (Lombok Timur)

mempunyai banyak pengalaman dalam menafkahi keluarganya dengan usaha menjahit dan membuat keripik, sementara suaminya bekerja di luar negeri, di Malaysia. Usaha ini juga membuatnya membangun hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Kepercayaan diri perempuan yang lebih muda, seperti Mita dan Gita diperkuat oleh pendidikan mereka dan pekerjaan sebagai guru, yang memungkinkan mereka untuk lebih cepat mengambil peran kepemimpinan dan menggerakkan perempuan lain dalam komunitas mereka.

Beberapa perempuan juga lebih menonjol dalam menggerakkan aksi kolektif oleh karena pengalaman mereka dalam pemerintahan desa, atau karena hubungan yang lain (misalnya, keluarga) yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan dukungan terhadap isu perempuan. Contohnya, Mariana (Lampung) yang diangkat sebagai Kepala Dusun pada tahun 2006. Demikian pula Ati dan keponakannya Mita (Bangkalan) merupakan kerabat dari beberapa tokoh sosial desa yang berpengaruh. Hubungan ini memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kepercayaan Kepala Desa dan pemimpin lain.

Dari semua perempuan yang berada dalam kumpulan ini, hanya satu—yaitu Yohana dari Timor Tengah Utara—mulai terlibat dalam aktivisme perempuan di usia muda. Yohana juga merupakan pendiri mitra lokal FPL, YABIKU. Meskipun begitu, bagi kebanyakan perempuan, pengalaman mereka dalam organisasi perempuan di tingkat desa berkaitan dengan lembaga korporatis negara, yaitu PKK (tujuh dari 21 perempuan dalam koleksi ini) dan memberikan pelayanan kesehatan akar rumput melalui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu—sepuluh perempuan dalam koleksi ini), termasuk Husnul di Lombok Timur, Aminah dan Farah di Hulu Sungai Utara, serta Hatini dan Srikandi di Cirebon. Walaupun para perempuan ini sering menggunakan keterampilan organisasi dan pengalaman yang didapat dari organisasi korporatis negara terlebih dahulu, semuanya menyoroti bagaimana pengalaman mereka dalam organisasi perempuan yang baru yang memberikan keterampilan, kapasitas dan pengetahuan baru. Pada umumnya, pengalaman baru ini memberdayakan perempuan dan memungkinkan mereka lebih mampu menuju dan mencapai perubahan di desa melalui perjalanan yang dijelaskan dalam koleksi ini. Lebih lanjut, apa yang ditunjukkan oleh kisah-kisah perempuan adalah walaupun pengalaman sebelumnya bermanfaat tetapi itu tidak diperlukan bagi perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan. Sebenarnya, kisah-kisah ini menyampaikan bahwa semua perempuan, terlepas dari latar belakang dan perbedaan masing-masing individu, mampu memimpin aksi kolektif dengan dorongan dan dukungan dari teman seorganisasi dan OMS.

Memulai dan Melanjutkan Perjalanan: Menghadapi dan Mengatasi Tantangan dan Ketakutan

Ketegangan dan ekspektasi rumah tangga

Bagi banyak perempuan, keterlibatannya dalam kelompok atau aktivitas perempuan tidak lepas dari tantangan, karena partisipasi secara aktif dalam kegiatan di luar rumah tangga secara langsung dan tidak langsung, menantang norma tentang mobilitas dan peran domestik perempuan. Lastri, misalnya, menjelaskan bahwa suaminya tidak mengizinkannya bergabung dengan Sekolah Perempuan. Mia, di Deli Serdang, Sumatera Utara, menjelaskan ada tanggapan yang mirip dengan pengalaman Lastri, yaitu bahwa suaminya tidak mau Mia pergi ke hotel dan restoran untuk rapat BITRA; tempat yang dianggap tidak pantas untuk perempuan. Akan tetapi, mereka tetap berusaha dan memperlihatkan kepada suami mereka bagaimana informasi yang baru mereka peroleh bermanfaat untuk keluarga mereka, dan perempuan-perempuan tersebut kian hari kian mendapatkan dukungan dari suaminya.

Kisah-kisah ini juga menggambarkan bagaimana perempuan, seperti Ati, menghadapi berbagai ekspektasi pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak di samping keikutsertaannya dalam masyarakat dan menjalankan usaha kecil. Dalam kasus Ati, ekspektasi bahwa dia akan berada di rumah ketika anak-anaknya

pulang dari sekolah, memengaruhi keputusannya untuk hanya mengikuti kegiatan yang berakhir sebelum jam 4 sore. Kelompok Pekka^{xxv} menampung kebutuhannya dengan menyesuaikan jadwal.

Kurang kepercayaan diri

Kesempatan baru yang diambil perempuan juga memunculkan beberapa ketakutan mereka. Banyak di antara mereka kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum dan berurusan dengan wakil dari dinas pemerintah. Contohnya, Aminah, seorang eks-pekerja migran dan orang tua tunggal di Hulu Sungai Utara, menjelaskan bahwa dia merasa takut dan kurang percaya diri ketika berkomunikasi dengan pejabat pemerintah. Laila, seorang nelayan dari Pangkep, juga merasa takut dan menerangkan bahwa sebelum bergabung dengan Sekolah Perempuan, 'kalau ada orang dari pake baju dinas, jalan di dermaga saja, saya sembunyi. Saya takut, takut mengeluarkan sesuatu, takut salah.'

Namun, terlepas dari tantangan yang bermacam-macam, perempuan tetap teguh dan kepercayaan dirinya bertumbuh. Inilah hasil dari dukungan yang diberikan oleh kelompok perempuan dan pelatihan yang mereka dapat. Kepercayaan diri Mia, misalnya, tersendat ketika diminta berpidato di depan khalayak ramai, tapi, seperti yang dia ceritakan, 'trus saya mencoba terus, saya berani-beranian aja'. Begitu juga, Lastri yang mengakui bahwa dia dulu gemetar, meski hanya diminta untuk memperkenalkan dirinya, sekarang mempunyai kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Bahkan Hatini di Cirebon, yang lebih berpengalaman dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, pada awalnya merasa segan, tapi setelah mengikuti program kader 'Aisyiyah, merasa dirinya 'berani ngungkapin ada mengusulkan pendapat, atau apa aja'.

Perlawanan terhadap perempuan yang mengambil peran pemimpin atau menantang aktor yang berpengaruh

Perempuan tidak hanya menghadapi tantangan dan perlawanan ketika mereka mulai aktif dalam kelompok perempuan, tetapi juga ketika mereka muncul sebagai pemimpin perempuan. Contohnya, Veronika menghadapi tekanan dari keluarganya setelah seorang kerabat keluarga terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga Veronika memintanya untuk tidak melanjutkan kasusnya. Veronika bercerita bahwa dia menerangkan kepada keluarganya bahwa kasus 'tindakan tersebut harus ditangani dan dilaporkan ke polisi. Tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan, dan tidak boleh diselesaikan oleh keluarga'.

Terkadang, tindakan berat diambil untuk membisukan perempuan. Julianti, misalnya, menceritakan setelah dia menantang pemerintah desa dan guru sekolah tentang rendahnya kehadiran guru di sekolah lokal, kepala sekolah mengancamnya dengan guna-guna. Setelah menderita sakit parah selama dua tahun, seorang dukun di mana Julianti berobat memastikan bahwa dia jadi korban ilmu hitam. Ketika Julianti sakit, ia dinasihati orang-orang yang menjenguknya untuk menghentikan kegiatannya di Sekolah Perempuan karena, mereka percaya itulah yang menyebabkan penyakitnya. Sebaliknya, Julianti menolak nasihat tersebut: 'makin kuat tantangan saya suka. Saya gadis pulau, besar ombak lalui saja, dilalui saja'.

Memfasilitasi dan Membangun Keterampilan, Kapasitas dan Kepercayaan Diri

Kegiatan kelompok di ruang yang aman bukan hanya menguatkan kepercayaan diri perempuan dan keterampilannya, seperti berbicara di ruang umum. Pelatihan keterampilan untuk menunjang ekonomi perempuan menghasilkan peningkatan signifikan dalam kemandirian dan kemampuan ekonomi. Dalam beberapa kisah, perempuan menceritakan aspirasi agar anak mereka mampu melanjutkan pendidikannya. Menurut Hatini, kemampuannya untuk menjamin pendidikan anaknya berasal dari keterampilan ekonomi yang ditumbuhkan sebagai kader 'Aisyiyah. Begitu juga, Hj. Nisa di Lombok Tengah mendapatkan keterampilan menjahit seragam sekolah untuk anaknya, serta membuat dan menjual kue dan jajanan yang lain, dalam kelompok La Tansa untuk perempuan eks-pekerja migran. Kumpulan kisah ini juga menggambarkan

bagaimana perempuan, seperti Hatini dan Tari, membawa pulang pengetahuan dan keterampilan baru yang mereka dapatkan untuk mengajar putri mereka tentang kesetaraan gender, yang menginspirasi perempuan muda untuk bergabung dalam kelompok perempuan dan meneruskan pendidikan tinggi untuk bekerja demi keadilan gender.

Informasi dan keterampilan yang diterima perempuan juga menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk membela diri dalam rumah tangga. Contohnya, waktu suami Julianti menuntutnya agar tidak lagi bergabung dalam Sekolah Perempuan, Julianti menolaknya. Julianti menjelaskan kepercayaan diri ini berasal dari pelatihan yang dia dapat dari Sekolah Perempuan, yang dalam pandangannya, membuatnya lebih menghargai tubuhnya dan dirinya sendiri. Begitu juga, Lastri, anggota Sekolah Perempuan di Gresik, merasa berdaya untuk mengakses pelayanan kesehatan yang tidak dipercayai suaminya, dan bersama teman-temannya, Lastri menantang perawat yang minta tanda tangan suaminya sebelum mengakses layanan.

Di luar ranah domestik, dukungan dan pelatihan yang ditawarkan kelompok perempuan juga membantu meningkatkan kepercayaan diri perempuan yang dimuat dalam kumpulan ini dalam berurusan dengan pejabat pemerintah demi menyuarkan kebutuhan perempuan. Farah, misalnya, menjelaskan dia sekarang cukup percaya diri untuk bersuara di depan pemerintah desa dan kabupaten. Demikian juga, bersama dengan anggota Pekka yang lain, Aminah mengadvokasi Peraturan Desa untuk mendirikan BUMDes, advokasi yang mengharuskan ia berurusan dengan beberapa wakil dari pemerintah desa. Sedangkan, Lasinem—yang pada awalnya jarang ke Kantor Desa—menjadi lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat di ruang publik, termasuk dalam Musyawarah Desa.

Menumbuhkan Pemahaman dan Kesadaran

Ketika dibaca secara keseluruhan, kisah-kisah perjalanan hidup ini menunjukkan bahwa kami bisa mengidentifikasi beberapa tema dan tahap pemberdayaan yang sama bagi perempuan yang hidup dalam beragam konteks desa. Pada awalnya, bagi kebanyakan perempuan ketika mulai terpapar dan tergabung dalam organisasi perempuan, mereka merasa heran dan bingung. Contohnya, Lasinem menjelaskan pemahaman tentang gender di Sekolah Perempuan bertentangan dengan semua yang dia pelajari di sekolah dan dari orang tuanya. Demikian juga, pengalaman Lastri menggambarkan bahwa bagi perempuan yang belum pernah terlibat dalam organisasi, menerima undangan untuk berkumpul saja sudah memicu kebingungan.

Walaupun begitu, hal yang baru ini membuat banyak perempuan penasaran. Misalnya Widyati, di Bantul, tertarik untuk bergabung dengan organisasi apapun, karena menurutnya 'bisa juga nambah pengalaman kan.' Sedangkan Tari, yang pada awalnya tidak berminat untuk bergabung dengan mitra FPL lokal, SPI Labuhan Batu, terkejut karena informasi yang diberikan menarik, dan secara pelan Tari menjadi lebih aktif, sampai akhirnya menjadi ketua kelompok.

Melalui partisipasi aktif mereka dalam kelompok perempuan, perempuan bersama-sama menumbuhkan pengetahuan mereka mengenai berbagai hal, termasuk struktur pemerintahan, pelayanan kesehatan, hak sipil dan akses ke program perlindungan sosial. Mereka bukan hanya lebih sadar tentang isu gender dalam kehidupan mereka sendiri, tetapi juga lebih sensitif terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan dalam komunitas lokal mereka, sehingga menciptakan perasaan solidaritas antar perempuan.

Membuat Jaringan, Membangun Kesadaran akan Tujuan

Perempuan merasa nyaman dalam kelompok dan jaringan mereka yang lebih luas. Hampir semua perempuan, dalam cerita mereka, mengacu pada kemampuan curhat dalam kelompok. Julianti, misalnya, menjelaskan dia

senang berkumpul dengan perempuan lain: ‘Empat pulau ini yang tadinya ga kenal ... sekarang tau, gini juga, banyak masukan-masukan dari teman, akhirnya bisa *sharing*, bahkan teman dari desa lain, jadi banyak, sudah akrab kayak saudara.’ Demikian pula, Farah (Hulu Sungai Utara) menjelaskan bahwa melalui kelompok perempuan dia mampu menyampaikan frustrasinya dan menerima dukungan dari anggota lain. Laeli menjelaskan dukungan yang dia dapat ‘mental ya terutama. Jadi dengan banyak kenalan, jadi tidak merasa kesulitan.’ Lingkungan tersebut menyebabkan perempuan merekrut lebih banyak anggota, dengan demikian menambah anggota kelompok dan keragaman keanggotaan kelompok.

Perempuan juga merasakan manfaat di level pribadi. Banyak perempuan menceritakan perubahan dalam keluarga, termasuk posisi tawar yang lebih baik, meningkatnya kesadaran kesetaraan gender, dan pembagian tugas rumah tangga yang lebih setara. Perubahan yang lain sering tidak berwujud, dan susah diukur ataupun disampaikan, misalnya Widyati menjelaskan keikutsertaannya dalam kelas gender Yasanti selama dua tahun menambah kepercayaan diri. Senada dengan itu, Mariana merasa bahwa sebelum dia mengikuti kelas kesadaran gender FAKTA-DAMAR di Tanggamus, dia ‘kuper [kurang pergaulan], kurang PD [percaya diri].’ Sekarang, Mariana merasa lebih percaya diri, bahkan nyaman mengambil peran pemimpin dalam acara PKK, karena apa yang dipelajarinya ‘bermanfaat benar’. Laeli, Ketua Kelompok Konstituen Lombok Timur, juga merasa berani menggunakan jaringan dari pekerja lapangan BaKTI, untuk sertifikasi usaha kecilnya.

Bagi perempuan seperti Srikandi di Cirebon dan Lastri di Gresik, kelompok perempuan memberikan tujuan dalam diri dan ruang untuk melanjutkan pendidikan. Seperti dijelaskan Lastri, walaupun dia tidak sempat melanjutkan pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Atas, ‘kebetulan di Sekolah Perempuan itu saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah’, dan hatinya masih merasa ‘punya keinginan untuk belajar gitu lho’. Bagi yang lain, biasanya perempuan yang lebih muda, seperti Mita dan Gita yang merupakan orang pertama dalam keluarganya (ataupun di desanya, seperti Mita) yang lulus dari universitas, partisipasi dalam organisasi perempuan membawa kesempatan pekerjaan dan keterampilan untuk sertifikasi usaha. Dengan kepercayaan diri dan keyakinan yang didapat, Gita dan Mita, mampu melanjutkan karirnya dan berkeluarga. Dengan demikian, kedua perempuan ini menantang norma sosial bahwa perempuan yang sudah menikah tidak mempunyai peran di luar ranah domestik.

Perubahan di tingkat pemerintah desa antara lain meningkatnya perempuan yang ikut serta dalam Musyawarah Desa. Di banyak komunitas desa, kesadaran tentang isu gender telah berkembang. Baik di Sumatera Utara maupun Lombok Timur, perempuan sekarang lebih berani melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di Timor Tengah Utara, Veronika menekankan bagaimana peran dalam kelompok paralegal yang menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga membentuk identitas dirinya dan komitmennya terhadap keadilan yang ‘harus dijunjung tinggi, di mana yang salah tetap salah dan yang benar harus dilindungi.’ Motivasi Veronika yang kuat ini terdapat dalam banyak kisah lain. Demikian juga, Srikandi menyatakan bahwa pengakuan pekerjaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019, menambah semangatnya untuk mengabdikan pada masyarakat desa, khususnya perempuan. Ini membuktikan perempuan membentuk kembali identitas mereka dengan ilmu, kapasitas dan jaringan yang didapat melalui kelompok perempuan.

Struktur Kumpulan

Kumpulan ini terdiri dari lima tema dan bidang utama. Bagian pertama berisi delapan kisah perjalanan hidup yang menunjukkan cara perempuan meningkatkan akses kepada perlindungan sosial. Empat di antara perempuan ini—Mita, Aminah dan Farah—merupakan anggota Serikat Pekka di desa mereka. Melalui Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi PEKKA, mereka dan rekannya di Bangkalan, Jawa Timur dan Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, membantu warga desa untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang

penting, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, dan Kartu Keluarga, yang dibutuhkan untuk mengakses berbagai program perlindungan dan bantuan sosial. Di dua tempat ini, Serikat Pekka menyediakan tempat berkumpul di mana perempuan saling mendukung melalui kelompok simpan pinjam, terutama bagi perempuan kepala keluarga yang merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan. Bagian ini juga memuat empat kisah perjalanan hidup anggota kelompok Sekolah Perempuan KAPAL Perempuan: Lasinem dan Lastri dari Gresik, Jawa Timur; serta Laila dan Julianti dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Sulawesi Selatan. Cerita-cerita ini memberi wawasan mengenai proses pembelajaran tentang kesetaraan gender, dan pada kasus Laila dan Julianti, aplikasi keterampilan dikembangkan dalam kelompok perempuan untuk mengadvokasi kebutuhan masyarakat.

Bagian kedua memuat kisah perjalanan hidup Gita dan Nisa, dan pekerjaan mereka untuk mempromosikan migrasi yang aman dan dukungan untuk para eks-pekerja migran dan keluarga mereka di Lombok Tengah, yang didukung oleh Migrant CARE dan mitra lokalnya Perkumpulan Panca Karsa. Cerita Gita menunjukkan keikutsertaannya dalam pengumpulan data yang partisipatif, advokasi, dan perubahan kebijakan, telah meningkatkan kepercayaan dirinya dan keberanian untuk melanjutkan karir sebagai guru di masyarakat yang kurang beruntung. Kisah perjalanan hidup Nisa menjelaskan pengalamannya sebagai pekerja migran di Arab Saudi dan tantangan perekonomian setelah dia pulang ke Lombok. Kedua pengalaman ini menyebabkan pendirian kelompok La Tansa untuk para perempuan eks-pekerja migran untuk saling mendukung dan secara kolektif mengembangkan keterampilan untuk menunjang ekonomi perempuan desa.

Bagian ketiga berfokus kepada kontribusi dua perempuan dalam memperbaiki kondisi pekerjaan bagi pekerja rumahan. Kisah Mia, anggota Serikat Pekerja Rumahan (SPR) Sejahtera Deli Serdang, Sumatera Utara, menjelaskan perjalanan kepimpinannya dan bagaimana ia mewakili perempuan pekerja rumahan hingga mendapat kepercayaan diri untuk berurusan dengan pejabat pemerintah. Kisah Widyati, anggota Kelompok Kreatif Bunda di Bantul, Yogyakarta, menggambarkan bagaimana kesadarannya tentang hak pekerja, kondisi pekerjaan yang aman, dan gender berkembang, hal ini memungkinkan Widyati untuk mengembangkan usahanya dan mewakili kelompok pekerja rumahan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Bagian keempat menceritakan empat kisah perjalanan hidup perempuan yang bekerja untuk memperbaiki kesehatan dan nutrisi perempuan. Sebagai anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah dan kader kesehatan reproduksi, Hatini dan Srikandi di Cirebon, Jawa Barat, meningkatkan partisipasi mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dari anggota PKK dan Posyandu dengan mengembangkan kepemimpinannya dalam menanggapi kebutuhan perempuan dan mensosialisasikan pentingnya deteksi dini kanker. Kedua kisah ini menggambarkan betapa pekerjaan ini terasa dalam hati, yang bagi Srikandi merupakan sebuah 'kewajiban'. Di Tanggamus, Lampung, Sumatera, kisah perjalanan hidup Sulis dan Mariana juga menunjukkan peran pelatihan kesadaran gender dan kepemimpinan dalam memperluas dan mengembangkan kapasitas orang yang berpengalaman sebagai pemimpin masyarakat. Sulis dan Mariana berpartisipasi dalam kelas pengarusutamaan gender dan sekarang berperan sebagai pemimpinnya. Kedua kisah ini membuktikan perempuan menerapkan pemahaman baru tentang kesetaraan gender dalam kehidupan dan keluarga, dan ingin mengajarkannya kepada orang lain.

Bagian terakhir memuat lima kisah perjalanan hidup perempuan yang aktif dalam upaya pengurangan kekerasan terhadap perempuan di masyarakat setempat, yaitu di Sumatera Utara, Lombok Timur dan Timor Tengah Utara. Di Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tari mewakili Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu di Musyawarah Desa dan menjadi kunci dalam perancangan dan pelaksanaan Peraturan Desa tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Di Lombok Timur, Laeli adalah Ketua Kelompok Konstituen, di mana Husnul menjadi anggotanya. Bersama-sama, mereka bekerja dalam tim paralegal yang mendukung korban dan penyintas kekerasan dalam rumah tangga, dan berhasil mengajukan alokasi Dana Desa untuk memperbaiki pelayanan kesehatan. Di Timor Tengah Utara, Veronika juga menyediakan bantuan paralegal

kepada korban dan penyintas dan menjelaskan bahwa dia bangga atas ilmu dan pengalaman yang dia dapat melalui kegiatan ini. Yohana, pendiri mitra lokal FPL, YABIKU, menjabat sebagai anggota DPRD periode 2014 – 2019. Dalam periode ini dua peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak, yang diinisiasi oleh koalisi OMS, dirancang dan disahkan sebagai Peraturan Daerah. Dari legislasi hingga dukungan di garis depan, bagian ini menyoroti berbagai cara perempuan untuk mendukung korban dan penyintas, dan kegiatannya untuk mengubah norma gender dan sosial yang mengakibatkan banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Dengan menampilkan kata-kata, ungkapan, cara menyampaikan perasaan, dan persepsi perubahan perempuan sendiri, koleksi ini memberi sumbangan berharga mengenai pembangunan masyarakat dan gender di daerah perdesaan Indonesia. Kisah-kisah berikut menggambarkan bagaimana perempuan mempertimbangkan dan menceritakan perjalanan hidup mereka: momen-momen penting yang menandai hidup mereka; hubungan dan teman yang berpengaruh; serta pemahaman dan kesempatan baru. Koleksi ini merupakan sebuah jendela yang memungkinkan kami untuk menghargai kekuatan dan ketahanan perempuan, terutama dalam keadaan di mana perempuan menghadapi kungkungan norma gender yang membatasi ruang dan perannya secara sosial, kemiskinan, dan tantangan lainnya. Kisah perjalanan hidup ini tidak mengikuti alur cerita yang linier, melainkan menggarisbawahi pentingnya dukungan dari teman dan OMS yang membantu perempuan untuk mengatasi perlawanan dan hambatan. Setiap cerita berakhir dengan pandangan ke depan, tentang aspirasi dan harapan setiap perempuan. Pandangan ini mengingatkan kita walaupun perempuan telah mencapai perubahan positif yang besar, mereka sadar terhadap berbagai tantangan dan ingin meluaskan partisipasi perempuan supaya mampu menciptakan sebuah masa depan yang lebih baik.

ⁱ Untuk merujuk artikel ini: Setiawan, K.M.P., B.A. Beech Jones, R. Diprose, dan A. Savirani, 2020. Perempuan Menggerakkan Perubahan di Daerah Perdesaan Indonesia. Dalam K.M.P. Setiawan, B.A. Beech Jones, R. Diprose, and A. Savirani [Eds], *Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124332>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org. Untuk merujuk kumpulan ini: Setiawan, K.M.P., B.A. Beech Jones, R. Diprose, dan A. Savirani [Eds], 2020. *Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124332>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

ⁱⁱ UU No. 31/2002 dan UU No.12/2003.

ⁱⁱⁱ E.S. Prihatini, "Electoral (In)quality", *Inside Indonesia* 135 (Januari – Maret 2019), tersedia di: <https://www.insideindonesia.org/electoral-in-equity>.

^{iv} A.M. Pratiwi, "The Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament in Regency/City-level Legislative Council Period 2014-2019", *Jurnal Perempuan* 24:2 (2019): 151-163.

^v Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), tersedia di: https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf.

^{vi} Diprose, R., A. Savirani, K.M.P. Setiawan, dan N. Francis, 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

^{vii} OMS atau organisasi masyarakat sipil dalam penelitian ini adalah mitra Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment (MAMPU): MAMPU di level nasional, yaitu 'Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) serta mitra lokal mereka—Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur). Untuk diskusi yang lebih lanjut tentang struktur dan model dukungan yang diberikan kepada kelompok perempuan, serta kesempatan dan konsekuensi dari struktur-struktur tersebut, melihat, Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Bagian 6.

^{viii} Penelitian lapangan dilakukan di sembilan provinsi, dua belas kabupaten dan empat belas desa (dua belas desa penelitian dan dua desa "kontrol" di mana tidak ada intervensi OMS). Lebih dari 450 orang diwawancarai secara dalam, dan 150 orang yang lain terlibat dalam tiga puluh diskusi kelompok (*focus group*).

-
- ^{ix} S.B. Gluck, "Women's Oral History: Is It So Special?", dalam T.L. Charlton, L.E. Myers, dan R. Sharpless, *Thinking about Oral History* (New York: AltaMira, 2008), 129-131, 139; R.I. Rahayu, "Menulis Sejarah Sebagaimana Perempuan: Pendekatan Filsafat Sejarah Perempuan," *Jurnal Sejarah dan Budaya* (2016): 109.
- ^x S. Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 18; B.A. Beech Jones, "Narrating intimate violence in public texts: Women's writings in the Sumatran newspaper *Soenting Melajoe*" dalam K. McGregor, A. Dragojlovic dan H. Loney, *Gender, Violence and Power in Indonesia Across Time and Space* (London & New York: Routledge, 2020), 19-28.
- ^{xi} S. Blackburn, "Feminism and the women's movement in the world's largest Islamic nation", dalam M. Roces & L. Edwards, *Women's Movements in Asia. Feminisms and Transnational Activism* (Abingdon: Routledge, 2010), 21-33.
- ^{xii} S.G. Davies, "Women in politics in Indonesia in the decade post-Beijing", *International Social Science Journal* 57:184 (2005): 232.
- ^{xiii} S.E. Wieringa, "The birth of the New Order state in Indonesia: sexual politics and nationalism", *Journal of Women's History* 15 (2003): 70-91.
- ^{xiv} Migunani, *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia: A Study of Collective Action Initiated by Partners of the MAMPU Program* (Yogyakarta: Migunani & MAMPU, 2017), 2.
- ^{xv} M. Nyman, *Democratizing Indonesia. The Challenges of Civil Society in the Era of Reformasi* (Copenhagen: NIAS Press, 2006).
- ^{xvi} K. Robinson, *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. (London & New York: Routledge, 2008).
- ^{xvii} K. Robinson, "Indonesian National Identity and the Citizen Mother", *Communal/Plural* 3 (1994): 65-81.
- ^{xviii} Blackburn, *Women and the State*, 27-8.
- ^{xix} Davies, "Women in politics in Indonesia".
- ^{xx} K.H. Dewi, *Indonesian women and local politics: Islam, Gender, and Networks in post-Suharto Indonesia* (Singapore: NUS & Kyoto University Press, 2015), 45.
- ^{xxi} Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- ^{xxii} M. Syukri, P.P. Bachtar, A. Kurniawan, G.M.S. Sedyadi, Kartawijaya, R.A. Diringrat & U. Alifia, *Study of the Implementation of Law No. 6/2014 on Villages: Baseline Report* (Jakarta: The SMERU Research Institute, 2017).
- ^{xxiii} Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- ^{xxiv} Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- ^{xxv} PEKKA merujuk pada Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, sedangkan "Pekka" merujuk pada serikat dan kelompok yang dibentuk dan dipimpin oleh perempuan desa.

Bagian 1:

Peningkatan Akses Perlindungan Sosial



Ati

Koordinator Desa Pekka

Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur¹

Ati (38 tahun) merupakan koordinator kelompok Pekka di desa penelitian Bangkalan sejak tahun 2015. Ibu rumah tangga ini juga pemilik sekaligus kepala sekolah taman kanak-kanak (TK) yang didirikannya pada tahun 2013. Ati menikah pada usia 18 tahun dan saat ini mempunyai dua anak. Ia dan suaminya, yang juga berasal dari desa ini, memiliki usaha persewaan tenda dan *sound system* yang cukup dikenal di desa dan sekitarnya.

Keterlibatan Ati di Pekka berawal dari dorongan Mukti, sepupu Ati yang juga tokoh masyarakat di desanya. Pada tahun 2015, PEKKA² mulai beraktivitas di desa Ati dan meminta bantuan Kepala Desa untuk mencari anggota kelompok perempuan. Kepala Desa kemudian meminta Mukti, yang dikenal sebagai jagoan (*blater*) dan guru mengaji, untuk menunjuk Ati supaya membantu kegiatan Pekka. Ati dipercayai karena pengalamannya sebagai kader Posyandu, dan juga sebagai pemimpin Muslimat NU. Ati tidak menolak karena merasa penunjukan itu adalah kepercayaan dari para tokoh desa kepada dirinya. Apalagi, Kepala Desa adalah anak tiri dari Umi, guru mengajinya sejak remaja.

Ati, dengan bahasa Indonesia yang berdialek Madura, menceritakan bahwa ia mulai terlibat aktif dengan kelompok sejak dirinya terus menerus didatangi oleh pendamping lapangan PEKKA di tingkat kecamatan Bangkalan. Selain mendatangi rumahnya, pendamping lapangan juga mengajak Ati ikut dalam pertemuan kader. Saat itu, PEKKA belum memiliki *center*, sehingga pertemuan dilakukan secara berpindah-pindah di rumah-rumah kader di desa penelitian Bangkalan.

“Saya ndak ngerti, apa itu PEKKA, terus didatangi sama Mbak Fat [Ketua PEKKA level kecamatan]. Tiap ada pertemuan di datengin-didatengin Mbak Fat [sebelumnya]. Terus pada akhirnya saya ngerti, terus ada pertemuan kader tiap bulan. Tapi ndak ada kantornya sebelumnya itu. Pertemuannya pun terkadang pindah-pindah, kalau saya ditelfon, pertemuan kader, pun kadang saya nyari ‘di mana?’, [terkadang] cari-cari sampe ndak ketemu. Kan saya bisa baca tulis, tapi jelek.” (Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Kepercayaan yang diberikan pada Ati untuk menjadi kader Pekka juga dikarenakan jaringan yang dimilikinya sejak tahun 1990-an. Saat PEKKA masuk ke desa pada tahun 2015, Ati adalah kader Posyandu. Dalam peran ini, Ati memiliki jaringan komunikasi dengan bidan desa untuk penyelenggaraan Posyandu balita, perempuan hamil, dan lansia. Selain itu, sebagai pendiri satu-satunya TK di dusunnya, Ati mengenal baik para ibu yang menyekolahkan anak mereka di TK miliknya. Ati juga adalah Ketua Kelompok Pengajian Muslimat NU, yang beranggotakan hingga 40 orang perempuan muda hingga lansia. Berkat jaringan kuat yang dimiliki, menempatkan Ati pada posisi sentral dalam kegiatan perempuan di desa. Tak lama setelah dipilih sebagai kader Pekka, ia berhasil mengumpulkan tak kurang dari 25 anggota serikat baru.

¹ **Penulis:** Indah Surya Wardhani dan Anastasia Imelda Cahyaningrum. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

² PEKKA merujuk pada Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, sedangkan Pekka adalah serikat dan kelompok yang dibentuk dan dipimpin perempuan kepala keluarga di tingkat desa.

Ati mulai memahami gerakan PEKKA setelah diajak membantu kegiatan Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK) PEKKA di desa tetangga. Meski mendapat peran kecil, seperti memberikan nomor antrean kepada warga yang datang, ia mendapatkan gambaran kuat mengenai perjuangan PEKKA dalam membantu masyarakat.

“Di sana ada ustad-ustad, sama tokoh-tokoh masyarakatnya, sama Klebunnya [Kepala Desa]. Terus tambah meluas, saya ngerti.” (Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Sebagai ketua kelompok, peran Ati sangat besar dalam menghidupkan kegiatan kelompok Pekka yang dipimpinnya. Suami Ati mendukung kegiatannya bersama Pekka dengan catatan bahwa kegiatan tersebut tidak memakan waktu hingga satu hari penuh atau menginap.

“Iya, kan anak saya sudah besar. Jadi apa-apa sudah mandiri anak saya. Kalau ikut Pekka kan seharian. Terus kadang pernah, pelatihan tiga hari di rumahnya [Ketua Serikat Pekka], sampai maghrib, jam tujuh malam. Pernah dimarahin [suami], ikut kegiatan seharian itu. ... Iya, agak takut itu saya. Tapi kalau seharian ndak ikut, nanti anak saya mau sekolah dan sebagainya siapa yang nyiapin ... Tapi sekarang endak, maksimal sudah jam empat sore. Semua kader [membuat jadwal].” (Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Ati mempraktikkan pengalamannya menghidupkan kelompok pengajian Muslimat di dalam kelompok Pekka. Ati mengajak anggota mengumpulkan uang sesuai kemampuannya masing-masing untuk membentuk tabungan simpan pinjam, yang merupakan salah satu daya tarik bagi anggota kelompok Pekka.

“Ya, masing-masing [sesuai kemampuan], kadang tabungannya per-orang [terkumpul satu tahun] ada yang Rp. 200 ribu, ada yang Rp. 500 ribu, satu tahun nabungnya. [Setoran tabungan] Rp. 5.000, sebulan dua kali. Ada yang nabung Rp. 10.000 [sekali setor]. Pokoknya dapet ratusan lah.” (Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Tersedianya lembaga yang memberikan pinjaman uang untuk keperluan rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan utama perempuan di desa. Kelompok simpan pinjam Pekka berbeda dengan kelompok Muslimat NU yang tabungannya disetorkan oleh Ati ke lembaga perbankan yang dikelola oleh pondok pesantren di kecamatannya. Sedangkan, tabungan kelompok Pekka disetorkan ke PEKKA di Bangkalan untuk dikelola melalui Koperasi Serikat “Marlena”. Dalam perhitungan kasar, uang yang terkumpul dari iuran kelompok Ati yang beranggotakan sekitar 25 orang mencapai sedikitnya Rp. 5.000.000 per tahun. Pada 2017, sempat terjadi suatu permasalahan terkait keuangan koperasi dan Ati tidak tahu betul apa yang menyebabkannya. Sebagai pemimpin, untuk mencegah kekecewaan anggota kelompok, Ati rela mengganti uang anggota kelompok dari kantong pribadinya sendiri, sebelum uangnya kemudian dikembalikan PEKKA.

Pada tahun 2017 itu pula, keikutsertaan Ati dalam kegiatan Pekka mengalami masa surut. Ati mengatakan bahwa yang membuatnya mundur adalah keterbatasan mobilitas. Ati tidak bisa mengendarai motor, sementara banyak kegiatan Pekka dilakukan di kantor pusat PEKKA kecamatan yang berjarak sekitar 10 kilometer dari rumahnya. Dengan kondisi desa yang minim ketersediaan angkutan umum, Ati kesulitan datang ke center PEKKA jika tidak ada yang mengantarnya. Mundurnya Ati dari kegiatan Pekka membuat aktivitas kelompoknya meredup seketika, para anggotanya juga memilih beristirahat sejenak sampai Ati kembali.

“Saya ndak punya pendamping lagi, akhirnya saya bilang [Ketua Serikat Pekka], tahun 2017 sampai 2018, ‘Mbak, saya berhenti dulu, saya mundur lah.’ ‘Loh ndak boleh mundur lah, ndak boleh mundur mbak Ati’, katanya. Saya mundur dulu, kan saya ndak punya pendamping, dak punya temen, saya repot sendirian. ‘Ya ndak boleh mundur, ndak papa kalau berhenti sebentar, kalau ada yang nganterin bolehlah kesini’, kata Mbak. Ya terus saya ndak aktif satu tahun, sama, kelompok-kelompok saya juga ndak aktif.” (Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Ati kembali aktif dalam kegiatan Pekka tahun 2018 saat keponakannya Mita yang kuliah di kabupaten lulus dan kembali ke desa. Mita, sambil mendampingi Ati, rajin terlibat dalam berbagai kegiatan Pekka di *center*. Mita kemudian dirangkul menjadi kader Pekka, dan bertugas untuk membantu Ati mengaktifkan kembali kelompok sebuah dusun yang pernah didirikan bibinya tersebut. Alhasil, kelompok dusun itu sekarang beranggotakan sekitar 40 orang. Sedangkan Ati fokus mengembangkan kelompok ke dusun yang lain, dan berhasil merekrut 100 anggota.

Kegiatan kelompok, terutama pengajian, diintegrasikan dengan materi pemberdayaan dan kesetaraan gender. Setidaknya sebulan sekali, pengurus serikat dari kabupaten datang bergantian mensosialisasikan pentingnya legalisasi identitas kependudukan. PEKKA mendorong anggotanya untuk dapat memahami hak sipil kependudukan, supaya dapat mengakses layanan dasar kesehatan, pendidikan, serta program bantuan dari pemerintah. Selain kegiatan pemberdayaan, anggota kelompok dikoordinasikan untuk mengelola dana. Setiap anggota mengumpulkan iuran wajib Rp. 2.000 dan tabungan sukarela setiap pertemuan sekali seminggu.

Ati berhasil membawa perubahan bagi dirinya dan kelompok perempuan di desa berkat kepemimpinannya di kelompok Pekka. Meski demikian, Ati masih menghadapi situasi desa yang belum sepenuhnya mendorong keterlibatan perempuan di ruang publik. Norma sosial di desa Bangkalan ini cenderung melekatkan banyak peranan hanya kepada laki-laki di ruang publik, sementara perempuan terbatas di ruang domestik keluarga, seperti dijelaskan oleh Ati:

“Ndak usah sekolah, apa perempuan sekolah, [perlu] utang-utang. Ndak usah disekolahkan” Mita disuruh [keluarga besar Mukti] berhenti dari SMP. Sampai sekarang banyak yang bilang begitu. “ah, anak saya lulus, kuliah. [Paling] perempuan juga jadi tukang masak. Mau jadi apa?”... Se-dusun Barat dan Timur, baru Mita yang pertama kali kuliah. Perempuan lagi ... makanya kata Ketua Serikat Pekka “Ayo to, buktikan ke masyarakat. Ayo maju, kamu ikut Pekka, buktikan ke masyarakat.” (Ati, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Bersama keponakannya, Ati tetap semangat untuk mewadahi perempuan untuk berkumpul, menabung, dan berbagi pendapat. Melalui kelompok Pekka dusun, perempuan di desa Ati mulai mengetahui hak dan posisi mereka di tengah masyarakat.

Mita

Kader Pekka

Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur¹

Mita (23 tahun) merupakan anak kedua mantan Kepala Dusun di sebuah desa di Bangkalan. Dirinya aktif menjadi anggota Serikat Pekka setelah diajak oleh bibinya, Ati, pada tahun 2015. Sambil kuliah, Mita bekerja sebagai guru di taman kanak-kanak (TK) yang ia dirikan bersama Ati dan juga mengajar mengaji di langgar milik keluarganya. Mita juga semangat melanjutkan mimpi pendidikannya, yang didukung oleh keluarga yang sama-sama mementingkan ilmu.

Dia merupakan perempuan pertama di desa yang menamatkan kuliah. Setelah lulus dari pesantren, Mita memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Jurusan Pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura. Sesudah wisuda pada tahun 2018, dua hari dalam seminggu dia mengajar bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Selain mengajar di MTs, Mita dan bibinya bersama-sama mengelola satu-satunya TK swasta di desa. Perjuangan Mita untuk mendirikan TK tidaklah mudah. Pada saat kuliah, Mita hanya bisa mengajar pada akhir pekan ketika dia pulang ke desa, pada hari lain, murid TK diajar oleh Ati dengan pendidikan keagamaan.

“Emang awalnya dibarengin sekaligus pas Posyandu. Anak-anak dibarengin sekolah. [Bibi Mita] awalnya gak ngajar dulu, saya kan liburan 2 semester itu 2 bulan ya saya terus yang ngajar. Gak tau anak-anak sama sekali gimana nulis ‘A’. Satu-satu saya, ‘gini dulu tarik ke bawah’, tapi bahasa Madura, anak-anak gak ngerti bahasa Indonesia ... Akhirnya saya merasa berhasil, saya senang soalnya kan awalnya anak-anak kan tidak tahu sama sekali. Anak-anak itu jadi tahu baca mba, b-a-ba c-a-ca gitu kok bisa. Yang awalnya tidak bisa huruf A sama sekali.” (Mita, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Bagi Mita, TK ini adalah ajang pembuktian dirinya kepada warga desa bahwa perempuan tidak selalu identik dengan urusan rumah tangga, tapi dapat berbuat lebih besar. Waktu luang selama di kampus sering dimanfaatkan Mita untuk menggali informasi dan mencari jaringan seluas mungkin dalam upaya legalisasi TK. Langkah awal legalisasi TK adalah pendirian yayasan.

“Pas saya akhirnya boleh pasang banner [plang spanduk], dipasang di sana ya pakai kayu didirikan. Yang kerja saya, ibu saya, bibi sama anak ceweknya. Yang berdiri maku nali ya saya sendiri sama ibu saya. Terus bapak saya sibuk ke sana ya lagi ada urusan. Ya saya, Mbak, [yang pasang], biar cepat selesai.” (Mita, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Mita pada akhirnya mendirikan Yayasan Badrur Rohim di rumahnya. Seluruh informasi ini dia dapatkan dari jejaring teman kuliahnya yang menjadi guru di Persatuan Guru Republik Indonesia serta keberaniannya bertanya-tanya tentang perizinan di kantor dinas terkait. Ternyata untuk memproses perizinan mendirikan yayasan dan legalitas status TK memerlukan biaya. Proses tersebut dapat ia lalui, sehingga TK yang didirikan bersama keluarganya sudah memiliki izin pendirian dan operasional.

¹ **Penulis:** Indah Surya Wardhani dan Anastasia Imelda Cahyaningrum. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

“Mba saya yang di Surabaya itu dapat arisan. ‘Wes gak papa’ [sudah tidak apa-apa] gitu katanya. Bapak saya ngga punya uang juga. Dapat darimana ya, masa 2 juta. “Wes gakkapa, uang saya dapat arisan” gitu. Mba saya emang gitu ya Mba, kalau ke saudara-saudaranya gak hitung-hitungan. Intinya kalau punya mesti ngasih-ngasih. Ya 2 juta itu Bapak saya ngga punya soalnya mba, uang dari Mba saya itu 2 juta yang ngajukan TK. Lima ratus itu ngga punya uang juga Bapak saya, mau dapat darimana ya Bapak saya itu ngga punya apa-apa. Diminta agennya sudah selesai ya yang proposal itu 500 uang ngutang punya bibi saya itu yang tabungannya itu 500. Udah, pas izin TK itu kan udah selesai. Sudah keluar, ini TKnya jadi.” (Mita, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Keaktifan Mita dalam Pekka juga berawal dari ajakan bibinya, Ati, yang merupakan koordinator Pekka. Sebagai bentuk fokus PEKKA terhadap pemenuhan hak sosial, pada 2018 Mita mulai mengurus Itsbat Nikah dan Kartu Keluarga (KK) untuk tetangga dan adiknya. Ia mendatangi kantor desa, Kantor Urusan Agama, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bangkalan, serta Kantor Pengadilan Agama.

Mulanya ia sering merasa apa yang dia lakukan telah mengambil tugas perangkat desa. Kantor Desa sendiri membuka layanan dokumen-dokumen ini dengan biaya Rp. 150.000 per KK atau per KTP. Sementara itu, untuk surat pengesahan pernikahan dari Itsbat Nikah harus melalui calo dengan biaya (tidak resmi) bisa mencapai Rp. 1 juta hingga Rp. 2 juta. Berkat dukungan dari ibu, bibinya, dan pengurus Pekka yang lain, Mita tetap mengurus dokumen-dokumen tersebut. Warga yang masih merasa takut atau malu untuk mengurus dokumen secara langsung di balai desa merasa tertolong dengan bantuan Mita.

Sejak 2018, Mita telah berperan besar dalam mengaktifkan kembali kelompok Pekka di sebuah dusun bersama Ati, dan berhasil mendapatkan 40 anggota. Satu tahun kemudian, Mita dan Ati juga menginisiasi terbentuknya yasinan mingguan perempuan yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Mita mengaku ingin membagikan materi kesetaraan gender dan hak sosial perempuan lewat yasinan. Mita dan Ati menjadikan yasinan sebagai langkah awal kaderisasi Pekka dan pembentukan kelompok.

Mita juga termasuk perempuan yang melawan budaya menikah muda. Berbeda dengan sebagian besar perempuan desa yang telah berkeluarga sejak usia remaja, Mita menikah pada usia 23 tahun pada pertengahan 2019. Walaupun telah menikah, Mita senantiasa didorong oleh ayah dan ibunya untuk mencari ilmu melalui pendidikan tinggi dan mengamalkannya lewat mengajar. Lagipula, kedua orang tua dan suaminya tetap ingin Mita mengikuti kegiatan Pekka dan mengelola TK setelah menikah.

Meski pernah mengalami kendala legalitas dan hak kepemilikan TK, Mita dan Ati mengaku tidak akan pernah lelah memperjuangkan pendidikan dan hak sosial. Mita berharap bahwa semua anak-anak desa bisa bersekolah sampai bangku kuliah seperti dirinya. Dalam kepengurusan Pekka, salah satu harapan terbesarnya adalah dapat berkunjung ke Yayasan PEKKA di Jakarta dan bertemu kader Pekka seluruh Indonesia.

“Saya pengen Mbak suatu saat nanti saya diajak ke Jakarta, ke Seknas PEKKA. Sepertinya seru, saya pengen ke luar kota yang besar seperti Jakarta. Makanya saya aktif Pekka biar nanti mungkin bisa diajak.” (Mita, desa penelitian di Bangkalan, 20 Februari 2019)

Sedangkan di desa, ia berharap dirinya bisa menjadi bagian dari perangkat desa dan terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai kebutuhan perempuan desa. Ia juga kerap memberi motivasi kepada ibu-ibu dan perempuan desa lainnya agar bisa mandiri secara ekonomi, melalui pendidikan dan berorganisasi. Bahkan, sejak Mita lulus dari universitas pada 2018 sudah ada sekitar dua puluh anak muda desa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Lasinem

Koordinator Divisi Pendidikan Sekolah Perempuan

Gresik, Jawa Timur¹

Lasinem, 31 tahun, merupakan pemimpin Sekolah Perempuan di sebuah desa di Gresik. Dia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dan ia adalah anak perempuan satu-satunya. Lasinem berasal dari keluarga miskin dan bapaknya bekerja sebagai tukang kebun di sebuah sekolah taman kanak-kanak di Gresik. Kondisi tersebut yang menyebabkan Lasinem tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Kakak laki-laki Lasinem berharap ia dapat melanjutkan sekolah menjahit karena keterampilan ini dibutuhkan di desa.

“Iya, jadi nggak boleh kalau nggak jahit nggak usah sekolah. Jadi SMA nggak sekolah.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)

Lasinem menikah dengan laki-laki satu desa dan saat ini mempunyai tiga anak, yang terdiri dari anak kembar perempuan dan satu anak laki-laki. Setelah menikah, Lasinem menjadi ibu rumah tangga dan tidak bergabung dengan organisasi apapun di level desa. Lasinem berpandangan bahwa pernikahan memberi batas antara kehidupan luar dan di dalam rumah. Urusan domestik menjadi ranah perempuan sedangkan urusan di luar rumah menjadi bagian laki-laki.

“Bisa dibilang saya itu ibu rumah tangga tulen dan memang dulu saya bertanggung jawab kalau perempuan sudah berumah tangga yang namanya urusan di luar rumah tangga itu sudah terputus. Kayak seakan-akan itu hidup seorang perempuan itu ya cuman di lingkup rumah tangga saja. Kayak misalnya ya itulah Mbak, di kasur, di sumur, di dapur ya semacam itu. Terus kalau kita mau berbuat baik atau amal atau apa itu ya kita limpahkan sama suami. Bakti kita sama suami.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)

Pada tahun 2013, staf Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) berkunjung ke rumah Lasinem dan memintanya hadir pada pertemuan pertama Sekolah Perempuan yang akan dilaksanakan di Balai Desa. Awalnya, ia berpikir akan mendapatkan bantuan di acara tersebut karena ia belum pernah diundang ke pertemuan organisasi di Balai Desa.

“Ah makanya pertama ikut Sekolah Perempuan itu, saya pikir saya mau dapat bantuan. Biasanya saya keluar ke Balai Desa itu biasanya kan dapat bantuan. Dulu saya pikir juga begitu. Oh berarti saya pulang nanti bawa sembako, atau berbentuk uang tunai, itu saya semangat, Mbak.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)

Pertemuan pertama Sekolah Perempuan tersebut dihadiri oleh puluhan perempuan miskin di desa, termasuk Lasinem. Setelah pertemuan, Lasinem bertanya-tanya tentang materi yang diberikan tentang masalah perempuan, dan perbedaan antara yang dibahas dan kenyataan yang dialaminya.

“Jadi kalau ada kegiatan Sekolah Perempuan itu, karena saya itu penasaran. Kok pertemuan kayak gitu. Tapi saya juga penasaran, saya ikut aja, Mbak. Mungkin nanti ada manfaatnya ... Bahkan saya tuh bersyukur dengan kejadian itu Mbak. Ternyata Tuhan kasih kesempatan saya untuk meskipun bukan

¹ **Penulis:** Galih Prabaningrum dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

sekolah formal Sekolah Perempuan ya Mbak, tapi saya bersyukur bisa ikut di Sekolah Perempuan ini.”
(Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)

Pada tahun 2014, seorang teman sesama perempuan yang telah lebih aktif dalam mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan mengajak Lasinem untuk mengikuti sebuah aksi tentang keberagaman di Surabaya. Karena penasaran, untuk pertama kalinya, ia ikut *longmarch* dengan perempuan lainnya untuk menyuarakan pentingnya menghargai perbedaan, mengingat keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, seperti ras, agama, suku bangsa dan lain sebagainya. Sebenarnya ia merasa kurang nyaman dan malu mengikuti aksi tersebut karena masih menganggap bahwa “aksi” selalu sama dengan demonstrasi, yang dalam persepsinya selalu berakhir dengan ricuh. Pada saat itu, Lasinem menganggap bahwa Sekolah Perempuan mengajarkan untuk berdemonstrasi.

Masih dalam tahun 2014, Sekolah Perempuan mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Perlindungan Sosial Tahap 1 di Prigen, Jawa Timur. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama empat hari dan menginap di hotel. Lasinem memutuskan untuk tidak ikut karena ia menganggap kegiatan di hotel identik dengan hal-hal yang kurang baik dalam norma sosial.

“Saya nggak ikut Mbak untuk kepemimpinan perempuan tahap pertama itu, karena saya kan masih bingung. Kok diajak ke hotel? Pikiran saya kan aneh-aneh. Ngapain ke hotel? Pelatihan apa ke hotel itu? Terus kata suami saya, saya izin sama suami saya, kata suami saya gini, nggak usah ikut dulu. Kamu lihat aja nanti. Nek koncomu itu nggak diapa-apain. Gitu, saya lihat contohnya dulu. Saya nggak boleh ikut, jadi saya tahap pertama nggak ikut.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)

Setelah pelatihan, Sekolah Perempuan menyelenggarakan sosialisasi hasil pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat. Lasinem ikut hadir dalam pertemuan tersebut, ia menyaksikan teman-temannya yang ikut pelatihan terlihat senang. Lasinem pun mengajukan beberapa pertanyaan tentang kegiatan di Prigen. Respon mereka hampir sama, mereka menjawab bahwa pelatihan di Prigen mirip dengan pendidikan di sekolah pada umumnya. Lasinem merasa terganggu dengan pengalaman teman-temannya, dan membulatkan tekad untuk mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan selanjutnya.

Pada tahun 2015, Lasinem mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Perlindungan Sosial Tahap 2 di Surabaya. Materi yang diberikan pada saat itu tentang konsep seks dan gender. Ada pertentangan dalam diri Lasinem ketika menerima pengetahuan baru tersebut. Sejak kecil, orang tua dan lingkungan sosialnya mengajarkan Lasinem untuk tidak boleh berani pada suami dan selalu patuh terhadap suami, sedangkan materi yang disampaikan pada pelatihan berbeda. Perlahan, ia menyadari bahwa sebenarnya perempuan memang melakukan pekerjaan rumah yang lebih berat dari laki-laki, jadi tidak masalah jika tugas tersebut dibagi dengan suami.

“Terus ternyata, selama ini, saya itu tidak tahu hak saya itu sebenarnya. Saya itu tidak tahu. Terus yang masalah pekerjaan rumah tangga itu, ya. Iya ya, memangnya kenapa kalau suami saya nyapu? Masak kenapa? Toh, sapu itu nggak ada jenis kelaminnya. Misalkan suami saya pegang sapu, apakah sapu itu bisa hamil? Apakah ada vaginanya? Saya seperti itu. Ya padahal kalau dipikir itu memang benar, pekerjaan perempuan itu lebih banyak dari pada laki-laki. Lebih mengurus tenaga, waktu.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)

Berkat kemampuan Lasinem dalam bernegosiasi, suaminya yang dahulu tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah saat ini sudah mau membantu dan menggantikannya. Lasinem juga mengalami perubahan dalam mendidik anaknya, yang semula berorientasi pada hasil atau nilai yang bagus berubah dengan mengedepankan komunikasi yang aktif kepada anaknya. Sebelum mengikuti Sekolah Perempuan, Lasinem menganggap bahwa anak perempuannya harus pintar masak, pintar dandan, maupun pintar bersih-bersih, sehingga menyebabkan Lasinem mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anaknya. Saat ini Lasinem lebih terbuka untuk berdiskusi kepada anaknya tentang apa yang dirasakan.

Selain menambah pengetahuan, Lasinem mengakui bahwa pelatihan yang ia ikuti merangsang kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Selama ini, Lasinem tidak pernah berbicara di depan umum maupun di dalam forum. Selama bergabung dengan Sekolah Perempuan, Lasinem digenjut untuk berani bersuara dan beropini di depan umum. Alhasil, Lasinem tidak takut lagi berbicara dan mengajukan usulan, bahkan di forum-forum besar seperti dalam pertemuan desa.

Wawasan yang ia dapatkan dari pelatihan Sekolah Perempuan benar-benar telah menggugah sisi kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan perempuan. Ada sebuah beban yang ia rasakan setelah pelatihan, tentang beratnya hidup yang dijalankan banyak perempuan. Ia merasa lebih memahami perasaan-perasaan perempuan yang mengalami segala permasalahan kehidupan, soal kesenjangan hak sosial, kekerasan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Sebelum disadarkan Sekolah Perempuan, Lasinem termasuk orang yang sering menyalahkan perempuan. Dalam kasus poligami, misalnya, Lasinem pernah beranggapan bahwa hanya perempuan yang kurang pandai melayani suaminya yang dimadu. Ia juga sempat menyalahkan perempuan-perempuan yang dilecehkan secara seksual karena dianggap sering berpakaian tidak sopan.

“Sama seperti ada yang dengar kok saya apa itu Mbak, kalau dulu itu saya iya saya menyalahkan perempuannya Mbak. Kenapa pakai rok mini, kenapa tidak pakai jilbab, kan emang mengundang syahwatnya laki-laki. Tapi ternyata toh, banyak kejadian yang nenek-nenek tua loh diperkosa. Itu apa ya salah neneknya? Terus yang perkosa loh siapa. Kayak sekarang itu masalah cukup banyak ya Mbak ya.” (Lasinem, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)

Pikiran dan pandangan Lasinem semakin terbuka dan empatinya terhadap sesama perempuan semakin tinggi. Lasinem berusaha untuk membagikan pengetahuan yang didapatkannya kepada tetangga sekitar. Biasanya, perempuan-perempuan di sekitar rumah Lasinem berkumpul untuk bergosip belaka. Sejak Lasinem bergabung dengan Sekolah Perempuan, topik pembicaraan mulai bergeser ke arah yang lebih serius dan penting, persoalan perempuan. Mereka saling berbagi soal masalah rumah tangga, tentang hak-hak seorang istri hingga masalah kekerasan dan kesehatan perempuan. Meskipun beberapa orang masih berpandangan bahwa Sekolah Perempuan mengajarkan untuk berani terhadap suami, Lasinem terus berbagi kepada sekelilingnya. Dedikasi dan ketekunan yang ditunjukkan Lasinem dalam memperjuangkan hak-hak perempuan membuat ia terpilih menjadi koordinator Sekolah Perempuan di desanya. Ia juga diakui oleh banyak anggotanya sebagai seorang pemimpin Sekolah Perempuan yang berpengaruh di desa.

Sebagai Koordinator Divisi Pendidikan Sekolah Perempuan, Lasinem mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum desa. Meskipun sudah banyak perempuan yang terlibat dalam Musrenbangdes, namun pemerintahan desa masih menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai bidang yang tidak diprioritaskan. Pembangunan yang mereka rencanakan masih berorientasi pada infrastruktur.

Lasinem juga berpikir bahwa perempuan masih belum mendapatkan keadilan soal pendidikan, mereka masih dipinggirkan secara kultural. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan lebih penting bagi laki-laki karena mereka akan menjadi kepala rumah tangga dan mencari nafkah, dan sebaliknya untuk perempuan. Dalam segi kesehatan, ia berpandangan bahwa masih banyak perempuan yang menyepelkan soal kesehatan reproduksi dan penyakit-penyakit lainnya. Ia sering menasihati perempuan-perempuan di lingkungannya untuk lebih mencintai diri mereka sendiri dengan menjaga kesehatan. Lasinem juga berharap adanya upaya pencegahan pernikahan anak bagi perempuan, karena umumnya merugikan dan menyengsarakan kehidupan perempuan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Lasinem sangat berharap bahwa seluruh perempuan di desanya juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan dirinya untuk mendapatkan pengetahuan melalui Sekolah Perempuan.

Lastri

Koordinator Sekolah Perempuan Level Kabupaten Gresik, Jawa Timur¹

Lastri, 30 tahun, merupakan Koordinator Sekolah Perempuan tingkat Kabupaten Gresik. Dia terlahir dalam keluarga miskin dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Lastri menikah dengan laki-laki desa tetangga, dan saat ini mereka telah mempunyai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.

Ia menamatkan pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), seperti banyak teman sebayanya. Sejak lulus Sekolah Dasar (SD), orang tuanya bahkan melarang Lastri untuk melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi. Lastri berasal dari keluarga buruh tani dan dengan pendapatan yang rendah keluarganya susah membiayai kehidupan sehari-hari, apalagi untuk pendidikan. Kondisi yang sama juga dialami oleh kedua kakaknya. Kakak pertama Lastri merupakan lulusan SD sedangkan kakak keduanya lulus SMP. Lastri pun bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP berkat usahanya dalam mencari dan menemukan sekolah yang menyediakan beasiswa. Mimpinya pupus ketika ia tidak bisa lanjut ke bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) karena alasan ekonomi.

“Saya mulai dari SMP itu kan saya sudah ingin sekolah. Tapi orang tua kan melarang. Awalnya sih sudah mulai lulus SD itu saya sudah nggak boleh sekolah, Mbak. Karena orang tua saya nggak mau membiayai saya. Tapi saya nekat ingin sekolah SMP itu saya mencari sekolah sendiri yang ada beasiswanya, gitu lho. Akhirnya untuk yang SMA itu, itu karena kepikiran saya dulu itu kalau sekolah SMA itu kan biayanya semakin besar, jatuhnya itu khawatirnya orang tua bener-bener nggak mampu. Jadi saya kerja saja, gitu.” (Lastri, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)

Pada tahun 2004, pada usia 15 tahun, Lastri memutuskan untuk mencari pekerjaan untuk membantu keuangan keluarga. Ia bekerja sebagai buruh borongan di pabrik roti dengan pendapatan harian tidak tetap, berdasarkan banyaknya roti yang diselesaikan. Setiap harinya Lastri dapat membawa pulang antara Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000. Lastri sempat berhenti karena jam kerja yang terlalu panjang, dari pagi sampai jam sembilan malam, namun kembali ke perusahaan semula. Di pabrik ini, pada tahun 2008, Lastri bertemu dengan laki-laki yang menjadi suaminya.

Ketika pabrik tempatnya bekerja terbakar, Lastri harus dipindahtugaskan ke bagian lain. Akibatnya, Lastri harus memulai dari awal sebagai buruh borongan, bukan lagi buruh harian. Lastri tidak terima karena proses pemindahan ini dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Lastri sempat menemui manajemen pabrik untuk menyampaikan keberatannya, tetapi pihak pengelola mementahkannya. Pada akhirnya Lastri memutuskan untuk keluar pada tahun 2013 dan menjadi buruh angkut sayur di pasar.

Pada tahun yang sama, Lastri telah bergabung dengan Sekolah Perempuan, yang diawali dengan adanya Staf Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) yang berkunjung ke rumah dan mengundangnya untuk menghadiri pertemuan pertama Sekolah Perempuan. Undangan tersebut tentu saja membingungkan Lastri yang belum pernah diundang untuk menghadiri pertemuan di kantor desa. Selama ini,

¹ **Penulis:** Galih Prabaningrum dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

Lastrı mendatangi kantor desa hanya untuk mendapatkan bantuan maupun memberikan suara pada saat Pemilu atau Pemilihan Kepala Desa.

Awalnya, teman-teman sesama buruh Lastrı menyarankan untuk tidak hadir, tapi setelah diajak staf KPS2K mendatangi rumahnya dan menelepon setelahnya, Lastrı akhirnya memutuskan untuk hadir karena ingin tahu lebih lanjut tentang seluk-beluk kegiatan tersebut.

“Kemudian saya juga, bukan hanya pendapat suami, saya juga itu, kan galau ya, bahasanya sekarang kan galau, ya. Saya itu sampai minta pendapat teman saya yang di pabrik. Saya itu diajak orang datang ke rumah, saya diajak ngumpul ke Balai Desa, kemudian itu gimana, ya. Saya ikut atau tidak? ... ‘Nggak usah melok ngunu [ikut begitu], Las. Sampean itu digowo mata-mata [kamu itu dibawa mata-mata]. Nggak usah melok, yo? [Nggak usah ikut, ya?]’. Akhirnya saya putuskan nggak ikut. Terus ditelepon terus kan sama KPS2K, ikut nggak? Ikut nggak? Weslah [sudahlah], dari hati saya sendiri, ikut aja. Nanti ngapain sih di sana, nanti dilihat aja di pertemuan ini.” (Lastrı, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)

Selepas pertemuan, Lastrı menceritakan kepada suami bahwa Sekolah Perempuan akan dibentuk. Suami Lastrı, dan juga orang tuanya, tidak memberikan izin sama sekali untuk Lastrı untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Mereka berpendapat bahwa Sekolah Perempuan tidak akan menghasilkan uang. Pendebatan di dada Lastrı semakin berkelebat, walaupun dilarang, ia merasa bahwa selama ini ia belum pernah berorganisasi dan juga tidak sempat melanjutkan mimpinya untuk bersekolah.

“Kendalanya yang pertama ya itu Mbak, pada diri saya sendiri. Bagaimana mengambil keputusan dengan tentangan dari keluarga dan dari suami, kan terus dilarang terus kan. Itu bagaimana saya bisa tetap melanjutkan ikut sekolah. Itu saya meyakinkan hati saya itu sangat lama Mbak, misalkan antara ikut atau tidak ... Tidak melanjutkan SMA. Nah kebetulan di Sekolah Perempuan itu saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Karena pikiran saya itu Sekolah Perempuan ada sama dengan sekolah SMA, gitu lho. Jadi saya itu apa ya, punya keinginan untuk belajar gitu lho, Mbak, sebenarnya masihan.” (Lastrı, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)

Tidak banyak waktu yang dimiliki Lastrı untuk mengikuti Sekolah Perempuan karena dia harus bekerja sebagai buruh di pasar. Walaupun demikian, Lastrı sempat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Perlindungan Sosial tahap 1 pada 2014. Pada saat pelatihan, Lastrı mendapatkan materi tentang kesetaraan gender, khususnya materi tentang hak-hak perempuan dalam keluarga.

“Sebenarnya perempuan itu punya hak untuk mengambil keputusan, untuk mana yang salah mana yang benar, misalnya dalam lingkungan keluarga. Kemudian kita itu perlindungan sosial itu punya hak untuk memperjuangkannya, begitu. Sampai rumah, akhirnya saya terapkan.” (Lastrı, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)

Suaminya merasa berang ketika Lastrı menjelaskan apa yang ia dapatkan dalam pelatihan, dan meminta Lastrı memilih antara sekolah atau suami dan keluarga. Lastrı memilih keduanya, baginya ini adalah kesempatan yang berharga untuk membuktikan kekuatan perempuan. Seringkali, Lastrı diberikan tugas tambahan oleh suaminya ketika ia meminta izin akan berkegiatan, seperti mencari makanan ternak, membersihkan kandang, hingga memandikan ternak. Terkadang, Lastrı juga harus menerima jika suami memarahinya ketika dari kegiatan Sekolah Perempuan. Bukannya merasa lemah, malahan Lastrı menjadikan hal tersebut sebagai strategi untuk bernegosiasi dengan suami untuk terus mengikuti Sekolah Perempuan. Ketika ia sudah

menyelesaikan seluruh pekerjaan maka sudah tidak ada alasan lagi bagi suaminya untuk melarang Lastri berkegiatan.

Lastri merasa beruntung memiliki teman-teman Sekolah Perempuan yang mendukung, mereka memaklumi setiap kali Lastri datang terlambat ke acara-acara organisasi. Tak jarang pula, teman-temannya rela menunda kegiatan dan memilih menunggu Lastri menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Sekolah Perempuan semakin mempererat hubungan Lastri dengan teman-temannya, dengan kompak perempuan-perempuan tersebut saling berbagi susah dan senang, masalah satu orang bisa menjadi masalah bersama.

Semenjak ikut pelatihan dan rutin beraktivitas di Sekolah Perempuan, Lastri merasa bahwa kemampuannya dalam memahami keadilan gender dan berstrategi meningkat. Lastri juga semakin memahami cara bernegosiasi yang baik dengan suami setelah saling berbagi dan membangun kesadaran kritis dengan teman-temannya di Sekolah Perempuan.

“Kayak misalkan marah nggak seperti dulu, marah ya marah. Kan saya sekarang juga bernegosiasi, kalau dulu suami marah-marah saya ikut marah-marah, akhirnya bertengkar. Sekarang kalau suami marah-marah, aku biarkan dulu Mbak, kalau hatinya sudah dingin, baru kujelaskan.” (Lastri, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)

Lambat laun suaminya sudah bersedia untuk membantu pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu rumah maupun mencuci piring. Lebih penting lagi, dia mulai menyadari kemampuan dan kekuatan istrinya sendiri.

Semakin hari Lastri tambah peka soal-soal keperempuanan, ia ingin bergerak lebih jauh dengan membagikan pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh kepada perempuan lain di sekitar rumahnya. Dalam banyak kesempatan, Lastri selalu mengajak perempuan-perempuan di desanya untuk mengikuti Sekolah Perempuan. Awalnya banyak perempuan desa yang melabeli Sekolah Perempuan sebagai organisasi yang tidak benar karena mengajarkan perempuan untuk sering keluar rumah dan melawan suami, mereka bahkan dituduh sebagai “mata-mata kabupaten”. Lastri dan teman-teman Sekolah Perempuan berusaha menepis tuduhan itu dengan pembuktian-pembuktian yang nyata, seperti menjalin kerja sama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) dan membantu masyarakat mengurus BPJS, KIS (Kartu Indonesia Sehat), maupun berbagai pelayanan sosial lainnya.

Pada tahun 2015, Lastri diberi kesempatan oleh KPS2K untuk mewakili Sekolah Perempuan dalam pelatihan di Jakarta. Sebelum berangkat, Lastri mengira hamil setelah melakukan tes kehamilan dengan *testpack* dan mengalami pendarahan, tapi ia tetap berangkat. Saat di Jakarta, Lastri harus dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan dengan biaya rumah sakit ditanggung oleh penyelenggara. Pada tahun yang sama, Lastri divonis menderita kanker serviks. Walaupun gejala sudah dirasakan Lastri sejak masih bekerja di pabrik, seperti keputihan dan gatal yang terus-menerus, ia tidak pernah memeriksakan diri. Upaya penyembuhan yang dilakukan Lastri sebelumnya, juga atas saran dari suaminya, menggunakan cara tradisional seperti minum jamu kapur sirih. Melalui Sekolah Perempuan, Lastri lebih paham tentang hak-hak kesehatan perempuan dan seluk beluk penyakit yang sering dihadapi para perempuan. Dia juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (PBI-KIS). Dengan kartu tersebut, Lastri bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis di RSUD yang bermitra dengan Sekolah Perempuan. Setelah diperiksa, dia baru tahu bahwa dirinya menderita kanker serviks.

Lastri mendapatkan pemeriksaan berkat jaringan yang dimiliki karena ia dan teman-temannya membantu masyarakat untuk mengurus BPJS, KIS, dan sebagainya. Meskipun, sikap suami Lastri mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan belum berubah, Lastri sudah mampu memperjuangkan haknya sendiri.

“Nah terus akhirnya yang kedua itu, itu kan saya awalnya juga terdeteksi kanker serviks kan mbak, keputihan. Itu suami saya juga masih marah-marah. Saya disuruh jamu suruh gitu aja. Nggak boleh ke rumah sakit. Tapi saya berangkat sendiri dulu sama Mbak Indah [Leader Sekolah Perempuan] sama Mbak Nurul [Leader Sekolah Perempuan] yang bagian lapangan. Akhirnya kan untuk, terapi itu kan butuh tanda tangan suami, itu kan dia harus nggak kerja, itu saya dimarahi Mbak dari rumah sakit sampai rumah itu dimarahin terus. Saya nggak butuh tanda tanganmu [suami], saya nggak ngajak, saya bilang gitu mbak. Akhirnya yang kedua untuk kontrol itu saya berangkat sendiri, naik angkot.” (Lastri, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)

Berdasarkan pengalamannya tersebut, Lastri bersama Sekolah Perempuan menginisiasi kegiatan pemeriksaan IVA bagi masyarakat sebagai bentuk deteksi dini kanker serviks dan penyakit vital lainnya yang sering menjadi masalah utama perempuan di desanya. Banyak perempuan yang awalnya tidak mau memeriksakan diri karena merasa bahwa penyakit organ reproduksi adalah hal tabu dan tidak perlu diketahui orang lain. Melalui pemeriksaan gratis yang dilakukan sebanyak tiga kali, secara berturut-turut, pada tahun 2015, 2016 dan 2017, dan sosialisasi, membuat para perempuan semakin berani untuk ikut berpartisipasi. Kegiatan ini merupakan perwujudan kerja sama yang dilakukan Sekolah Perempuan dengan Rumah Sakit Ibnu Sina, Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik dan instansi lainnya. Kegiatan tersebut menjadi titik balik bagi perempuan di desanya untuk lebih memperhatikan kesehatan sebagai bagian dari perjuangan hak-hak perempuan.

Satu hal penting yang Lastri rasakan setelah berkecimpung dalam dunia organisasi keperempuanan adalah soal kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Dia mengaku merasa gugup dan cemas jika harus berpendapat dalam sebuah forum, tapi lambat laun semakin percaya diri sampai menjadi pembicara di acara tingkat nasional.

“Pada saat diundang, ya udah kan ngumpul satu desa ngumpul di balai desa. Nah disuruh memperkenalkan diri, nah orang-orang yang nggak tau biasanya di rumah, disuruh memperkenalkan diri aja sudah gemetar kayak ketakutan gitu Mbak.” (Lastri, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)

Kesungguhan Lastri dalam menyerap semua wawasan yang diberikan Sekolah Perempuan membuahkan hasil, ia semakin berani untuk bersuara dalam banyak kesempatan di level desa, kecamatan, hingga kabupaten. Berkat usahanya, ia bahkan berhasil mengadvokasi Sekolah Perempuan agar diikutsertakan dalam forum Musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), sehingga mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 10.000.000 per tahun. Saat ini, Lastri bahkan dipercayai untuk menjadi Koordinator Sekolah Perempuan tingkat kabupaten. Lastri berharap agar ia selalu bisa melanjutkan komitmennya bagi perempuan lain, terutama mereka yang miskin, dengan selalu mewakili mereka untuk mendapatkan hak-hak dan kesetaraan.

Hj. Aminah

Ketua Serikat Pekka Desa dan Kelompok Papadaan Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan¹

Hj. Aminah yang kini berusia 51 tahun menjadi salah satu perempuan yang sangat berpengaruh di desanya di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di desa asalnya ini, Aminah menjabat sebagai Ketua Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Pekka). Sebagai ketua serikat, ia memiliki berbagai tugas, di antaranya memimpin rapat, mengadakan kegiatan, mengumpulkan laporan kegiatan kelompok, dan mengirim laporan ke Yayasan PEKKA.

Aminah yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama juga berhasil menduduki jabatan penting di tingkat desa, yaitu sebagai ketua Kelompok Tani, bendahara Kelompok Perikanan, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di tingkat kabupaten, Aminah menjadi Ketua Serikat Pekka sejak tahun 2018 melalui pemilihan.

Orang tua Aminah bekerja sebagai petani dan sama-sama aktif di kegiatan masyarakat setempat. Bapaknya pernah menjadi bendahara masjid desa, sedangkan ibunya pernah menjadi bendahara Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK²). Awalnya, mereka tidak memiliki tanah sendiri, sehingga harus menyewa tanah dengan sistem bagi hasil. Setelah bertahun-tahun menggarap tanah, mereka pelan-pelan mampu membeli tanah. Tanah ini diwariskan kepada anak-anaknya, termasuk Aminah, dengan luas berkisar 1 hektar.

Aminah menikah pada tahun 1982 dan mempunyai tiga anak. Setelah menikah, suami Aminah pergi bekerja ke Arab Saudi sebagai pedagang jilbab dengan menggunakan visa turis. Dengan bantuan keluarga yang berada di Saudi, suaminya dapat tinggal di sana. Pada tahun 1985, Aminah menyusul suaminya setelah mendapatkan uang yang dikirimnya. Di Saudi, Aminah turut membantu suaminya berjualan jilbab di pinggir jalan. Orang tua Aminah dan mertuanya juga turut bekerja di Arab Saudi. Pernah suatu kali ia pergi berjualan, polisi Saudi sedang melakukan razia visa. Aminah hampir tertangkap, tetapi ia berhasil lari dan meninggalkan barang dagangannya.

“Terus aku jualan, bawa kantong dua buat barang dagangan. Terus katanya temenku, ‘eh kamu jangan ke sana, ada [petugas] baladiyah’, baladiyah itu razia. Terus teman-temanku pada lari ke gedungnya masing-masing. Aku masih tinggal, nggak ikut lari. Terus mereka datang. Katanya itu, ‘kamu kami tangkap’. Aku ini takut. Terus aku bilang ‘aku miskin dan anak aku masih kecil’. Kata mereka ‘kami tidak peduli sama kamu, kamu mesti ditangkap’. Terus saya ditangkap. Tapi aku lepas barang ini tadi, lari. Dikejar, tapi dia larinya nggak seberapa cepat, aku cepat-cepat terus naik ke gedung. Nah itulah masalahnya.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Setelah 4,5 tahun bekerja di Arab Saudi, Aminah dan suaminya pulang ke Indonesia dan kembali menggarap sawah. Tidak banyak modal yang berhasil mereka kumpulkan di Saudi. Mereka hanya mampu membeli sepeda motor dan membayar buruh untuk menggarap sawah. Bertahun-tahun mereka hidup sederhana mengelola sawah milik orang tua Aminah. Ketika suaminya meninggal pada tahun 2007, Aminah mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan tempat untuk berbagi. Ketika itu, anak bungsunya masih duduk di kelas 6 Madrasah

¹ **Penulis:** Devy Dhian Cahyati dan Anastasia Imelda Cahyaningrum. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

² Ketika PKK masih dinamai “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga”.

Ibtidaiyah dan anak keduanya masih duduk di bangku kuliah. Meskipun kesusahan ekonomi, dia tetap bertahan dan mengutamakan pendidikan anak-anaknya.

“Sering banget aku itu menangis, menangis itu tidak kedengaran orang. Aku sedih; ya Allah. Cuma kita menangis itu waktu sholat. Minta dipeliharakan, minta sehatkan badan, itu saja. Minta rizki yang halal. Anak aku yang sekolah kelas 6 madrasah, terus bagaimana aku yakin bahwa Allah Maha Pemberi. Akhirnya bisa menyekolahkan anak. Kan cita-cita aku ini pendidikan anak lebih tinggi dari kedua orang tua.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Pernah suatu kali ia tidak memiliki uang untuk ongkos sekolah anaknya. Namun, di tengah kebingungannya, seseorang memberikan zakat padanya sebesar Rp. 20.000. Aminah menggunakan uang itu dengan hemat. Lagipula, ketika kemudian mendapatkan keuntungan panen, ia terus menabung untuk membeli sawah. Aminah membeli sawah seluas 12 burung (seperempat hektar), dan pada 2017 membeli tanah lagi seluas 4,5 burung senilai Rp. 39 juta. Oleh karena gaya hidup Aminah yang sangat hemat dan mendahulukan menabung, dia mampu membeli tanah dan membiayai anak. Anak pertama sedang berdagang di kabupaten Barabai setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama, yang kedua menjabat sebagai Kaur Keuangan di desa, dan yang ketiga kini melanjutkan pendidikan di jejang perguruan tinggi di Banjarmasin.

Pada tahun 2011, Aminah mulai aktif di Serikat Pekka. Awalnya, dia diajak sepupunya dan istri Kepala Desa untuk mengikuti sosialisasi dari Yayasan PEKKA. Aminah dinilai sebagai kandidat Pekka yang cocok karena dia merupakan kepala keluarga dan telah menduduki jabatan sebagai bendahara Posyandu dan bendahara PKK. Sebelum 2011, PEKKA tidak langsung diterima oleh masyarakat, termasuk ketika akan mengikuti rapat desa. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Aminah:

“Perempuan dulu tidak aktif, tidak dilibatkan. Malah kita diusir; ih ngapain perempuan di sini, pulang aja. Nah begitu.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Aminah memiliki peran yang besar dalam membesarkan kelompok Pekka di desanya. Ia menjadi ketua kelompok perempuan sejak kelompok ini terbentuk. Kemampuannya menulis dan berhitung menjadi pertimbangan utama bagi anggota lain untuk memilihnya. Apalagi, anggota kelompoknya yang sebagian besar telah berusia lanjut merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi. Ia juga memiliki kemampuan persuasi yang baik untuk mengajak orang bergabung di dalam kelompok. Meskipun dia memiliki watak yang sangat cocok sebagai pemimpin, Aminah mengaku bahwa dia merasa terkejut ketika dipilih sebagai ketua:

“Waktu dipilih aku kaget, padahal aku ini masih banyak belajar, bukannya ketuanya yang paling bisa. Padahal yang paling banyak belajar. Nggak tahu kenapa aku yang dipilih.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Aminah bersama dengan anggota yang lain berusaha meyakinkan perempuan lain bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dengan bergabung dengan kelompok, misalnya bisa mengikuti kegiatan simpan pinjam maupun pelatihan. Dalam upaya mengajak perempuan untuk bergabung dengan kelompok Pekka, tidak jarang ia mendapatkan cemoohan dari perempuan lain. Selain itu, Aminah bersama dengan wakilnya juga harus mengeluarkan uang untuk menyediakan makanan setiap pertemuan kelompok. Hal ini karena masih banyaknya anggota kelompok yang mengharapkan keuntungan material maupun makanan ketika bergabung dengan kelompok.

“Yang caci maki, susah mengumpulkan orang-orang, ada kalau kita mau mengasih tahu orang kita mau kumpulan ada makanannya, ada kah uangnya? Dia ke bilang masyarakat, hampir setiap kali pertemuan

aku itu menjamu sama istrinya Kepala Desa.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Pada masa kepemimpinan Kepala Desa Pak Ahmad, pemerintah desa memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Misalnya, Kepala Desa mengajak warga untuk ikut bergabung dalam kelompok Pekka dan membeli kendang untuk ibu-ibu Pekka. Awalnya, perempuan belum diundang ke rapat-rapat, perempuan Pekka tetap datang dalam rapat, meski belum berani menyampaikan pendapat.

“Pada awalnya kita malu, kita itu kan tidak diundang, tapi akhirnya setiap kali ada rapat desa terutama musrenbang kita pasti datang. Kadang itu kita kan ada laki-laki yang lewat; eh kamu mau ke mana? Katanya rapat. Rapat apa? Rapat desa, ngumpul di sana. Aku ambil kerudung terus ke sana, ngajak ibu-ibu yang lain.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Pada tahun 2015, Aminah mengikuti pelatihan tentang kepemimpinan di Jakarta selama enam hari yang diselenggarakan oleh Yayasan PEKKA. Aminah merupakan perwakilan perempuan satu-satunya yang berasal dari desa ini. Dari pelatihan ini, Aminah mendapatkan banyak sekali manfaat, di antaranya dapat menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah jejaring pertemanan. Setelah mengikuti pelatihan, ia menyampaikan hasil pelatihan dalam rapat serikat.

Sebagai Ketua Pekka, Aminah mengalami beragam tantangan. Awalnya, Aminah merasa ketakutan dan tidak percaya diri saat berhadapan dengan Dinas. Karena sudah terbiasa mengikuti pendamping lapangan bertemu staf Dinas, maka ia pun perlahan mulai berani. Selama kepemimpinan Pekka Aminah, ada satu kejadian yang membuat hatinya merasa campur aduk. Salah satu anggota menyebut sisa hasil usaha koperasi merupakan sesuatu yang haram ketika perkumpulan kelompok sedang berlangsung. Atas tuduhan tersebut, Aminah menjelaskan bagaimana mekanisme kerja koperasi dan keuntungan yang didapatkan lalu dibagikan oleh anggota.

“Ada salah satu anggota aku yang bilang haram. Terus aku berdebar-debar dada. Kaget, ada yang bilang haram. Padahal kita itu berusaha mencari yang halal. Tau-tau ada temannya yang bilang itu haram, kan kita panas lah.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Tantangan lain yang dirasakan ketika menjadi anggota Pekka yaitu ditolaknya usulan-usulan yang diajukan oleh perempuan ke pemerintah desa. Anggota Pekka pernah mengusulkan dalam rapat desa untuk membangun Center Pekka. Namun, usulan ini ditolak karena masyarakat menganggap bahwa kebutuhan untuk membangun jalan lebih penting. Berikutnya, Serikat Pekka melalui Aminah mengusulkan adanya pembelian lemari dan komputer untuk Pekka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sekali lagi usulan mereka juga ditolak karena seharusnya ada kantor Pekka dulu sebelum membeli barang di dalamnya.

Meskipun mendapatkan berbagai tantangan, Aminah menyebutkan bahwa Kelompok Pekka seperti anak, sehingga dia tidak bisa meninggalkan kelompoknya. Padahal, kedua adiknya telah mengajak Aminah untuk tinggal di kecamatan lain yang jaraknya sekitar sejam dari desa.

“Betah, seperti kayak anak. Perasaan kayak anak. Kan kita, sodara aku mengajak ke sana, aku bilang; kalau misalnya aku tidak ke Barabai, aku masih sayang sama anggota-anggota. Aku sayangnya itu ada kelompok Pekka, jadi aku sayang meninggalkan. Adikku inginnya aku pindah ke Barabai, katanya jangan ke sawah lagi.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Aminah menjadi tokoh sentral bagi terbentuknya BUMDes dengan dukungan dari Kepala Desa. Bentuk dukungan ini ditunjukkan dengan diajaknya Aminah untuk mengikuti pelatihan BUMDes di Jakarta dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Kita diundang ke Jakarta, ada pelatihan, ada kita mendengar BUMDes, jadi ada Perdesnya. Jadi waktu kita pelatihan di kabupaten, waktu hari kedua hari terakhir... Jadi di situ aku ke depan, aku bilang; gimana Bu, BUMDes di desa kami terbentuk BUMDes, misalnya kami mau peraturan desa.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Setelah mendapatkan pengetahuan tentang BUMDes, Aminah bersama dengan anggota Pekka mendorong pemerintah desa untuk mengeluarkan Peraturan Desa terkait dengan BUMDes perikanan dan peternakan. Perdes ini disusun melalui rapat desa yang melibatkan anggota Pekka, Ketua RT, Badan Permusyawaratan Desa, dan aparat desa di bawah kepemimpinan Aminah.

“Dibentuk dulu kelompok katanya. Jadi sudah dibentuk kelompok, terus sama Kepala Desa membuatnya Perdes tadi ... 100 persen dari Kelompok Pekka orang-orangnya.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Keaktifan Aminah di masyarakat desa terlihat dari perannya dalam pelbagai organisasi. Pada saat yang sama dengan kepemimpinan Pekka dan keterlibatan dalam pembentukan BUMDes, dia juga menduduki jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani, kader Posyandu, Ketua BUMDes, dan Bendahara Kelompok Perikanan yang dibentuk oleh Petugas Penyuluh Lapangan Dinas Perikanan. Sampai saat ini, kelompok perikanan memiliki kegiatan simpan pinjam. Target kelompok perikanan untuk mengembangkan usaha perikanan sungai sejalan dengan tujuan BUMDes untuk membangun perekonomian desa di bidang perikanan.

Di bidang keagamaan, Aminah juga berperan besar dalam mengembangkan majelis taklim di tingkat desa. Ia mewakafkan rumah peninggalan orang tuanya untuk kegiatan majelis taklim. Selain itu, ia juga aktif memimpin doa selama kegiatan pengajian berlangsung secara bergiliran dengan anggota majelis taklim lainnya. Sedangkan, di bidang kesenian, Aminah juga berperan sebagai penabuh gendang dalam kelompok *madihin* (kesenian tradisional Banjar) bersama dengan anggota kelompok Pekka lain. Kelompok ini telah berkiprah hingga level kecamatan, kabupaten, dan nasional. Setelah usulan kelompok *madihin* Aminah diterima dalam Musrenbangdes 2017, mereka berhasil mendapatkan dana dari APBDes untuk memperbaiki alat musik mereka dan merasa lebih bangga tampil di acara-acara.

“Sudah ada tapi kan tidak cukup. Terus kita Musrenbang mengusulkan itu supaya lengkap. Akhirnya lengkap.” (Hj. Aminah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 15 Juli 2019)

Dengan melihat peran pentingnya dalam berbagai organisasi, Hj. Aminah mengalami perubahan signifikan dalam hidupnya setelah mengikuti pelatihan PEKKA dan memimpin kelompok. Ia kini perempuan kepala keluarga yang berdaya karena memiliki keterampilan, jejaring yang kuat, dan sumber daya ekonomi yang memadai. Saat ini, Aminah menjadi salah satu perempuan yang paling aktif di desanya.

Aminah berharap bahwa perempuan bisa setara dengan laki-laki dan mampu mendapatkan hak politik dan ekonomi mereka. Untuk pengembangan ekonomi desa, Aminah berkehendak untuk terus mendorong perkembangan BUMDes melalui usaha perikanan maupun usaha lainnya.

Hj. Farah

Ketua Kelompok Pekka Setia Kawan

Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan¹

Farah (46 tahun) adalah warga dari keluarga pendatang yang pindah ke desa penelitian ini pada tahun 1987. Sehari-hari Farah bekerja sebagai buruh tani tidak tetap dan memperoleh penghasilan kurang dari satu juta setiap bulannya. Pada tahun 1989, ia menikah ketika baru lulus dari sebuah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), namun pernikahannya kandas karena suaminya berselingkuh dan meminta cerai beberapa tahun yang lalu. Ia dan suaminya memutuskan untuk bercerai secara diam-diam agar tidak menjadi pembicaraan tetangga. Meski sudah bercerai, mantan suaminya kerap kembali ke rumah Farah untuk sekadar beristirahat atau meminta uang.

Perjuangan hidupnya yang cukup berat karena ditinggal suami membuat Farah harus menanggung beban ekonomi keluarga sendiri dan membiayai ketiga anaknya. Terlebih lagi, mantan suaminya masih sering meminta uang dari Farah. Farah merupakan sosok ibu yang kuat, ia selalu semangat membanting tulang untuk menghidupi dan menyekolahkan ketiga anaknya. Yang paling membanggakan, salah satu anaknya sudah berhasil meraih gelar sarjana dan bekerja sebagai Kepala Seksi (Kasi) di pemerintah kecamatan.

“Hal yang paling membanggakan dalam diri saya adalah bisa membiayai anak-anak saya sampai perguruan tinggi. Sekarang [anak pertama Farah] sudah jadi S1 dan diangkat bekerja sebagai Kasi Pemerintahan. Hal paling utama yang terus saya lakukan adalah selalu tabah dan sabar.” (Hj. Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

Farah bergabung dengan Serikat Pekka pada tahun 2011 setelah mendapat ajakan dari temannya, Aminah.² Sebelumnya, dia juga aktif mengurus kegiatan lain di desa dalam peran sebagai Ketua Program Keluarga Harapan (PKH), serta aktif dalam simpan pinjam Pekka. Ia menjelaskan bahwa ketika awal diajak bergabung dengan Pekka, dia dan teman lainnya merasa segan dan cemas; darah mereka semakin berdesir ketika diskusi akan dilanjutkan terutama dalam Bahasa Indonesia.

“Takut orangnya galak ... Diajak ngobrol-ngobrol. Terus katanya mau kalau ada yang stres-stres gitu kalau kita berkumpul nanti hilang katanya. Jadi curhat sama teman. Iya selama jadi Pekka jadi bisa bahasa Indonesia.” (Hj. Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

Setelah setahun mengikuti kegiatan Pekka, Farah berperan besar dalam pendirian Kelompok Pekka Setia Kawan yang juga terbuka untuk perempuan yang menikah, yang sebelumnya tidak bisa bergabung dengan serikat ini. Selama lima bulan, anggota Pekka kategori “luar biasa” ini diajak oleh Farah secara langsung.

“Pertama anggota dulu, naik jabatan, ga sampai 1 tahun terus bentuk kelompok pertanian, ikut kasidah semua. Terus aku sudah mulai pintar ngomong, katanya kamu sendiri aja bikin kelompok baru ... Cuma 5 bulan, nyari anggota katanya yang punya suami. Tapi suami yang ga bisalah, yang ga kerja gitu. Mencari anggota terus dapat 35 orang. Caranya ya jalan-jalan ke rumah-rumah lah.” (Hj. Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

¹ **Penulis:** Devy Dhian Cahyati dan Anastasia Imelda Cahyaningrum. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

² Lihat perjalanan hidup Hj. Aminah, Ketua Serikat Pekka di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Dampak kehadiran PEKKA bagi Farah cukup besar. Farah terbantu dengan adanya program-program Pekka, terutama program simpan pinjam. Dari program simpan pinjam, ia mampu mengembangkan usaha-usaha seperti usaha pertanian, dan menghasilkan pendapatan mandiri.

“Kalau kita sudah aktif kita nabung tiap bulan, kita kalau kekurangan uang mau membuat potong padi, bisa kita pinjam, terus kata aku kalau ada keperluan penting banget, bisa pinjam. Kalau kita ga minjam, kita membantu teman.” (Hj. Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

Wadah kelompok Pekka juga membantu Farah mengekspresikan keresahan dari masalah-masalah rumah tangganya. Sebelum bercerai, suaminya sering melakukan kekerasan kepada Farah dan beberapa kali berselingkuh.

“Iya pernah KDRT dia. Tapi diem aja ya Mbak. Tapi itu kadang-kadang terjadinya. Kalau sudah terjadi saya diem dan sembunyi, nanti dia cari-cari saya sambil nangis-nangis. Kalau sudah nangis nanti saya kembali lagi ke dia. Dia nyari saya, masak saya gak mau? Punya anak tiga, masak gak mau? Mikirin anak saya ya pasti, kasihan, kadang-kadang anak-anak saya gak mau pisah. Iya sebenarnya males, tapi itu mertua sayang luar biasa sama saya. Sekarang meninggal dua-duanya. Saudara-saudaranya masih sayang seperti dianggepnya lebih dari saudara saya ini. Saya masih percaya dia bisa berubah waktu dulu itu.” (Hj. Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

Farah mendapat kekuatan dan masukan positif dari anggota sesama Pekka. Persahabatan dan jaringan Pekka membantunya bertahan dan menghadapi situasi rumah tangga tersebut. Farah juga mendapat berbagai pengetahuan tentang kesetaraan gender serta hak-hak perempuan dan perlindungan sosial dari Sekolah Kader Pekka pada tahun 2017. Setelahnya, ia ingin menyebarkan ilmu agar perempuan desa tidak malu berbicara dan mengikuti musyawarah desa. Dengan keterampilan menulis dan kepercayaan diri dari pelatihan kelompok, Farah menulis karya tulis yang berjudul “Perempuan dan Ketidakadilan” mengenai perceraian sebagai tugas akhir Sekolah Kader Pekka 2017/2018.

Selain Pekka, ia juga merupakan salah satu perempuan desa yang aktif dalam berbagai organisasi desa termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Posyandu dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD). Di PKH misalnya, ia ditunjuk menjadi Ketua PKH di level desa yang berkoordinasi dengan PKH level kecamatan. Dalam BKKBD, ia ditunjuk menjadi pengurus dan penanggungjawab BKKBD desa. Kegiatan-kegiatan tersebut diikutinya atas dasar keinginan melepas penat rumah tangga sekaligus menambah pemasukan. Selain itu, dirinya juga menjadi penyanyi *madihin* (musik tradisional Banjar). Keahlian bersenandungnya juga sempat ditampilkan dalam Rapat Tahunan Yayasan PEKKA di Jakarta.

Hingga sekarang, ia menjadi Ketua Kelompok Pekka Setia Kawan yang beranggotakan 32 orang. Farah juga aktif mengajak perempuan desa untuk bergabung menjadi anggota Pekka, terutama agar bisa melakukan kegiatan simpan pinjam.

“Saya bilang kita enak, kalau kita sudah aktif kita nabung tiap bulan, kita kalau kekurangan uang mau membuat potong padi, bisa kita pinjam, terus kalau ada keperluan penting banget, bisa pinjam. Kalau kita gak minjam, nanti uangnya bisa kita buat untuk membantu teman. Kalau kita ga pinjam uang, dikelompok, kita membantu teman untuk mendapat pahala. Dia langsung tertarik.” (Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

Farah dikenal aktif berkeliling desa untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan. Ia sering berkeliling, baik untuk mengajak perempuan mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan maupun sekadar bercengkrama bersama perempuan-perempuan desa terkait persoalan-persoalan yang dihadapi. Peran dan keaktifan Farah di desa dinilai sebagai inspirasi perempuan sekaligus masyarakat desa secara umum.

Berkat pelatihan-pelatihan dari PEKKA, dirinya lebih aktif berkegiatan di desa dan mengikuti musyawarah desa. Dengan pemahaman mengenai pentingnya dokumen identitas, Farah juga menjadi berani mengadvokasikan kepentingan perempuan seperti pengadaan dokumen perceraian, Kartu Keluarga, dan akta dan kerap kali mengunjungi dinas-dinas di kabupaten untuk mengurus dokumen. Ia mengaku kepercayaan dirinya lebih tinggi setelah kurang lebih tiga tahun mengadvokasikan pengurusan dokumen dan berdiskusi dalam kelompok.

“Alhamdulillah, sering ngomong-ngomong gitu sama ... sekarang sedikit-sedikitlah bisa ngomong gitu. Iya ga percaya diri seperti, kayaknya orang bodoh gitu. Sekarang berani ngomong, berani curhat, sama-sama teman gitu, kayaknya wawasannya luas, bisa diajak jalan-jalan ke Alabio, ke kecamatan, Alhamdulillah diajak, ada Musrenbang [kecamatan] diajak.” (Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

Walaupun Farah mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa terpilih 2014, akses terhadap Musyawarah Desa dan kegiatan desa lainnya ia dapatkan dari keaktifan dalam organisasi dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan Pekka. Farah berharap perempuan desa lain bisa ikut aktif di desa seperti dirinya dan temannya Aminah. Ia berharap ilmu yang ia dapat selama mengikuti pelatihan Pekka bisa terus disalurkan kepada perempuan desa lainnya.

“Awal ikut pertemuan [Pekka] saya hanya diam saja. Saya belajar banyak seperti legalitas perempuan dan anak serta pengurusan dokumen cerai. Dari situlah awal keberanian saya, dari pengalaman yang saya alami sendiri. Lalu saya mulai ikut aktif kegiatan-kegiatan Pekka, seperti pertemuan dan pelatihan-pelatihan. Hal itu merupakan modal ilmu yang sangat berarti yang saya dapatkan dari Pekka. Saya termotivasi karena saya ingin menambah ilmu dan membentuk perempuan menjadi seorang pemimpin. Saya juga ingin membantu masyarakat agar punya KTP, KK, dan akta lahir.” (Farah, desa penelitian di Hulu Sungai Utara, 13 Juli 2019)

Meski konteks perekonomian desa yang susah, dirinya tetap berjuang agar desanya bisa dikenal, salah satunya dengan kesenian musik *madihin* dan aktif dalam Serikat Pekka. Ia juga mempunyai harapan nantinya bisa mewakili desa dalam perlombaan *madihin* di level kabupaten. Dalam pembuatan keputusan desa, ia akan tetap mengikuti Musyawarah Desa agar dapat terus mengawal kebijakan desa.

Laila

Ketua Kelompok Sekolah Perempuan Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan¹

Laila (30 tahun) merupakan salah satu tokoh perempuan berdaya di salah satu desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan mengetuai salah satu kelompok Sekolah Perempuan Pulau. Pada 2016, setelah advokasi Sekolah Perempuan, Laila diakui oleh pemerintah sebagai nelayan perempuan. Pengakuan ini memberinya status dan akses pada pelayanan yang sama dengan nelayan laki-laki.

Saat ini, Laila tinggal bersama dengan ibunda tercintanya, karena ayahnya telah meninggal pada tahun 1999. Setelah menamatkan Sekolah Dasar, ia pun harus putus sekolah lantaran harus menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan kakaknya yang telah berkeluarga.

Sejak dia kecil, Laila membantu pamannya yang bekerja sebagai nelayan. Karena pendapatan yang didapatkan tidak seberapa, akhirnya Laila memutuskan untuk menggunakan *bala-bala* (perahu berukuran kecil) milik mendiang ayahnya untuk menjadi nelayan. Sehari-hari Laila menangkap kepiting dengan jaring dan melakukan budidaya rumput laut. Petani rumput laut adalah jenis pekerjaan yang baru ia lakoni sejak empat tahun terakhir karena rumput laut sendiri baru mulai tumbuh beberapa tahun yang lalu. Untuk pekerjaan menangkap kepiting, Laila bisa mendapatkan Rp. 100.000 per kilonya, namun apabila pasaran sedang kurang menjanjikan, ia terkadang hanya bisa mendapatkan sekitar Rp. 60.000 untuk dua kilogram. Hasil tangkapannya dijual pada *punggawa* (pengepul), yang selanjutnya menjualnya ke daerah lain.

"Awal mulanya itu ikut sama om. Saya ikut di situ, belajar, akhirnya saya punya sampan, saya mulai dari situ mandiri. Saya pakai sampan itu terus melaut, sekitar daratan itu. Boleh juga saya tenggelam dengan sampan itu saya pakai. Datang ombak besar, langsung menghantam, tenggelam sudah. Saya teriak kiri kanan nggak ada orang, kebetulan ada om, ada kakak yang melihat dari jauh, akhirnya mereka datang ... Akhirnya saya udah menguasai diri sendiri, akhirnya saya beranikan diri pergi lepas dari om." (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019)

Sejak kecil, Laila sudah terbiasa melaut dan jarang dididik untuk mengerjakan aktivitas domestik. Ketika Laila besar, Laila menggantikan peran ayahnya mencari nafkah dengan melaut, karena dia memang mempunyai kapasitas dan kemampuan sebagai nelayan dan petani rumput laut.

"Kalau saya di rumah, bukan saya yang masak. Cuma mama yang mau masak. Saya kerja di laut saja. Kalau di dapur itu, bekerja di dapur kalau mama pergi, baru saya menghadap di dapur ... Mama cuma memasak, yang ngurus rumah itu cuma tante. Kalo saya ya di laut terus. Di laut terus. Pulang langsung makan." (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019)

Awalnya, Laila diajak oleh seorang kemenakannya untuk bergabung dalam kegiatan Sekolah Perempuan pada tahun 2014. Laila ingin bergabung dengan harapan ia akan mendapatkan bantuan perahu untuk menunjang profesi yang digelutinya.

"Kita diundang ke sana untuk ikut pertemuan. Terus disuruh menggambar pulau, kebetulan kan saya ndak tahu menggambar pulau bagaimana baru kali ini disuruh. Dari situlah saya berpikir semoga aja di sinilah tempat saya untuk membuka pikiran saya dan mengadu kenapa saya tidak pernah dapat

¹ **Penulis:** Ulya Niemi Efrina Jamson dan Hening Wikan Sawiji. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

bantuan. Saya mau ikut karena saya mau mencoba. Mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin ini jalan satu-satunya yang harus saya lakukan. Karena saya dulu kan, saya tidak berani bercerita. Jangankan sama Pak Desa, sama Pak Dusun saja saya takut. Daripada kita cerita begini salah lagi. Dimarahin lagi. Ketakutan, emang takut.” (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019)

Setelah berkenalan dengan Sekolah Perempuan, Laila mulai aktif berkegiatan di dalamnya. Dengan tekun, ia mengikuti pelatihan dan berbagai sesi diskusi. Tidak jarang, dalam forum besar dan formal, Laila membagikan kisah hidupnya sebagai nelayan, dan tantangan yang ia hadapi ketika melakoni peran tersebut. Pada waktu itu, pertemuan Sekolah Perempuan dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap bulannya. Waktu yang dipilih juga berkisar pada siang atau sore hari sehingga tidak mengganggu pekerjaan Laila. Karena keaktifan dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki Laila, ia berhasil menjadi Ketua Sekolah Perempuan di desanya, Sekolah Perempuan Rakkang Jaya, yang memiliki sekitar 40 anggota.

Sejak kepemimpinan Laila, Sekolah Perempuan Rakkang Jaya secara rutin melaksanakan pertemuan dan diskusi. Anggota Sekolah Perempuan ini biasanya dipandu oleh tim fasilitator Yayasan Kajian dan Pengembangan Masyarakat (YKPM) yang menyampaikan modul pendidikan adil gender. Pertemuan biasanya dilakukan di kediaman koordinator Sekolah Perempuan yang berada di pulau yang lain. Untuk pergi ke sana, Laila menggunakan uang transportasi untuk mengganti biaya sewa perahu ke sana, yang sebagian ditabung sebagai modal simpan pinjam kelompok. Diskusi tersebut memperluas keterampilan Laila, membangun kesadaran kritis mengenai hak-haknya, dan mendorongnya untuk lebih berani bersuara di ruang publik.

“Sebelum ada Sekolah Perempuan saya tidak berani. Keluar saja dari rumah kalau ada orang dari pake baju dinas jalan di dermaga saja saya sembunyi. Saya takut, takut mengeluarkan sesuatu, takut salah. Akhirnya Sekolah Perempuan jalan satu tahun, di situlah muncul keberanian saya. Bahwa saya punya tempat di sini, saya punya hak di sini. Saya sudah tahu bahwa hak saya ada di sini, dulu kan kita tidak tahu hak kita di mana, kita mau cerita di mana. Kegiatannya 3 kali satu bulan kayaknya. Materinya itu kayak tentang gender, membuka pola pikiran ibu-ibu, yang dulunya tinggal suntuk aja bercerita di depan forum di depan bapak-bapak kan tidak berani, tidak ada keberanian. Tapi sekarang semenjak ada anggota Sekolah Perempuan Alhamdulillah ibu-ibunya udah memberanikan diri memberikan apa yang ada di pikirannya.” (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019)

Sejak 2015, Laila juga menjalankan peran sebagai salah satu Ketua Rukun Tetangga (RT) di pulaunya. Penunjukan dirinya dilakukan oleh Kepala Desa dan dilanjutkan pada periode berikutnya oleh Kepala Desa terpilih. Laila bersedia mengambil peran sebagai Ketua RT setelah diyakinkan oleh Kepala Desa bahwa ia harus berani mencoba mengambil tanggung jawab secara formal, terlebih setelah selama ini Laila sudah mendapat berbagai materi perihal kepemimpinan perempuan.

Keadaan tersebut bukannya berjalan tanpa halangan. Kepala Dusun, yang sebenarnya memiliki hubungan darah dengan Laila, tidak semudah itu menerima kehadirannya terutama karena perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan peran kepemimpinan. Hubungan keduanya berangsur membaik karena kinerja dan koordinasi yang dilakukan oleh Laila dianggap baik.

“Sebelumnya saya RT kan memang kayak tadinya misal pak dusun, itu ragu gak mau untuk angkat saya, tapi kan Pak Bahrudin sama anggota Sekolah Perempuan bilang ‘kok diremehkan, kan belum bertugas kenapa kita ragukan kita liat dulu, kalo ga memuaskan ya kita berhentikan’. Akhirnya kan saya jalan 1 tahun, mungkin akhirnya pak dusun udah melihat enak-enaknya dan merasa bagus.” (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 1 Maret 2019)

Bagi Laila, ilmu yang ia dapat merupakan sebuah tanggung jawab moril yang harus diaplikasikan. Laila semakin peduli terhadap segala permasalahan dan kebutuhan perempuan di lingkungannya. Menurut Laila, perempuan di desanya sangat membutuhkan pengadaan bak air, kakus umum, dan akses terhadap listrik. Pemberian bantuan berupa bak air menjadi penting karena warga seringkali mengalami kesulitan air tawar terutama di musim kemarau. Para perempuan harus memutar otak untuk dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari, biasanya mereka menggunakan air tawar. Apabila suami mereka pergi melaut dan tidak ada kapal yang bisa dibonceng untuk membeli air, maka para perempuan tersebut terpaksa memanfaatkan air asin sebagai satu-satunya yang tersedia.

"Penampungan air bersih supaya ibu-ibu dan perempuan kita agar nggak bingung ambil air bersih apalagi kemarau lihat aduh air habis, kalau anak ambil ke [pulau lain] gak mau, beban lagi ke perempuan, kalau ada tampungan kan tidak kesulitan lagi. Oh ya jelas, urusan air urusan perempuan. Karena pagi-pagi laki-laki ke laut. Kalau anak mau, suami mau dari [pulau lain] angkat air ya nggak beban, kalau merekanya nggak mau, jadi beban, pasti kepikiran, air sudah habis." (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 1 Maret 2019)

Pada tahun 2017, Laila mengusulkan bak air sebanyak 25 unit bagi warga pulaunya melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa. Akan tetapi, hanya sebanyak 15 unit yang dapat terealisasi karena permintaan yang sama juga diusulkan pulau lainnya. Di tahun berikutnya, Laila kembali mengusulkan bak air sebanyak 20 unit.

Fasilitas kakus umum juga menjadi kebutuhan kunci perempuan karena masih banyaknya warga yang tidak memiliki kakus di rumah mereka. Akibatnya, mereka harus menggunakan laut untuk mandi dan buang air besar, bahkan pada malam hari sekalipun. Adanya tiga unit kakus umum yang tersedia membantu para perempuan untuk tidak perlu lagi pergi ke kawasan pantai yang begitu gelap ketika malam. Kebutuhan ini merupakan salah satu usulan yang dikemukakan oleh Laila, dan anggota Sekolah Perempuan lainnya, pada Musrenbangdes.

"Sebelum Musrenbang desa, kita Musrenbang dusun dulu, kita undang masyarakat yang mau hadir, kita tanyakan apa-apa saja dia butuhkan walaupun nanti itu masyarakat ditanya bilang begini karena pak desanya lagi kayak gimana kan." (Laila, desa penelitian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019)

Sedangkan infrastruktur berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menyuplai listrik pulau ini menjadi kebutuhan perempuan karena membantu para perempuan desa mendapatkan cukup banyak istirahat. Dengan adanya akses listrik, pekerjaan yang tertunda dapat mereka selesaikan pada malam hari setelah waktu siang mereka digunakan untuk melaksanakan pekerjaan domestik dan beristirahat. Proses advokasi pengadaan PLTS diawali dengan pendiskusian urgensi PLTS dalam Sekolah Perempuan. Selanjutnya hal tersebut diusulkan pada Kepala Desa di pulau tetangga melalui lobi pribadi dan Musrenbangdes. Laila, sebagai wakil dari Sekolah Perempuan, juga pernah menyampaikan maksudnya secara langsung kepada Bupati Pangkep yang sedang menyambangi pulau Laila untuk berkampanye atas pencalonan kembali dirinya pada Pilkada tahun 2015. Akhirnya, PLTS terlaksana di pulaunya pada tahun 2017.

Laila yang dianggap menginspirasi para perempuan kemudian mendapatkan kesempatan untuk menceritakan tantangan hidupnya di hadapan Bupati Pangkep dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan di Makassar. Beberapa bulan setelah kegiatan tersebut, Laila mendapatkan bantuan berupa sejumlah dana dari KAPAL Perempuan yang memungkinkan ia merakit *bala-bala* dan mesin *katinting* (perahu) secara mandiri. Meski advokasi bersama, Laila masih belum memiliki kartu nelayan maupun kartu asuransi nelayan. Hingga pada tahun 2016, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan sedang mengadakan pendataan di rumah Kepala Dusunnya, nama Laila pun ikut didaftarkan. Satu bulan kemudian, kartu nelayan Laila diterbitkan, beserta

kartu asuransi nelayan lima bulan setelahnya. Kartu-kartu tersebut adalah langkah yang penting bagi nelayan perempuan di pulau ini agar hak-hak mereka diakui secara resmi.

Pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2016, kepala dusun tersebut dapat mempertahankan jabatannya karena ia merupakan kawan dari Kepala Desa baru. Karena ketidaksukaan Kepala Desa terpilih kepada Sekolah Perempuan yang dianggap sebagai pendukung dari lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Desa, Laila hendak dicopot dari posisi Ketua RT. Berkat kerja sama yang terjalin dengan baik antara Laila dengan Kepala dusun membuat Kepala Dusun mempertahankan Laila untuk tetap berada di posisinya.

"Katanya kalau saya ini gampang diajak komunikasi, tidak sungkan, tidak merasa gak enak, kalau ada yang dibantu, misal ke kantor desa, nggak malu-malu minta tolong sama Laila. Iya, karena punya perahu sendiri juga. Misal sakit mau dianter ke Pustu [Puskesmas Pembantu]. Nggak merasa berat, langsung saja." (Laila, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 1 Maret 2019)

Tantangan yang selama ini dihadapi oleh Laila dalam menjalankan peran kepemimpinan perempuan dengan posisinya sebagai ketua RT dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam Sekolah Perempuan. Warga pulaunya acapkali menyalahkan Laila ketika mereka tidak mendapat bagian pada saat pemberian bantuan baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Hal tersebut sempat membuatnya ingin berhenti dari jabatannya pada tahun 2018, namun ia tetap dikuatkan oleh teman-temannya di Sekolah Perempuan.

Laila merupakan sosok perempuan yang sangat kuat. Walaupun sering dipandang sebelah mata, nyatanya, ia telah bekerja keras sejak kecil. Perjalanan Laila semakin menginspirasi karena ia selalu ingin "keluar dari zona nyaman", seperti yang pernah dikatakannya ketika wawancara ini berlangsung. Ia juga berani membuka lembaran-lembaran baru yang belum pernah dibacanya. Ia kemudian dilimpahi pengetahuan dan pengalaman yang banyak, hingga ia menjadi salah satu tokoh perempuan terkemuka di desanya. Melalui Sekolah Perempuan, Laila akan selalu berjuang untuk perempuan miskin. Melalui Sekolah Perempuan, ia berharap para perempuan dicerdaskan.

Julianti

Ketua Kelompok Rumput Laut Sekolah Perempuan Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan¹

Julianti (24 tahun) merupakan Ketua Kelompok Rumput Laut Sekolah Perempuan di desa penelitian yang terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perempuan yang biasa dipanggil Juli ini berdomisili di satu pulau dengan suami dan putranya yang baru berusia satu tahun, walaupun orang tua dan saudaranya tinggal di pulau lain yang masih merupakan desa yang sama. Ijazah terakhir yang didapatkan Juli adalah ijazah Paket B (setara SMP) pada tahun 2014. Pada awalnya, kedua orang tua Juli berkeberatan apabila anak sulung mereka harus meninggalkan pulau untuk pertama kalinya untuk mengikuti program Paket B, akan tetapi mereka memberi izin karena Juli berangkat bersama teman SD-nya dari pulau yang sama.

Pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari adalah mengikat rumput laut, menjahit jaring kepiting, dan berjualan baju. Juli juga menjual produk kecantikan wajah serta mendistribusikan produk kerajinan dompet yang dibuat adiknya. Pekerjaan tersebut dilakoni Juli karena ia menganggap pendapatan suaminya sebagai seorang nelayan, yang berkisar antara tiga puluh ribu hingga seratus ribu rupiah per harinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama setelah kelahiran putra mereka. Selain mencari nafkah, Juli juga harus mengerjakan keperluan rumah tangga secara keseluruhan, termasuk memasak, mencuci, hingga mengurus anak.

Bakat kepemimpinan Juli terasah saat dirinya tinggal bersama kakeknya yang merupakan seorang Kepala Dusun, dan didukung dengan pribadi Juli yang memang mudah bergaul. Sayangnya, didikan dari keluarga yang sangat ketat dalam memperlakukan anak perempuan, terutama mengenai kesempatan untuk beraktivitas di luar rumah, membuat Juli tidak memiliki akses informasi terhadap jalannya pemerintahan di desa tempat ia tinggal.

"Waktu masih jamannya kakek saya yang jadi dusun, tapi sudah almarhum. Iya, Kepala Dusun ... Itu yang pertama kayaknya di [pulau itu]. Jadi niat saya itu, Mbak, melanjutkan perjuangan beliau. Nah sekarang saya mau melanjutkan pemerintahan seperti kakek agar lebih baik, itu motivasinya ... Ingin memajukan [pulau saya] sih sebenarnya tapi ya begitu. Dari dulu, sebelum ikut anggota Sekolah Perempuan, takut sama yang berbaju seragam. Ada keinginan tapi takut, dikira kalau berbaju seragam ini mau tangkap kalau berani bicara. Sampai lulus SD takut, kalau ada pendatang takut, sembunyi." (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019)

Hal tersebut menyebabkan Juli, sebagaimana perempuan lainnya di desa, memiliki ketertarikan yang begitu kecil pada proses pengambilan keputusan, terkait kebijakan beserta program kerja dari pemerintah desa. Absennya para perempuan seperti Juli dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat desa diperparah dengan ketakutan mereka terhadap sosok orang berseragam layaknya aparat kepolisian. Ia menjelaskan bahwa sebelum Sekolah Perempuan didirikan di desanya, banyak laki-laki dan aparat pemerintahan yang tidak percaya dan meremehkan perempuan.

"Jangankan di pemerintahan, di masyarakat saja ya [perempuan] dianggap anak-anak yang ga usah di dengar, tapi sekarang lumayan di Sekolah udah mulai dihargai, dulu dikucilkan misalkan kita jalan bawa informasi itu seakan-akan ga percaya kalau saya cerita, ah ga percaya misal bantuan keluar, saya

¹ **Penulis:** Ulya Niemi Efrina Jamson dan Hening Wikan Sawiji. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

dengar ada bantuan keluar, mereka ga percaya.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019)

Pandangan mengenai peran perempuan mulai mengalami perubahan ketika Sekolah Perempuan hadir. Perempuan desa disuguhkan dengan materi-materi pelatihan yang kritis, seperti pentingnya keaktifan perempuan di ranah publik, terutama dalam pengambilan keputusan di desa. Juli mengatakan bahwa sebenarnya adiknya lebih dulu ditawarkan untuk bergabung dengan Sekolah Perempuan, ketika Intan, staf lapangan Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM), melakukan kunjungan ke pulau di mana Juli tinggal. Ketika ia mendengar kabar tentang akan dibentuknya Sekolah Perempuan di desanya, Juli pun segera mendaftarkan diri.

Ia bergabung dengan Sekolah Perempuan karena semangatnya yang kuat untuk terus belajar, energi yang tidak pernah tersalurkan melalui institusi pendidikan formal. Setelah bergabung dengan Sekolah Perempuan, Juli menjadi sosok perempuan yang cukup menonjol, terbukti dengan terpilihnya Juli sebagai ketua, yang sebelumnya dia menempati posisi sebagai sekretaris. Di Sekolah Perempuan, Juli selalu menikmati sesi diskusi bersama teman-teman dari pulau-pulau lain, selain memperkaya ilmu diskusi ini sangat penting untuk meluaskan jaringannya.

“Empat pulau ini yang tadinya ga kenal, cuma ketemu, ga tau namanya, sekarang tau, gini juga, banyak masukan-masukan dari teman, akhirnya bisa sharing, bahkan teman dari desa lain, jadi banyak, sudah akrab kayak saudara.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019)

Melalui Sekolah Perempuan, Juli belajar tentang advokasi, terutama tentang cara memperjuangkan hak-hak dasar warga. Ia pernah menerapkan ilmunya dalam menangani kasus manajemen di sebuah sekolah dasar di desanya. Pada sekitar tahun 2016, Juli mendapati anak-anak tidak secara rutin bersekolah. Setelah banyak ibu-ibu menyampaikan keluhan yang sama, Juli mengirimkan surat pada pihak sekolah untuk mengadakan audiensi terbuka terkait keaktifan tenaga pengajar yang memengaruhi pola belajar para siswa. Ketika audiensi dilaksanakan, para orang tua dan wali murid justru tidak berani mengutarakan keluhan mereka karena takut akan sosok kepala sekolah yang dipercayai mempunyai ilmu hitam.

“Tahun 2016 kayaknya, saya surati. Diadakanlah pertemuan antara orang tua murid dengan para guru itu, di sekolah tempatnya. Pas saya menyampaikan, niatnya setelah itu saya lemparkan lagi ke orang tua murid, lalu ke kepala sekolah untuk bertanya. Eh malah orang tua muridnya takut, jadi seakan-akan di situ cuma saya inisiatif sendiri, cuma asal-asalan sendiri ngomong begitu. Bu Dusun juga memihak ke kepala sekolah. Ya kan melaporkannya bukan ke Ibu Dusun, ke saya gitu, ya iyalah tidak dengar laporan. Karena masyarakat tahu kalau ibu dusun memihak ke kepala sekolah. Pas warga ditanya, tidak ada cerita. Seakan-akan cuma bikin-bikin saya saja.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019)

Setelah forum berakhir, kepala sekolah kemudian menghampiri Juli dan memintanya berhenti melakukan provokasi karena kepala sekolah tidak akan segan menyantetnya. Tak lama setelahnya, Juli menemukan vaginanya membengkak, yang ia curigai merupakan hasil dari santet. Ia telah mencoba pelbagai perawatan medis hingga rawat inap di RSUD Pangkep, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Juli pun menemui dukun yang kemudian membenarkan bahwa dirinya memang telah menjadi korban dari praktik santet. Bengkak di vaginanya tersebut baru berangsur menghilang di tahun 2018. Banyak orang yang menjenguk Juli ketika ia menjalani perawatan di rumahnya. Mereka umumnya menyarankan Juli untuk berhenti dari keanggotaan Sekolah Perempuan, sebab keaktifan dan sikap kritisnya dianggap sebagai penyebab utama datangnya penyakit tersebut. Dengan tegas, Juli menepis hal itu dan memilih untuk tetap berpartisipasi aktif di Sekolah Perempuan.

“Jalani aja sih, pasrah ke Tuhan, Tuhan yang balas. Gitu juga berobat kan mungkin pikiran orang ini anak sakit akan kapok ikut, tapi saya sih tidak ada kapok. Menurut saya itu makin kuat tantangan saya suka. Saya gadis pulau, besar ombak lalui saja, dilalui saja.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019)

Seiring dengan keterlibatannya di dalam Sekolah Perempuan, dan kedekatannya dengan Intan staf YKPM, pandangan Juli tentang peran perempuan dalam ranah domestik dan publik mengalami perubahan. Saat ini, ia menilai bahwa tanggung jawab rumah tangga juga harus dipikul oleh laki-laki. Ia paham betul tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa, dan harus selalu didorong.

Juli mengungkapkan bahwa Intan selalu membantunya ketika ia mengadvokasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya, ataupun bantuan yang lebih bersifat pribadi. Kedekatan di antara Juli dan Intan terjalin sejak Juli aktif mengikuti setiap kegiatan Sekolah Perempuan. Tidak jarang Juli curhat kepada Intan tentang masalah yang menimpanya. Yang paling penting, Intan sering membimbing dan menasihati Juli tentang cara menjalankan pembangunan dan pemberdayaan di desa.

“Saya bisa tanya apa saja tentang apa ya kemarin ga hanya masalah di kelompok, atau misal ada yang mau disampaikan, dan ga mengerti, akhirnya tanya Kak Intan, atau tentang pemerintah desa, apa ya kemarin saya tanya tentang dana desa gitu, misal berapa dana desa gitu, bukan hanya soal itu, curhat keluarga juga saya di Kak Intan, rasanya saya sudah dekat banget.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019)

Pesatnya pemahaman Juli tentang materi adil gender yang diajarkan oleh YKPM berhasil memupuk rasa percaya diri untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi setiap perempuan, dimulai dari dirinya sendiri. Dalam sebuah hubungan yang sehat, ia semakin sadar tentang hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh laki-laki, seperti memberi beban rumah tangga yang berlebihan kepada istri. Karena sikap kritisnya di dalam keluarga, juga karena kesibukannya berkegiatan dengan Sekolah Perempuan di luar desa, hubungan Juli dan suaminya sempat merenggang. Suami Juli tidak nyaman dengan Juli yang sering kali meninggalkan dia dan putra mereka di rumah. Sebenarnya, ketika mereka masih pacaran, suami Juli pernah menyatakan keberatannya dengan aktivitas organisasi Juli, tapi ia tidak pernah menggubrisnya.

Pernah suatu ketika keberatan itu memuncak, suaminya naik pitam hingga memukul Juli karena Juli bersikukuh untuk tidak meninggalkan kegiatan Sekolah Perempuan. Sebelumnya, Juli telah cuti dari Sekolah Perempuan selama satu tahun karena harus mengikuti suaminya yang sempat bekerja di daerah Papua. Usai mendapat pukulan dari suaminya, sambil membawa putranya, Juli meninggalkan suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya. Juli mengultimatum suaminya untuk tidak lagi melarangnya mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan, apabila ia masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Pada titik ini, Juli juga menyebutkan bahwa sikap itu ia ambil berdasarkan materi yang diterimanya mengenai betapa pentingnya menghargai dan menghormati tubuh dan diri perempuan.

“Kalau dari kacamata gender tidak boleh memandang orang sebelah mata, kalau orang cacat namanya diejeklah tapi setelah tau dari YKPM ada pelajaran oh ternyata ini tidak boleh. Macam-macam kekerasan, kan bukan hanya kekerasan fisik, dari omongan itu juga termasuk cerita omongan yang keras termasuk juga kekerasan ternyata itu baru tahunya waktu ikut pelatihan Sekolah Perempuan. Karena kalau bukan hanya memukul yang dimaksud kekerasan.” (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 25 Februari 2019)

Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Juli memiliki jasa yang besar dalam penyaluran bantuan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di pulaunya. Juli menjelaskan bahwa perempuan di pulaunya sangat membutuhkan air bersih dan listrik untuk menunjang aktivitas rumah tangga dan lainnya, namun belum terpenuhi dengan baik. Dengan semangat, Juli memperjuangkan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

(PLTS) melalui jalur Musrenbangdes, dan bahkan melobi Kepala Desa pada 2015 dan 2016. Sayangnya, PLTS tidak mungkin untuk dibangun karena tidak tersedianya lahan kosong. Sebagai kompensasi, terdapat pembagian bantuan panel surya untuk tiap rumah yang kemudian dimiliki oleh sekitar 40% warga pulaunya. Bantuan tersebut dirasa sangat membantu khususnya karena menerangi jalan-jalan yang sebelumnya amat gelap pada malam hari. Menurut Juli, ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa.

"Kita ikuti dulu, kalau memang desanya pemimpinnya baik, mau bermasyarakat, misal bantuan masyarakat juga, golongan apapun terus perempuan laki-laki, yang penting dari pemimpin saja masalahnya, kalau pemimpinnya wah gini mau bermasyarakat kan enak, ada ini kerja sama pemerintah dan masyarakat, jadi nanti maka bantuannya akan semua tepat sasaran." (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019)

Tantangan terbesar yang sedang dihadapi Juli adalah kenyataan bahwa dirinya tidak lagi dapat mengakses dana desa seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan praktik politik patronasi sesuai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2016. Mertua dari Kepala Desa baru yang terpilih meminggirkan Sekolah Perempuan dari proses pengambilan keputusan seperti Musrenbang, karena menganggap aksi kolektif perempuan tersebut sebagai basis massa rival politiknya dalam Pilkades.

"Maunya saya, selama ini kita perlu itu kita nggak tahu usulnya ke mana. Kalau diundang Musrenbang bisa cerita di situ, [pulau] butuh apa. Setelah jabatan Pak Andi [merujuk pada Kepala Desa sebelumnya] selesai, akhirnya nggak ada lagi. Kemarin saya sempat tanya Kepala Dusun, "Gimana kalau ada musyawarah dusun?". [Dia] bilang, 'Ya boleh sih, tapi saya nggak tahu Musrenbang kapan, jadi musyawarah dusun diadakan kapan?', gitu jawabannya ... Sekolah Perempuan tetep lanjut, bisa bermanfaat, banyak lagi yang merasakan manfaatnya, banyak ibu-ibu yang nggak tau supaya tau gitu." (Juli, desa penelitian di Pangkajene dan Kepulauan, 2 Maret 2019)

Juli berharap program Sekolah Perempuan dapat tetap berlanjut di desanya dan semakin banyak perempuan akan menjadi anggota untuk merasakan manfaat seperti yang selama ini ia rasakan, khususnya untuk berani bersuara di ranah publik dan memperjuangkan hak-hak politik dan sosial. Sebagai individu yang dianggap cemerlang dari Sekolah Perempuan Pulau, Juli juga sedang digadang-gadang oleh YKPM untuk dapat meneruskan jejak Intan sebagai staf lapangan yang akan berfokus pada pemberdayaan di daerah lainnya.



Bagian 2:

Perlindungan Buruh Migran

Gita

Ketua DESBUMI

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat¹

Gita (27 tahun), Ketua Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di sebuah desa di Lombok Tengah, adalah sarjana muda yang lebih memilih mengabdikan dan mengamalkan ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan selama berkuliah, ketimbang mencari kerja di kota-kota besar. Dengan bekal pengetahuan yang ia gali selama kuliah, Gita bergerak secara pasti untuk memberdayakan masyarakat desanya. Setelah menghabiskan masa kanak-kanaknya di desa di Lombok Tengah ini, dia melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah dengan beasiswa prestasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama empat tahun, dia berkuliah di Jurusan Kimia, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Setelah lulus kuliah pada tahun 2011, Gita kembali ke desa dan terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri (PNPM) pada tahun 2013. Kesempatan untuk bekerja dalam program PNPM muncul tidak hanya karena ia adalah salah satu perempuan desa yang berpendidikan, melainkan juga karena ia memiliki modal sosial yang kuat. Dia adalah perempuan dari kalangan bangsawan lokal, dan merupakan keponakan dari Kepala Desa saat itu. Kebangsawanan di desa di Lombok Tengah ini menjadi modal besar bagi seseorang yang ingin terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik.

Keterlibatan Gita dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan berlanjut ketika Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram memulai program perlindungan pekerja migran di desanya tahun 2014. Oleh karena keikutsertaan dalam program PNPM, Gita diajak oleh staf lapangan PPK untuk melakukan pendataan mobilitas penduduk desa.

“Setelah adanya pendataan itu, terus kita disuruh entry [masuk], barulah ditetapkan jadi kader, baru diadakan kegiatan-kegiatan, setelah terorganisir baru kita mulai mengumpulkan masyarakat.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Gita adalah orang pertama yang melakukan *survey* migrasi penduduk dengan salah satu staf desa. Kegiatan ini membutuhkan ketangguhan dan kesabaran. Gita harus mendatangi keluarga pekerja migran satu per satu untuk menanyakan mengenai keberangkatan, negara tujuan, dan durasi kontrak mereka. Ketiadaan data tentang siapa pernah menjadi pekerja migran menuntut kreativitas Gita untuk bertanya kepada responden mengenai siapa lagi yang bisa didata di sekitar rumah responden.

Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, Gita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar warga bersedia untuk berbagi data pribadi. Dalam hal ini, modal sosial yang dimiliki Gita sangat berguna.

“Beda juga sih, kalau di PNPM kan tidak [seperti] ini, sudah ada kader yang membantu jadi tidak kita yang sendiri yang ngajak, misalnya kita mau pelatihan untuk ibu-ibu hamil, tinggal kasih undangannya di kader masing-masing dusun, sudah, kita tinggal nunggu di kantor desa, kalau di DESBUMI ini kan benar-benar kita door-to-door.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

¹ **Penulis:** Mustaghfiroh Rahayu dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

Data migrasi penduduk hasil kerja Gita dan kawan-kawan inilah yang menjadi dasar bagi PPK untuk mendesak pemerintah desa membuat DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran). DESBUMI adalah program bentukan Migrant CARE untuk mendorong terwujudnya perlindungan pekerja migran, terutama perempuan. Setelah DESBUMI terbentuk, program sosialisasi migrasi aman dan juga pelayanan pengurusan dokumen berjalan lancar. Hal ini dapat dijalankan karena kepemimpinan Gita yang berdedikasi tinggi untuk membagikan informasi dan mencari tahu tentang pengalaman migrasi.

“Kita sosialisasi, dari masing-masing dusun, per dusun dulu kan dibuatkan jadwal misalkan yang 11 dusun, awalnya dulu kan 11 dusun, itu kita bagi, misalnya hari ini dapat di dusun apa saja, nah kita rame-rame ke sana turun, nanti kita hubungi minta tolong sama Kadus, untuk kita juga ikut terus nanti dari Pak Kadus kan kita tanya siapa aja, selain dari hasil pendataan dulu kan kita bisa tau juga siapa yang sudah pernah pergi, kalau orang yang kita kenal berarti itu yang langsung kita kasi undangan sendiri, kekurangannya baru minta tolong Pak Kadus.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Menjadi pemimpin DESBUMI juga menuntut Gita memiliki kemampuan komunikasi publik yang kuat dan mumpuni. Meskipun sudah terlatih untuk menjadi guru, bagi Gita berbicara di depan orang dewasa membutuhkan keterampilan tersendiri.

“Tidak pernah diajarkan sebelumnya, jadi sebelum mau tampil itu kita persiapkan dulu kira-kira apa yang harus [disampaikan] ini, kadang dilatih juga. Ndak papa sudah sambil dibaca ... Dibaca dulu katanya kalau belum hapal, jadi pelan-pelan kita belajar komunikasi.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Selain kemampuan berkomunikasi, Gita memperkaya pengetahuannya melalui program-program DESBUMI yang ia ikuti, seperti pelatihan gender dan paralegal. Ia menjadi lebih akrab dengan pengetahuan tentang cara mendokumentasikan kasus pelanggaran hak kerja, kekerasan, dan calo pekerja migran yang harus diawasi DESBUMI. Sebagai Ketua DESBUMI, Gita sering menemui perempuan yang mengalami kesulitan ketika bekerja di luar negeri, terutama yang mengalami pelanggaran hak kerja. Kesempatan ini sangat penting bagi Gita untuk mempraktikkan keterampilan sosial dan cara pendampingan korban. Keterlibatannya di DESBUMI juga memungkinkan Gita berinteraksi dengan perempuan-perempuan dari daerah lain, baik level regional maupun nasional. Kesempatan untuk bertemu dengan perempuan dari pulau lain, dia manfaatkan untuk menimba ilmu, sekaligus berbagi pengalaman kerjanya di desa.

Selama kepemimpinan Gita, DESBUMI mengalami kemajuan pesat. Migrasi penduduk tercatat dengan rapi, pengurusan dokumen transparan, dan orang tidak lagi sembunyi-sembunyi ketika berangkat menjadi pekerja migran. Sebagai puncaknya pada tahun 2015, setelah lobi dan pendampingan dari Migrant CARE dan PPK, pemerintah desa mengeluarkan Perdes tentang Perlindungan TKI Luar Negeri desa ini. Perdes ini mewajibkan setiap warga desa yang akan bekerja di luar negeri untuk melapor ke kantor desa dan memberikan dokumen secara lengkap; paspor dan visa harus disiapkan secara tertib. Dengan Perdes tersebut, pekerjaan Gita dan kader DESBUMI lain dalam pendataan dan pengawasan pekerja migran telah disahkan dan diintegrasikan dalam pemerintahan desa.

Perubahan yang paling Gita rasakan setelah terlibat dalam kegiatan DESBUMI adalah kepekaan melihat persoalan sosial yang ada di sekitarnya. Sebelum menjadi ketua, Gita tidak begitu sadar bahwa ada persoalan pekerja migran di desanya termasuk persoalan calo, gaji, dan kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan. DESBUMI memberinya peluang untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus mengasah kepeduliannya untuk membantu masyarakat. Pelatihan dan pengalaman yang didapatkan Gita bersama DESBUMI membuat dia mampu menjadi tempat curhat dan sumber informasi mengenai migrasi yang aman.

“Yang pertama lebih mengetahui informasi tentang buruh migran, dari yang awalnya dulu sama sekali tidak tahu, bagaimana proses keberangkatan, kami tidak pernah sama sekali untuk berfikir tentang ini ya masalah sosial, jarang ini kan dulu, di kampus juga kan tidak ikut di kegiatan kemahasiswaan, karena kita terikat dengan waktu jadi harus bener-bener ini, gitu. Terus yang kedua lebih mengenal masyarakat sendiri. Jadi kan kita lebih tau ‘oh ternyata desa itu begini’ yang dulu kan kita hanya taunya ya sekitar komplek sekitar saja, jadi kan setelah itu kan jadi tau.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Pada tahun 2016, Gita memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pilihan keluarganya. Meskipun begitu, pernikahan tersebut tidak menyurutkan keaktifan Gita dalam mengutamakan kegiatan DESBUMI, karena suaminya memang mendukung. Pada saat hamil pun dia tetap bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik. Perubahan besar terjadi pada tahun 2017 ketika Gita mengambil keputusan untuk mendaftar program Guru Garis Depan dan diterima untuk menjadi guru di Sumba Barat Daya.² Dengan membawa anaknya, dia mengajar dan juga melatih pengolahan pangan untuk warga sekitar. Pengalaman pelatihan dan pengorganisasian, terutama keterampilan advokasi dan komunikasi, Gita terapkan di desa yang sangat jauh dari rumahnya.

“Karena belum mengenal lingkungannya di sana, sudah terbayangkan, terus dikasi tau lagi kalau awalnya kan teman-teman ada yang berangkat duluan, yang dari Lombok, kita yang dari Lombok ini ada 13 orang, saya karena habis melahirkan jadi berangkat terakhir ... Dulu kan sama suami sama mertua ikut nganter, sampe suami juga melepaskan pekerjaan di sini.” (Gita, desa penelitian di Lombok Tengah, 10 Juli 2019)

Saat ini secara simbolis dia masih menjabat sebagai Ketua DESBUMI, namun untuk aktivitas sehari-hari sudah diserahkan. Meskipun tidak lagi mengurus kegiatan secara langsung, Gita berharap bahwa DESBUMI tetap bisa menjalankan program pendampingan, pendidikan dan pengawasan. Perubahan kepemimpinan di tingkat desa menjadi tantangan bagi kader DESBUMI. Namun, ia yakin bahwa kader-kader sudah berpengalaman menghadapi birokrat yang macam-macam terhadap kelompok DESBUMI dan akan mengadvokasi secara terus-menerus untuk peraturan, kebijakan, dan kesadaran mengenai migrasi yang aman. Selama berkecimpung di DESBUMI, sejak awal hingga akhir, Gita telah memperoleh rasa kepedulian yang luar biasa terhadap sesama. Ilmu dan keterampilan yang ia serap sejak kuliah dan di DESBUMI merupakan modal utama untuk menghapus segala permasalahan pekerja migran asal desanya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus perampasan hak terhadap mereka.

² Guru Garis Depan adalah sebuah inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meratakan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Hj. Nisa

Ketua Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat¹

Hj. Nisa adalah Ketua Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”. Nisa punya pengalaman yang cukup lama sebagai seorang ex-Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Ia berangkat ke Arab Saudi untuk pertama kalinya pada tahun 2005, saat anak pertamanya berumur empat tahun. Kontrak pertama dia jalani selama dua tahun di pedesaan dekat kota Riyadh. Pekerjaan utamanya adalah mengasuh dua anak berumur empat tahun dan enam bulan. Setelah menyelesaikan kontrak pertamanya, dia sempat pulang kampung selama satu tahun dan kemudian berangkat lagi bersama suaminya. Kepergiannya yang kedua kali dia lalui selama empat tahun. Walaupun dia sudah minta untuk pulang setelah kontrak pertama selesai, majikannya menjanjikan untuk membiayai haji jika dia melanjutkan kontrak kedua. Demi haji yang dia idam-idamkan, dia bertahan dan melanjutkan kontrak kedua. Nisa berhaji pada tahun 2012, dan oleh sebab itu ia mendapatkan gelar “Hj/Hajjah” di depan namanya. Pada Maret 2013, ia memutuskan untuk kembali ke Lombok dan tidak mau menjadi pekerja migran lagi.

Selama menjadi PMI di Arab Saudi, Nisa menganggap perlakuan majikannya kurang adil. Dalam satu rumah biasanya ada beberapa asisten rumah tangga terkait tugas khusus mereka. Pekerja ini berasal dari pelbagai negara termasuk Srilanka, Nepal, Pakistan, dan Filipina. Mereka mendapatkan perlakuan khusus dalam pembagian tugas dan gaji, mereka mendapatkan kebebasan untuk memilih tugas tetap seperti memasak, merawat anak atau lansia, sebaliknya, Nisa digaji lebih rendah dengan tugas serabutan. Kondisi demikian membuat Hj. Nisa bertanya-tanya tentang posisi dan haknya. Ia pernah menanyakan kepada majikannya, mengapa ada perlakuan khusus. Jawaban yang diterimanya mengindikasikan asumsi bahwa perempuan pekerja migran dari Indonesia, seperti dirinya, pantas digaji rendah.

“Tapi pernah saya juga nanya sama majikan, kenapa kok begini? ‘Kita kan ndak beli, kita kan bayar. Pembantu itu ke Indonesia kita kan bayarnya mahal.’ Jadi kita udah dibeli gitu kesannya. Jadi terikat sama dia, apapun peraturan kita harus patuhi. Dia kalau nggak mau misalkan sekarang dia, jaga orangtua katanya, ada waktunya sekali-dua kali dia masak, ‘nggak mau karena kerjaan saya cuma ini. Kalau nggak mau, saya pulang.’ Ya beneran pulang mereka.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Pengalaman ini membuat Hj. Nisa memutuskan untuk pulang dan bekerja di kampung sendiri. Keputusan yang sudah bulat tersebut membuat Hj. Nisa resah dengan masa depan perekonomian keluarganya. Kondisi yang sama dirasakan oleh teman-temannya para eks-pekerja migran.

“Walaupun sudah berangkat ke Saudi, sudah dapat uang banyak, sudah dapat sepeda motor, rumah, dll., ujung-ujungnya nanti kembali lagi seperti awal. Kembali ke laptop² lah. Ujung-ujungnya pasti kembali ke masalah sulitnya ekonomi.” (Hj. Nisa, desa penelitian Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Nisa bersama sekitar 30 perempuan eks-PMI dan keluarganya membentuk Kelompok Pemerhati Pekerja Migran “La Tansa”, dengan bantuan dari DESBUMI, sebuah inisiatif dari Migrant CARE untuk mendorong terwujudnya perlindungan migran. Dia memilih nama ini karena teringat kata yang sering diucapkan oleh

¹ **Penulis:** Mustaghfiroh Rahayu dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

² “Kembali ke laptop” adalah ucapan yang populer di masyarakat untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya kembali ke awal. Ujaran ini awalnya dipopulerkan oleh salah satu host acara TV “Empat Mata”, Tukul Arwana.

majikannya ketika masih bekerja di Arab Saudi yang berarti “jangan lupa”. Oleh karena keaktifan dan kekritisannya di setiap pertemuan eks-pekerja migran, dia didaulat menjadi ketua. Tujuan utama pendirian kelompok La Tansa ini adalah agar para eks-PMI dan keluarganya memiliki kegiatan ekonomi yang menghasilkan pemasukan, seperti membuat kue-kue tradisional dan kerajinan.

“Demi perubahan ekonomi lah. Karena di sini kan sulit, waktu itu belum bisa bikin-bikin seperti ini. Makanya jalan satu-satunya cuma itu, untuk mengubah ekonomi karena susah di sini.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Modal awal kegiatan mereka siasati melalui simpanan anggota kelompok. Setiap anggota wajib membayar iuran pokok sebesar Rp. 10.000 selanjutnya setiap pertemuan mereka membayar iuran wajib sebesar Rp. 5.000 per bulan. Uang tersebut kemudian diputar menjadi modal usaha anggota.

Kegiatan ekonomi ini dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Ada beberapa kelompok dalam La Tansa, yakni kelompok pembuat kue basah dan kering, keripik, tenun dan pengolahan ikan, namun yang berkembang pesat adalah kelompok pembuat kue dan keripik. Mereka saling bekerjasama jika ada pesanan.

“Kelompok ini hanya bikin pelatihan-pelatihan. Misalnya sekarang kita di kelompok itu kan banyak temen juga yang bikin kue-kue, misalnya sekarang ada pesanan, saya nggak bisa bikin, mintalah ke anggota lain.” (Hj. Nisa, desa penelitian Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Hj. Nisa semangat beraktivitas dengan kelompok La Tansa. Uang hasil bekerja di Arab Saudi bersama suaminya sudah mereka habiskan untuk membeli tanah, membangun rumah, dan modal usaha ternak ayam. Kegiatan kelompok untuk saat ini bisa menjadi penopang kebutuhan hidup sehari-hari. Pesanan harian kue basah untuk hajatan, maupun oleh-oleh, dan penghasilan dari ternak ayam merupakan penolong perekonomian keluarga.

Diskusi dengan anggota kelompok perempuan juga menghasilkan inovasi dalam pemasaran kue-kue produksinya. Selain menjualnya secara konvensional, saat ini ia juga melayani pesanan melalui akun Facebook dan WhatsApp. Semua anggota La Tansa juga memaksimalkan media sosial sebagai lahan promosi.

“Iya. Lewat WhatsApp juga, dari luar desa ada yang mesen ke sini waktu lebaran. Kita senang kalau puasa dan lebaran, bisa dapet banyak. Menjahit juga saya. Menjahit kalau ada pesenan. Siang bikin jajanan, malam baru jahit. Sekarang juga masih ada untuk baju anak sekolah.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Hj. Nisa sudah mandiri secara ekonomi karena usaha kue basah dan keringnya mendapat banyak pesanan. Semenjak dia pulang, dia juga dikaruniai anak perempuan yang saat ini berumur empat tahun. Dengan segala yang dimiliki saat ini, Nisa tidak lagi berkeinginan untuk mengadu nasib di luar negeri. Namun di balik semua itu, ada satu alasan kuat yang membuatnya tidak lagi berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, yakni relasi dengan anak pertamanya yang sangat buruk. Dia tidak ingin anak keduanya ditinggal karena ibunya harus bekerja jauh.

“Iya, saya takut anak saya yang kecil juga seperti itu. Makanya saya nggak mau balik lagi. Kalau sekarang nyari-nyari rejeki di sini aja deh. Itu ah yang bikin saya miris, harus denger dari orang dulu apa kemauan anak sendiri. Kadang-kadang ngiri lihat anak tetangga sama ibu-bapaknya. Makanya anak saya yang kecil ini kan nggak bisa jauh dari saya. Makanya saya stop aja dulu. Walaupun dia [anak sulungnya] dekat sama neneknya, tapi kan kita gimana gitu. Saya kadang-kadang nangis kenapa anak saya nggak mau dekat sama saya.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Selain melakukan kegiatan yang berdaya ekonomi, Hj. Nisa bersama-sama dengan anggota Kelompok La Tansa sering berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka semasa menjadi PMI. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekali

sebulan. Pengalaman mereka ini penting untuk orang-orang, khususnya para perempuan, yang ingin bekerja keluar negeri untuk mengenal dan menyadari lebih dalam seluk beluk migrasi yang aman.

“Ada yang berangkat, ada yang pulang, ada yang bermasalah, nanti kita kasih taunya, nanti anggota ini kan kasih informasi ke tetangga, misalnya ada yang mau berangkat ke Saudi, di sini lebih aman, mengurus persyaratan harus lengkap. Jadi nggak dibuat-buatlah. Biasanya kalau dulu kita kan dipalsukan, kadang-kadang umur KTP dipalsukan.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

Bersama teman-teman kelompok perempuan ini, mereka menjadi “duta” desa mengenai bahayanya bekerja ke luar negeri tanpa dokumen lengkap dan benar. Nisa mengakui bahwa kepergiannya ke Arab Saudi tanpa pengetahuan sedikitpun tentang proses-proses yang mesti dilewati secara resmi. Walaupun sudah dua kali ke sana, ia menuturkan bahwa sebenarnya ia tidak pernah tahu siapa yang harus ia hubungi ketika mendapati sebuah masalah. Setelah berkecimpung dalam organisasi dan advokasi pekerja migran barulah ia menyadari semua kekurangan dan kesalahan yang pernah ia lakukan.

Sekarang, La Tansa adalah organisasi penyambung lidah bagi orang-orang dari kampungnya, khususnya para perempuan, yang sedang bekerja di luar negeri. Melalui organisasi ini, ia juga ingin ikut mempermudah DESBUMI dalam menolong mereka-mereka yang sedang berada dalam masalah, seperti masalah ketidakadilan, kekerasan, masalah keimigrasian dan lain sebagainya. Setiap informasi yang didapatkan La Tansa akan langsung dilaporkan kepada DESBUMI, untuk kemudian dibantu dan ditindaklanjuti.

“Kita akhirnya taunya ke kader, trus kaderlah yang menindaklanjuti. Kita sebatas ngasih informasi aja. Yang menindaklanjuti kader. Kita hanya penyambung lidahlah di masyarakat, ke tetangga-tetangga gitu. Iya, kita kan kalau pulang cerita, ada masalah, ada yang pulang. Nanti kita cuma kasih tau di kelompok, nanti temen-temen kader inilah yang menindaklanjuti.” (Hj. Nisa, desa penelitian di Lombok Tengah, 8 Juli 2019)

La Tansa, sebagai asosiasi yang bermitra dengan DESBUMI, Panca Karsa dan Migrant CARE, sering diundang untuk kegiatan jaringan lembaga yang memiliki perhatian pada isu pekerja migran di level lokal, regional, maupun nasional. Pada level lokal, Hj. Nisa terlibat dalam penentuan dana APBDes yang terkait dengan DESBUMI. Dia juga terlibat dalam kegiatan mendorong terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan TKI di Kabupaten Lombok Tengah. Sayangnya, ketika ia diberi kesempatan untuk mengikuti forum skala nasional, ia tidak bersedia karena anaknya masih kecil, dan ia digantikan oleh teman La Tansa lain. Selain itu, saat ini, Nisa juga aktif sebagai kader Posyandu dan Kampung Keluarga Berencana di desanya.

Banyak keuntungan yang diperoleh Nisa, juga para perempuan lainnya, setelah mendirikan La Tansa. Melalui La Tansa, Nisa dan teman-temannya mendapatkan pemberdayaan ekonomi yang cukup kokoh. Sumber penghasilan ini bukan hanya membantu kebutuhan pribadi para perempuan, namun juga ikut menopang perekonomian banyak keluarga di desanya. Melalui pelatihan-pelatihan yang diikutinya, Nisa semakin paham tentang cara dan kiat bermigrasi dengan lebih aman. Dia, melalui La Tansa, akan membagikan pengetahuan ini kepada khalayak luas yang ingin bekerja sebagai pekerja migran, ataupun yang sedang di luar negeri. Pengalaman dan kepemimpinan Nisa di dalam La Tansa juga sangat berguna bagi dirinya dalam forum-forum pengambilan keputusan, baik di tingkat desa, maupun tingkat yang lebih tinggi.

Jika sebelumnya keaktifannya hanya diketahui oleh tetangga sekitar, saat ini perangkat desa memperhitungkan saran dan masukan-masukan darinya. Nisa, bersama-sama dengan ibu-ibu La Tansa, telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa untuk menyediakan ruang pameran produk-produk mereka di Balai Desa untuk kepentingan promosi. Dia juga berharap pemerintah selalu mendukung aktivitas kelompoknya agar perempuan-perempuan di desanya lebih bersemangat dan mendapatkan keamanan ekonomi.



Bagian 3:

Perbaiki Kondisi Kerja

Mia

Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera Deli Serdang, Sumatera Utara³

Mia adalah salah satu dari ibu-ibu pekerja rumahan dari kelompok penganyam kawat yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan serikat pekerja rumahan di Deli Serdang. Perempuan yang lahir pada tanggal 28 Februari 1969 ini merupakan sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Serikat Pekerja Rumahan (SPR) Sejahtera. Mia lahir dan menghabiskan masa mudanya di Serdang Bedagai, sebelum merantau ke desa ini dan menikah dengan suaminya pada tahun 1990.

Suami Mia pernah bekerja sebagai penarik becak. Pada waktu itu, untuk membantu suaminya mencari nafkah, sehari-hari Mia bekerja sebagai penganyam kawat panggangan di rumah. Upah menjadi pekerja rumahan tersebut digunakan untuk membayar uang sekolah anak-anak mereka. Tidak banyak uang yang dihasilkan dari pekerjaan ini. Pada tahun 2002, ia pernah hanya menerima upah sebesar tiga ratus ribu rupiah per bulannya. Bagi Mia, menjadi pekerja rumahan bukanlah hal yang baru karena bidang pekerjaan ini telah ia lakoni sejak dari bangku sekolah menengah. Pada masa itu, Mia bekerja sebagai pengupas kerang, pengerat tali sandal, dan lainnya, untuk sebuah perusahaan.

Keluarga Mia sangat aktif dalam kegiatan organisasi buruh. Suaminya yang kini bekerja sebagai mandor bongkar muat di sebuah pabrik, terlibat aktif dalam organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan anaknya juga sempat terlibat dalam SPR Sejahtera. Dari keterlibatan itu, mereka mendapatkan banyak pengetahuan seputar ketenagakerjaan. Mia, khususnya, baru mengetahui hak-hak kerja setelah bergabung dengan SPR Sejahtera. Sebelumnya, ia dan ibu-ibu pekerja rumahan lainnya tidak sadar bahwa mereka memiliki hak sebagai pekerja. Perusahaan seharusnya wajib untuk memberikan hak perlindungan kepada mereka mengingat tingginya risiko profesi penganyam kawat panggangan.

“Jadi itu tadi perlunya Raperda [Rancangan Peraturan Daerah], agar kita mendapatkan hak pekerja. Karena kerjanya seperti ini, menggunakan alat kerja yang tajam dan berisiko kena tangan. Jadi kita sekarang mengurus Raperda untuk perlindungan dan payung hukum, dan mendapatkan K3 [kesehatan dan keselamatan kerja]. Kecukuk tangannya, tergores-gores. Ini memang risikonya besar sih.”(Mia, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Upah yang didapatkan juga tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggungnya. Tangan Mia kerap luka karena alat penganyam dan bahan dasar kawat yang cukup berbahaya. Walaupun begitu, jerih payah Mia hanya dibayar dengan uang sekitar Rp. 5000 per kodi kawat kecil hingga Rp. 10.000 untuk kawat yang berukuran paling besar. Dalam sehari, Mia dapat menyelesaikan sekitar dua kodi kawat panggangan, tergantung ukuran bahan dasarnya.

Kehidupan Mia, sebagai pekerja rumahan, mengalami titik balik setelah bertemu Diah, staf BITRA Indonesia. Mia diajak berdiskusi mengenai pekerja rumahan. Diskusi tersebut mulai menelurkan kesadaran Mia tentang hak yang seharusnya ia terima dari perusahaan. Kesadaran itu kemudian menetaskan sebuah tekad di hati Mia untuk memperdalam pengetahuannya tentang seluk-beluk dunia kerja melalui pelatihan dan seminar. Diah

³ **Penulis:** Devy Dhian Cahyati dan Bellicia Angelica Tanvil. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

juga mengajak Mia untuk terlibat dalam pembentukan kelompok pekerja rumahan dan bergabung dalam serikat pekerja rumahan. Pada awalnya Mia enggan untuk bergabung dalam SPR karena masih harus mengurus pekerjaan rumahan dan anaknya, akhirnya Mia bergabung dalam serikat pada bulan Juni 2014.

Awal terlibat dalam kegiatan SPR, suami Mia sempat melarang Mia ikut dalam serikat dan berbagai pelatihan serta kegiatan kelompok dan serikat yang didampingi BITRA. Suami Mia kurang senang karena kegiatan-kegiatan BITRA umumnya dilaksanakan di hotel dan restoran. Ia terpengaruh oleh pandangan negatif sekelompok masyarakat konservatif tentang perempuan yang sering pergi ke kedua tempat ini. Walaupun demikian, Mia tetap bersikukuh pergi dan menunjukkan manfaat yang ia terima kepada suaminya. Pada setiap pelatihan, Mia mendapatkan beragam manfaat dan pengetahuan baru, seperti persoalan tentang gender, kesehatan dan keselamatan kerja, hukum, dan undang-undang ketenagakerjaan. Keterampilan Mia pun semakin terasah berkat pelatihan-pelatihan yang diberikan, seperti menjahit dan memasak. Kegigihan, ketekunan dan perubahan baik yang ditunjukkan Mia membuat suaminya luluh, dan pada akhirnya mendukung penuh seluruh kegiatan yang ia ikuti.

"[Kalau ada salah] 'Tapi udah belajar gender', jadi selalu Bapak yang mengingatkan seperti itu. Jadi haruslah apa yang diberikan dalam pelatihan itu dijalankan juga. Kadang-kadang kita perempuan ini kan, kebablasan sedikit ngomongnya. Kadang kan agak meningkat dikit suara kita dari suami. Itu dia langsung di situ masukannya, 'tapi sudah belajar gender, kok gitu sih.'" (Mia, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Mia menjadi lebih giat dalam serikat dan kelompok setelah mendapatkan dukungan dari suaminya. Mia, bahkan, mulai didukung oleh seluruh anggota keluarganya. Melalui SPR, Mia kerap membagikan pengetahuannya tentang hak dan status kerja kepada ibu-ibu pekerja rumahan lainnya. Ia menerapkan pendekatan kekeluargaan dengan cara sering berkunjung ke kediaman para pekerja rumahan. Mia kemudian mengajak ibu-ibu tersebut untuk melanjutkan diskusi di rumahnya. Seri diskusi pertama diikuti oleh sebelas orang peserta. Mia benar-benar memperhatikan para pekerja yang datang ke rumahnya dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu singkat, para peserta yang awalnya masih canggung satu sama lain menjadi semakin akrab. Pada pertemuan kelima para pekerja tersebut sudah memiliki struktur kelompok pekerja sendiri.

"Nah iya, kalau nggak salah pertama itu sebelas orang dan masih cuek, masih sombong. Terus pertemuan lagi yang kedua. Lalu berlanjut terus, makin akrab makin akrab. Terus pertemuan kedua kita udah pendataan ya. Pertemuan ketiga sudah mulai mau. Yang kelima sudah Konferensi Tingkat Anggota/Konperta. Pokoknya kami itu selalu ke sana berkunjung bolak-balik." (Mia, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Mia menjadi salah satu anggota SPR yang paling cepat aktif. Perjalanannya aktif dalam organisasi dimulai sejak bulan Juni 2014 ketika ia mulai bergabung dengan kelompok pekerja rumahan di tingkat desa, yang disebut dengan Pimpinan Kelompok Tingkat Desa (PKTD). Hanya dalam waktu enam bulan, Mia telah menjadi anggota PKTD sektor kawat. Ia kemudian dipilih menjadi Ketua Kelompok PKTD Kawat pada tahun 2015. Karir organisasinya semakin meroket ketika ia terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPR Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang periode 2016-2019. Di tengah jabatannya menjadi Ketua DPC SPR Sejahtera, Mia juga ditunjuk menjadi Koordinator Wilayah Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sejak 2019, Mia dipilih sebagai Sekretaris DPD SPR Sejahtera melalui kongres anggota.

Mia merupakan orang yang cepat belajar dan mempunyai komitmen tinggi dalam setiap hal yang ia lakukan. Hal ini dapat dilihat dari caranya bekerja dalam organisasi, sebagai contoh, ia mendatangi pertemuan SPR di daerah lain dengan menggunakan biaya sendiri. Ia juga selalu memanfaatkan sisa uang transportasi yang ia dapatkan dari MAMPU untuk membiayai kegiatan lain yang tidak didanai organisasi.

Mia mengungkapkan bahwa ada perubahan besar dalam dirinya sejak aktif dalam berbagai organisasi dan aktivitas-aktivitas penting lainnya, terutama soal kesetaraan gender. Sebelum berkecimpung dalam urusan keorganisasian, Mia masih percaya bahwa hanya laki-laki yang cocok dan bisa menjadi pemimpin, begitu pula dengan pandangan masyarakat secara umum.

“Kalau orang desa kita sih juga gitu, jadi kalau pemimpin perempuan itu kurang sreg, mereka lebih cenderungnya pemimpin laki-laki.” (Mia, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Sebelum ikut dalam pelatihan gender, Mia masih takut untuk berbicara di depan umum. Ia juga sering grogi ketika bertemu, mengobrol, atau audiensi dengan pejabat pemerintah. Kegugupan Mia berangsur hilang setelah ia mengikuti berbagai kelas dan pelatihan yang diberikan oleh BITRA. Mia kemudian tersadarkan bahwa ilmu kepemimpinan tidak mengenal usia dan gender. Mia yakin bahwa perempuan pun bisa menjadi pemimpin yang hebat. Hari demi hari, kemampuan Mia meningkat dengan cepat, ia tidak cemas lagi bersuara di depan publik. Mia kemudian dipercaya untuk menjadi fasilitator dalam pembentukan kelompok lain. Menurut Mia, kemauan untuk terus belajar dan mencoba merupakan dorongan diri sendiri untuk melawan ketakutan dan menjadi lebih berani.

“Kalau kesulitan [dalam proses belajar] itu pasti ada ya, kan kita ini kadang-kadang kurang percaya diri. Jumpa dinas itu kan kadang kita kurang percaya diri. Aduh, gemetar sih, karena pas awal saya masuk serikat ini, waktu pelatihan pertama itu saya pelatihan fasilitator. Jadi itu sempat gemetar juga sih di depan, tapi saya tetap mencoba juga. Trus saya mencoba terus, saya berani-beranian aja. Saya nggak pernah jadi pemimpin rapat, nggak pernah sama sekali. Tapi saya coba aja walaupun salah. Memberikan kata sambutan juga nggak pernah, tapi saya coba aja walaupun mungkin salah di mata orang lain, tapi saya lanjut aja nggak peduli. Jadi saya ucapkan saja apa yang mau saya ucapkan. Entah bener atau nggak nya saya ngomong, saya nggak ngerti lah. Pokoknya saya coba aja.” (Mia, desa penelitian di Deli Serdang, 8 November 2019)

Kepandaian yang Mia dapatkan telah membukakan pintu kesempatan baginya untuk berkontribusi dalam beragam acara penting. Mia pernah terlibat dalam diskusi dengan akademisi dari Universitas Sumatera Utara untuk menyusun naskah akademik mengenai status pekerja rumahan dalam peraturan daerah. Mia terlibat dalam audiensi dan revisi mengenai rancangan peraturan daerah bersama SPR, BITRA, dan pemerintah. Lebih membanggakan lagi, Mia pernah turut audiensi bersama Kementerian Ketenagakerjaan mengenai peraturan ketenagakerjaan. Tidak sebatas itu, Mia mengatakan bahwa ia selalu siap apabila diminta untuk membagikan pengalamannya dalam organisasi di muka umum.

“[Ketika ditanya takut apa tidak] nggak lah, orang sama-sama makan nasi kok. Jadi prinsipnya seperti itu. Sering Bu Rina itu bilang, ‘ini kan Ketua DPC nih, sama aja kayak Bupati nih jabatannya. Kalau di Pemerintahan Bupati, kalau di serikat ini kan Ketua DPC, sama itu.’ Jadi dalam pikiran kita, ya sama dong, kenapa sih kita mesti ada perbedaan derajat.” (Mia, desa penelitian di Desa Serdang, 8 November 2019)

Mia masih ingin terus meningkatkan kemampuannya dengan terus belajar dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan. Ia juga akan terus memperjuangkan hak dan statusnya sebagai pekerja rumahan agar diakui oleh pemerintah melalui Peraturan Daerah. Mia berkeinginan agar semua perempuan pekerja rumahan menyalurkan ilmu dan keberanian yang telah mereka dapatkan dari pelatihan BITRA dalam setiap rapat dan pengambilan keputusan di desa, bukan hanya perempuan tertentu saja. Harapannya ke depan, perempuan-perempuan pekerja rumahan mendapatkan perhatian khusus, bukan hanya dari pemerintah kabupaten atau yang lebih tinggi, namun juga dari Kepala Desa. Mia juga berharap bahwa pekerja rumahan yang belum bergabung dengan serikat pekerja agar dapat berproses dan berkembang bersama SPR Sejahtera.

Widyati

Anggota SPPR Kreatif Bunda Bantul, D.I Yogyakarta¹

Widyati (43 tahun) merupakan pekerja rumahan sekaligus pemilik usaha kerajinan menjahit di desa penelitian di Kabupaten Bantul. Desa ini juga merupakan tempat di mana ia menghabiskan masa kecil dan masa remajanya. Setelah tamat Sekolah Menengah Atas, dia merantau ke Batam untuk bekerja di pabrik elektronik dari tahun 1993 hingga 2008. Di Batam, ia bertemu dengan suaminya yang berasal dari Medan. Mereka kemudian kembali ke desa Widyati atas permintaan ibunya yang sudah tua dan tinggal sendirian.

Widyati adalah sosok perempuan desa yang aktif dan patut diperhitungkan. Saat ini dia mengelola PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), menjadi kader Posyandu lansia, sebagai anggota Pokja (Kelompok Kerja) 3 di PKK tingkat desa, dan menjadi perwakilan perempuan dalam penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan tim RKP (Rencana Kerja Pembangunan) 2020. Widyati mengaku bahwa dia terinspirasi oleh ibunya yang juga aktif dalam kegiatan di desa.

“Karena dulu mamak saya kader, sekarang sudah pensiun. Masih kader, tapi kan sudah tua, ya balik-baliknya ke anaknya, yang gantiin.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Semenjak pulang dari Batam, Widyati dan suami bahu-membahu bekerja untuk menopang perekonomian keluarga. Suaminya melanjutkan pekerjaan sebagai teknisi AC di mal dan hotel di Yogyakarta, sementara Widyati menjadi pengusaha kecil di bidang kerajinan menjahit. Widyati mendapatkan keahlian ini dengan belajar pada tetangga yang lebih dahulu menggeluti usaha kerajinan. Banyak perempuan di desa ini memiliki kemahiran menjahit setelah masuknya bantuan mesin jahit ketika desa terdampak oleh bencana gempa bumi Bantul pada tahun 2006. Mulai saat itu banyak bermunculan penjahit dan melahirkan sumber pendapatan desa yang baru.

Awalnya, Widyati merupakan buruh menjahit untuk tetangganya, kemudian ia berani membuka usaha sendiri. Saat ini, ia telah memperkerjakan delapan perempuan pekerja rumahan, gelar “juragan” pun telah disematkan padanya. Produk kerajinan yang dihasilkan adalah dompet, tas, dan aneka cendera mata, yang dijual kepada pedagang dan melalui pesanan daring. Tiap bulan Widyati mampu menghasilkan omzet sebesar Rp. 6.000.000.

Melalui usahanya ini Widyati berhasil meningkatkan perekonomian keluarga dan mampu menyekolahkan keempat anaknya. Sebelumnya, untuk kebutuhan uang saku sekolah anaknya, Widyati harus berutang kepada koperasi perempuan di desa di mana ia aktif sebagai anggota. Sekarang ia berhasil menyekolahkan anak pertamanya hingga ke perguruan tinggi, sementara yang kedua duduk di bangku SMA, yang ketiga SMP, dan keempat masih SD.

Widyati bergabung menjadi anggota SPPR (Serikat Perempuan Pekerja Rumahan) Kreatif Bunda pada tahun 2016 atas ajakan Ketua SPPR. Ajakan tersebut adalah upaya serikat untuk memperluas sebaran serta meningkatkan jumlah anggota. Saat ini di dusun Widyati baru ada tiga perempuan yang bergabung sebagai anggota serikat. Sebagai pekerja rumahan yang sekaligus memiliki ketertarikan terhadap organisasi, Widyati senang bergabung dalam serikat.

¹ **Penulis:** Mustaghfiroh Rahayu dan Nadlirotul Ulfa. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

“Iya tertarik dengan berorganisasi di sana [SPPR Kreatif Bunda]. Sebenarnya banyak juga sih ikut berorganisasi, PKK ikut, Posyandu ikut. Namun, bisa juga nambah pengalaman kan. Kita juga buruh rumahan, jadi apa sih di dalamnya? Jadi penasaran gitu.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Setelah bergabung dengan serikat, Widyati mengikuti berbagai pelatihan yang digagas oleh Yasanti, termasuk sekolah gender dan hak perempuan pada tahun 2018, *workshop* mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta sekolah penguatan ekonomi pada tahun 2019. Selain itu, pertemuan bulanan anggota SPPR Kreatif Bunda juga menjadi ajang untuk peningkatan kapasitas Widyati.

“Manfaatnya ikut ini, kita banyak belajar dari situ tentang gender, tentang pembukuan, tentang administrasi, terus bagaimana cara mengasuh anak kita ketika kita kerja, terus tentang kesehatan keselamatan kerja. Gitu!” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Oleh karena keaktifannya di banyak kegiatan, pada awal-awal kepemimpinan Kepala Desa pada tahun 2018, Widyati terpilih menjadi salah satu anggota tim 11 yang menyusun RPJMDes. Ia dipilih melalui musyawarah desa sebagai unsur dari perempuan desa. Dalam hal ini Widyati juga mewakili suara dari SPPR Kreatif Bunda.

“Atas nama serikat [keterlibatan dalam tim penyusun RPJMDes]. Karena kan banyak yang terlibat, jadi kita atasnamakan serikat saja. Keterwakilan perempuan kan harus ada, jadi meskipun serikat di dalamnya juga ada PKK dan lain sebagainya.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Keterlibatannya dalam kegiatan SPPR Kreatif Bunda memberi banyak perubahan dalam dirinya. Setelah mengikuti Sekolah Gender SPPR selama dua tahun, Widyati menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan memiliki jiwa kepemimpinan. Widyati juga mulai memiliki posisi tawar dalam agenda pembangunan desa setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari *workshop* yang difasilitasi SPPR dan Yasanti. Salah satu wujud kepemimpinannya adalah penyertaan pendapat dan kebutuhan serikat sekaligus perempuan pekerja rumahan di musyawarah dan rencana pembangunan desa.

“Jadi merancang pembangunan untuk lima tahun ke depan, kan yang tahun pertama ini ... itu kayak yang bagian fisiknya dari semua aspek ... Dulu itu ya pakai musyawarah juga, cuman ini dari unsur perempuannya ini itu siapa yang mau diajukan pas ada Musdes itu. Ditunjuknya [undangan dari sekretaris desa] pas Musdes itu.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Sebagai anggota tim penyusun Rancangan Kegiatan Pemerintah (RKP), ia terlibat menyusun rencana pembangunan desa tahun 2020. Dalam tim RKP ini terdapat dua anggota perempuan dari total tujuh anggota tim penyusun RKP yang dibentuk. Keterlibatannya dalam penyusunan kedua dokumen desa tersebut memberikan kesempatan baginya untuk mengusulkan kebutuhan serikat.

“Dari saya yang atas nama serikat, saya akan tetap mengajukan dana akomodasi ketika rapat [usul pada saat menjadi tim penyusun RPJMDes]. Jadi memang perlu dianggarkan, tetep ke depannya saya akan usulkan terus. Jadi setiap tahun ketika ada Musrenbang, saya usulkan terus. Yang di tim RKP, dari serikat kita selalu mengusulkan pelatihan-pelatihan sama itu tadi, uang akomodasi rapat. Biar semangat ibu-ibu ini untuk berorganisasi. Selama ini kan cuman sekedar dapat gitu, bukan apa-apa. kalo ada minum kek atau apa bisa berlama-lama kalo duduk ibu-ibu ini.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Dari segi penguatan ekonomi, setelah enam tahun menggeluti usaha menjahit dia mulai bisa mengembangkan usahanya dengan menjadi induk semang dan memiliki pekerja yang bekerja setiap hari padanya. Widyati belajar mengelola administrasi keuangan usahanya melalui pelatihan dari Yasanti yang memberikan pelatihan tentang pembukuan. Sekarang ia memiliki buku alur pemasukan dan pengeluaran yang jelas.

“Kita untuk penguatan ekonomi yang paling mengena itu soal pembukuan. Karena selama ini saya itu paling nggak ngerti bagian pembukuan. Jadi sekarang ini udah mulai rapi, jadi per bulan itu dapat berapa tahu, pengeluaran berapa tahu. Administrasi, pembukuan, jadi semuanya kita bisa tahu. [Tahu] kebutuhan yang penting mana yang harus kita belanjakan, mana kebutuhan yang sekedar sekunder aja yang belum perlu kita belanjakan gitu. Memang kita diajarkan begitu.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Yasanti juga membagikan pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Dari materi tersebut, ia mendapat pengetahuan baru terkait cara menjaga kebugaran tubuh saat bekerja. Selama ini hal tersebut sering kali dianggap sepele oleh para pekerja rumahan yang tidak memiliki standar kerja seperti di perusahaan.

“Saya kan menjahit, iya kalau menjahit itu harus cara nunduk yang baik itu gimana, air minum harus tersedia selama kita jahit, terus istirahat menghibur diri juga, nggak boleh terus-terusan menjahit. Terus bagaimana cara menjaga pola makan, bagaimana tetap terjaga. Banyak yang dipelajari dari sana.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Keterlibatannya dalam semua aktivitas di desa mendapat dukungan penuh dari suami. Widyati dan suami tidak mempermasalahkan pendapatan masing-masing. Semua pendapatan suami dikelola oleh Widyati untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak.

“Kalau suami saya sih selama kewajiban kita sebagai istri kita jalankan, jangan sampai terlewat jemput anak, dan lain sebagainya, kita bisa bebas ikut berkegiatan. Apalagi kan kegiatan itu, kegiatan positif.” (Widyati, desa penelitian di Bantul, 24 Oktober 2019)

Meskipun mendapatkan manfaat dari kegiatan SPPR Bunda Kreatif dan Yasanti, Widyati masih resah dengan kondisi perempuan pekerja rumahan. Ia menginginkan pemerintah memiliki kepedulian yang sama besarnya antara pekerja rumahan dengan pekerja pabrik. Menurutnya, pekerja rumahan masih dianggap kurang penting, padahal mereka juga memiliki kontribusi besar dalam mendorong laju perekonomian daerah dan penguatan ekonomi keluarga. Widyati berharap bahwa pekerja rumahan juga akan mendapatkan perlindungan sosial dan kesehatan, upah kerja yang layak, serta peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak pekerja rumahan.



Bagian 4:

Peningkatan Kesehatan dan Gizi Perempuan

Hatini

Ketua KWT dan Kader Kesehatan Reproduksi 'Aisyiyah Cirebon, Jawa Barat¹

Hatini (39 tahun) merupakan kader 'Aisyiyah dari salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Seperti banyak anggota masyarakat lainnya di desa, Hatini hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar. Rendahnya taraf pendidikan formal ini menyebabkan kurangnya tingkat kepercayaan diri masyarakat, termasuk Hatini. Sebelum bergabung dengan 'Aisyiyah, Hatini dikenal sangat pemalu. Ia sempat bekerja sebagai buruh pabrik hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ia kemudian membuka warung kecil di rumahnya untuk menjual sayur-sayuran dan gorengan.

Sebelum menjadi kader 'Aisyiyah, Hatini telah aktif di Posyandu (2007), PKK (2008), dan sempat menjadi kader Posyandu untuk memerangi penyakit tuberkulosis (TBC) pada tahun 2013. Pada tiga kegiatan tersebut ia mengaku melakukan aktivitas secara terbatas.

"[Sebagai kader Posyandu], tugasnya cuman nimbang aja sih. Di blok [dusun] sini. [Sebagai] kader PKK, ada rapat ini PKK gitu. Rapatnya di desa, di kecamatan juga. Tugasnya ya apa sih ya, paling ya itu mengerjakan pokja-pokja itu. Tugasnya gini, mengawasi atau apa ya, mengetahui tentang sekolah ada berapa. Pendataan sekolah. [Sebagai] kader TB tuh yang sama Bu Sri tuh. Tadinya sih ikutan, cari orang yang sakit tuberkulosis. Lalu lapor ke Puskesmas." (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019)

Pada tahun 2014, saat Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon membawa program pemberdayaan perempuan ke desanya, Hatini mendapatkan kesempatan untuk bergabung sebagai kader kesehatan reproduksi (Kespro). Ia menjadi salah satu perempuan yang dipilih oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa² melalui sekretaris desa. Hatini ditunjuk berdasarkan pengalamannya di PKK dan Posyandu.

Aktivitas baru ini telah membuka peluang bagi Hatini untuk mendapatkan pengalaman baru. Pelatihan kader menjadi momentum pertama Hatini untuk mengenal lebih jauh suasana di luar kampungnya. Ia berkesempatan menginap di hotel dan belajar tentang kepemimpinan dan materi-materi tentang kesehatan reproduksi perempuan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Melalui kegiatan ini ia pun belajar cara mengusulkan pendapat.

"Ya senang ya. Senang aja, kan dapat pengetahuan banyak dari 'Aisyiyah tuh. Ya pertama kali di hotel yang, ya bagus lah. ['Aisyiyah] tuh bantulah sama kader-kader desa tuh. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia yang maju. Apalagi di desa, walaupun di kecamatan, di sipil. Enak lah. [Kader] didorong-dorong [oleh 'Aisyiyah], jadi sekarang berani tuh. Berani ngungkapin ada mengusulkan pendapat, atau apa aja." (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019)

Sebagai kader Kespro, Hatini mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berorganisasi. Selain mendapatkan pengetahuan baru di bidang kesehatan reproduksi perempuan, ia juga berpengalaman dalam merekrut kader Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), mengkoordinir kegiatan BSA di dusunnya, berkoordinasi dengan sesama Kader Kespro, serta berkomunikasi secara intensif dengan PD 'Aisyiyah. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut ia bertemu dengan perempuan lain di desanya, berbicara satu sama lain mengenai peristiwa sehari-hari,

¹ **Penulis:** Desi Rahmawati dan Nadlirotul Ulfa. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

² Plt. Kepala Desa adalah pejabat sementara yang ditugaskan oleh Pemerintah Kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas Kepala Desa sampai masa Pemilihan Kepala Desa yang baru.

program kesehatan reproduksi, juga isu-isu lain yang akrab dengan perempuan desa seperti penyediaan pangan, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Kedekatannya dengan PD 'Aisyiyah telah memberinya bekal untuk menjadi perantara pengetahuan bagi masyarakat. Ia dengan rajin mengonsultasikan permasalahan masyarakat desa kepada PD 'Aisyiyah, bahkan untuk permasalahan yang di luar isu kesehatan reproduksi, misalnya tentang administrasi kependudukan.

Keuletan Hatini dalam aktivitas kader merupakan potensi besar untuk melatih dan mengembangkan aspek kepemimpinan dirinya sendiri. Pada akhir tahun 2018, Hatini yang dikenal tekun mendapatkan kesempatan mengelola kebun gizi 'Aisyiyah, yaitu sebidang tanah yang ditanami dengan sayur mayur. Kebun gizi merupakan proyek percobaan PD 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon yang tengah menjajaki aktivitas ekonomi yang cocok dengan minat perempuan desa. Pada awalnya, aktivitas ini hanya sebatas memberikan manfaat pribadi kepada Hatini berupa kesempatan mengembangkan minat di bidang pertanian. Dari kebun ini, suami Hatini juga menerima penghasilan tambahan karena membantu menggarap tanah tersebut.

Kebun gizi 'Aisyiyah, selanjutnya, memberikan banyak manfaat bagi Hatini dan perempuan desa lainnya, terutama melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) MAMPU 'Aisyiyah pada tahun 2019. KWT memiliki prospek untuk menjadi perekat aksi kolektif perempuan, karena ia adalah wadah alternatif bagi para kader untuk mengembangkan aktivitas positif dan produktif secara berkelompok. Di KWT, para kader melakukan aktivitas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan perempuan desa seperti bercocok tanam dan belajar memasarkan produk pertanian.³ Sebagai orang pertama yang menggarap kebun gizi, Hatini berkesempatan memimpin KWT. Berbekal pengetahuan kepemimpinan yang ia peroleh dari pelatihan kader 'Aisyiyah, Hatini dengan sigap menjalankan tugasnya sebagai ketua KWT, seperti mengatur pembagian tugas anggota dan distribusi hasil tanaman.

"Gimana kalau Bu Hatini aja, kata semua tuh temen-temen, yang jadi ketuanya. Dih kata saya, emoh ah. Eh kamu yang mengelola je, ya kamu ketua gitu ... Tugasnya ya itu ... Kalau udah banyak rumputnya saya...baru sama temen-temen, 'euy ayo hari apa nyabutin rumput'.... Saya tuh dikasih modal, modal dari 'Aisyiyah tuh. Nah kan buat macul, e buat semprot hama, buat apa aja ... Sama itu tu kelompok tuh, 'nih kamu jualin ini, jualin berapa iket'. Dibagi-bagikan dulu ke kelompok. 'Nih kamu jualan ini segini harganya segini'." (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019)

Hatini pun, secara perlahan, semakin terasah soal berpendapat. Ia, yang sebelumnya selalu malu untuk beropini, menjadi lebih berani mengajukan usulan-usulan. Ia adalah orang yang mengusulkan lokasi baru untuk kebun gizi yang lebih representatif, yaitu terletak tak jauh dari kantor desa dan berdekatan dengan pasar desa. Pada tahapan pertama, sekitar awal tahun 2019, Hatini menyampaikan gagasan ini kepada PD 'Aisyiyah untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa. Kemampuan *public speaking* Hatini membantunya dalam mengepalai KWT 'Aisyiyah di desanya. Kemampuan itu membantunya dalam membangun relasi sosial dengan para perempuan di desa dan mempraktikkan pengetahuan tentang kepemimpinan. Warung sayur dan kegiatan *jamiah* (pertemuan ibu-ibu kampung yang biasanya diisi dengan latihan bermusik rebana) menjadi kesempatan baginya untuk bertukar pikiran dan pendapat dengan sesama perempuan di kampungnya.

Hasilnya, dalam Musrenbang Desa tahun 2018, ia berani mengusulkan kebutuhan perempuan untuk dibiayai oleh APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), yaitu pembaharuan peralatan rebana. Bagi masyarakat kampung, rebana memiliki makna yang lebih dari sekedar peralatan musik. Rebana merupakan fasilitas yang dapat mendukung ruang berkumpul bagi perempuan desa, ruang yang tak semata memfasilitasi mereka

³ Pada awal tahun 2019, KWT mengelola lahan kas desa seluas satu bahu (atau sekitar 7.000 m²) untuk ditanami dengan beberapa jenis sayuran seperti terong, cabai dan lain sebagainya. Setelah pertengahan tahun (September 2019), KWT mengembangkan sayap dengan proyek penanaman buah-buahan. Hal itu disusul dengan rencana distribusi di lapak pasar desa untuk tahun berikutnya.

mengekspresikan diri melalui seni yang bernuansa agama, namun juga ruang di mana mereka dapat bertemu satu sama lain dan mendiskusikan masalah sehari-hari.

Hatini yang sebelumnya pemalu, kini juga mampu membagikan inspirasi kepada para perempuan di kampungnya. Aktivitasnya di 'Aisyiyah juga membekalinya keberanian dan kiat-kiat mengumpulkan uang untuk keperluan pendidikan anaknya hingga tingkat perguruan tinggi. Anak perempuan pertamanya kini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

"Ya, itu sih keinginannya ya gimana caranya saya bisa nyekolahkan anak supaya jadi anak lah, jadi anak yang berguna gitu. Ya berpikir kayak gitu sih sejak anak saya masuk SMA. Gimana ya ibu tuh bisa nyekolahkan kamu, bisa nguliahin kamu supaya apa sih, supaya enak kerjanya gitu. [Motivasi] awalnya lihat orang rapat-rapat tuh di luar daerah. Duh pengen ya anak saya jadi begitu tuh. Terus ya ada dorongan dari 'Aisyiyah: kamu bisa pasti, harus usaha, gitu katanya. Pasti bisa [menyekolahkan anak], asal niat aja'." (Hatini, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019)

Sebagai keluarga pertama di dusun yang menyekolahkan anak pada level pendidikan tinggi, Hatini menjadi contoh positif bagi masyarakat sekitarnya. Kini beberapa keluarga di dusunnya mulai menyekolahkan anak mereka di perguruan tinggi juga. Keikutsertaan Hatini dalam kegiatan-kegiatan 'Aisyiyah bahkan menginspirasi putrinya untuk aktif berkecimpung dalam organisasi perempuan tersebut.

"Saya melihat mamah itu positif banget. Kayak jualan sekarang nggak takut. Apapun yang dia lakuin maju sendiri. Di kebun gizi kan dia didorong oleh keluarga dan 'Aisyiyah. Padahal dulu kan gak berani banget di masyarakat. Sekarang Alhamdulillah berani berorganisasi dan bermasyarakat. Saya ikut sekolah kader yang diadakan 'Aisyiyah. Itu kan nginep ya, banyak pelajaran sih dari 'Aisyiyah-nya. Itu tahun 2018. Di situ juga ada kegiatan sosialisasi ke masyarakat mengenai kehidupan ekonominya." (Anak perempuan Hatini, desa penelitian di Cirebon, 3 Maret 2019)

Hatini pun berharap pengalaman pribadinya semakin menginspirasi ibu-ibu dan anak-anak lain di kampungnya untuk ikut berorganisasi dan bermasyarakat.

Srikandi

Kader 'Aisyiyah

Cirebon, Jawa Barat¹

Srikandi atau biasa dipanggil dengan nama Sri (48 tahun) merupakan ibu rumah tangga dan kader 'Aisyiyah. Sri yang memiliki tiga orang anak laki-laki ini adalah pendatang dari kecamatan yang berbatasan dengan area urban di Kabupaten Cirebon. Dia pindah ke kecamatan ini sekitar dua puluh tahun yang lalu ketika menikah dengan suaminya yang berasal dari daerah ini. Dusun tempat suaminya berasal merupakan wilayah yang paling tertinggal di desa. Terletak di atas bukit, daerah ini baru memiliki infrastruktur jalan yang memadai pada periode Kepala Desa (*Kuwu*²) yang terpilih pada tahun 2008.

Di tengah perubahan yang telah dibawa oleh Kepala Desa, Sri masih berhadapan dengan situasi masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah serta tidak mapan secara perekonomian. Di lokasi ini masyarakat juga masih berkebutuhan dengan masalah kebersihan dan kesehatan. Hingga tahun 2019, masih banyak warga desa yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun ada juga yang secara mandiri mengupayakan air tanah dari kawasan sawah untuk dialirkan ke rumah-rumah. Kondisi desa juga diperparah dengan keberadaan penduduk dengan penyakit menular seperti kusta dan tuberkulosis (TB) serta penyakit tidak menular seperti kanker, darah tinggi, dan lain sebagainya.

Sri, yang menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama, mulai bergabung sebagai kader desa sejak tahun 2008 setelah ditunjuk oleh Kepala Desa. Sebelumnya Kepala Desa juga memberikan amanah kepada Sri untuk menjadi kader Posyandu. Walaupun pemilihan ini seakan-akan dikaitkan dengan adanya hubungan keluarga antara Sri dan Kepala Desa, nyatanya, Sri diakui memiliki keuletan dan ketelatenan dalam berorganisasi. Sebagai gambaran relasi antara mereka, Kepala Desa juga merupakan pendatang dari kecamatan lain di Cirebon dan menjadi warga desa penelitian ini setelah menikah dengan sepupu suami Sri. Pemilihan sebagai kader desa lebih berdasarkan pada kemampuan, pengetahuan dan pengalaman Sri selama berorganisasi di Posyandu, dan organisasi lainnya.

"Pada tahun 2008 mulai Ibu [saya] masuk jadi kader. Jadi mungkin kan di sini, jadi Pak Kuwu [Kepala Desa] seolah-olah memilih. Katanya kan kelihatannya katanya Ibu tuh aktif orangnya. Katanya aktif, kiyengan [memiliki niat yang bagus dalam mengerjakan sesuatu] katanya, telaten. Oleh Pak Kuwu [Kepala Desa], Ibu dijadikan sebagai kader. Jadi kader Posyandu dulu." (Srikandi, desa penelitian di Cirebon, 23 Februari 2019)

Sebelum dipilih menjadi kader desa, Srikandi telah dikenal aktif dalam kegiatan komite sekolah maupun terlibat dalam iklan layanan masyarakat.

"Katanya [Kepala Desa], kalau tekun kadang jadi [agenda yang direncanakan dapat berhasil]. Kadang-kadang suka aktif. Ibu kan dulu awalnya jadi komite sekolah pada tahun 2006 di SD. Dulu kan pernah di-shooting juga Ibu sama Yadi Sembako di desa. Jadi, Ibu kan di-shooting. Pas di-shooting nya jadi 'Assalamualaikum, lapor Pak RT, ayam saya itu meninggal kena flu burung gitu'." (Srikandi, desa penelitian di Cirebon, 23 Februari 2019)

Tidak lama setelah dipilih sebagai kader Posyandu, Sri memperluas aktivitasnya, termasuk aktif dalam kegiatan PKK hingga menjadi kader Puskesmas. Sebelum masuknya kegiatan Pimpinan Daerah (PD) 'Aisyiyah Kabupaten Cirebon ke desa ini, ia telah terlibat sebagai Kader Tuberkulosis (TB) Puskesmas. Kegiatan ini memberikan

¹ **Penulis:** Desi Rahmawati dan Nadlirotul Ulfa. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

² Di Kabupaten Cirebon, istilah *Kuwu* merupakan istilah formal untuk menyebut Kepala Desa.

kesempatan baginya untuk tampil dalam video program yang dibuat oleh USAID dan LKNU³. Dalam video berdurasi sekitar 12 menit tersebut, sosok Sri mendapatkan sorotan sebagai kader perempuan desa yang memiliki kepedulian tinggi kepada masyarakat yang terpapar TB.

Dia semakin mendapatkan kesempatan ketika pada tahun 2014 PD 'Aisyiyah hadir di desanya. Menyusul permintaan PD 'Aisyiyah kepada Kepala Desa untuk meminta perempuan yang berpengalaman sebagai kader kesehatan reproduksi (Kader Kespro), Sri kembali mendapatkan kesempatan baik. Kepala Desa, melalui sekretaris desa, merekomendasikan dia untuk menjadi salah satu kader kesehatan reproduksi (Kader Kespro) 'Aisyiyah. Berbeda dengan Kepala Desa yang memilihnya menjadi kader Posyandu pada tahun 2008, kali ini Kepala Desa yang memilihnya adalah Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa tersebut adalah pejabat sementara yang ditugaskan oleh pemerintah kecamatan untuk menjalankan tugas-tugas Kepala Desa sampai masa Pemilihan Kepala Desa yang baru.

Dalam peran yang baru, Sri memiliki tugas antara lain mensosialisasikan isu-isu dan agenda edukasi kesehatan reproduksi. Ia juga bertugas merekrut kader dan mengkoordinasikan pertemuan BSA (Balai Sakinah 'Aisyiyah⁴), yaitu kelompok perempuan dari kalangan ekonomi lemah yang berpartisipasi dalam edukasi kesehatan reproduksi. Pada awalnya peran ini tidaklah mudah dijalankan, dia mengaku kesulitan memahami pengetahuan kesehatan, khususnya ciri-ciri penyakit dan cara penanganannya. Namun kegiatan yang intens bersama PD 'Aisyiyah telah membantunya memahami pengetahuan baru, khususnya tentang kesehatan organ vital perempuan.

"Awal-awal kan Ibu [saya] tidak ngerti, hanya bisa menimbang [bayi], menimbang, menimbang aja terus. Menimbang [bayi] itu tidak mengerti [tidak paham dengan pengetahuan kesehatan]. Sampai kadang-kadang suka mengikuti kegiatan pelatihan Desa Siaga5 juga nggak ngerti. Setelah akhirnya pada tahun 2014 kalau nggak salah 'Aisyiyah masuk 2014. Yang namanya kespro [kesehatan reproduksi] awal-awal kan tidak mengerti. Setelah dengan adanya pertemuan dengan BSA rutin dari 'Aisyiyah MAMPU ya terus kan ibu pun bertanya apa itu tentang kespro. Awalnya kan ibu nggak ngerti apa itu kanker serviks, tahunya hanya [melihat] di televisi. Setelah mengikuti program dari 'Aisyiyah MAMPU dan akhirnya tahu bahwa kanker serviks itu sangat berbahaya." (Srikandi, desa penelitian di Cirebon, 23 Februari 2019)

Sebagai kader Kespro, tanpa dukungan honorarium dan biaya transportasi, Sri kerap mengedukasi perempuan di desanya tentang kesehatan reproduksi. Ia juga sering kali melakukan kunjungan kepada pasien untuk menjelaskan penyakit yang mereka derita, serta memotivasi mereka untuk berobat. Sri menceritakan bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah bentuk panggilan nurani. Ketika mendengar orang sakit, ia teringat pada ayah kandungnya yang meninggal dunia setelah mengalami batuk yang menahun tanpa pernah tahu apa penyebabnya. Memori dan pengalaman pahit tentang diri dan keluarga selalu terpahat di benak dan hati Sri, tentang penderitaan ayahnya dan situasi sulit yang dihadapi orang sakit. Bagi Sri, kenangan tersebut adalah alasan terbesar yang mendorongnya untuk menjadi relawan kesehatan. Sri juga mengatakan bahwa posisinya sebagai kader memberikan kewajiban moral padanya untuk bekerja.

"Engga tau, hanya Ibu [saya] tuh kayak punya, merasa kayak punya kewajiban itu. [Kalau] punya kewajiban terasa kan, kalau belum dilaksanakan perasaan tuh kayak penasaran gitu. Punya kewajiban. Jadi kita tuh sebagai kader juga walaupun gak ada gajinya [tetapi merasa bahwa] berarti saya sudah ditunjuk. [Jadi], harus punya dermawan. Kader itu ya singkatan: kegiatan-dermawan." (Srikandi, desa penelitian di Cirebon, 23 Februari 2019)

³ Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama.

⁴ BSA (Balai Sakinah 'Aisyiyah) adalah kelompok perempuan di akar rumput yang beranggotakan perempuan usia subur dari golongan ekonomi lemah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan perempuan untuk melakukan penjangkauan dan advokasi. Bagi 'Aisyiyah, kelompok ini merupakan target pemberdayaan perempuan di desa.

⁵ Program Siaga (akronim dari Siap, Antar, Jaga) pada awalnya merupakan program pemerintah untuk mendorong kesiagaan keluarga dan desa dalam mendukung perempuan yang akan melahirkan memperoleh kemudahan mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat.

Empatinya yang besar terhadap orang sakit didukung penuh oleh PD 'Aisyiyah. Dukungan tersebut membuat Sri semakin bersemangat untuk memperkuat aktivitasnya di Puskesmas, yang telah merajut kerja sama dengan 'Aisyiyah, untuk terlibat dalam berbagai agenda kesehatan lainnya seperti: Kader Siaga (Siap, Antar, Jaga, yaitu program Puskesmas untuk meningkatkan kepedulian laki-laki di pedesaan terhadap keperluan istri melahirkan), Kader PMO (Pengawas Minum Obat), Kader TB, Kader Diare, Kader Kusta, Kader Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Kader Paliatif Care (Program 'Aisyiyah dan Puskesmas untuk pasien perempuan yang menderita kanker stadium akhir), Kader Sub-KB (Program dari Bidan), Kader PTM (Penyakit Tidak Menular), dan akan mendaftarkan diri sebagai Kader Prolanis (lansia) yang sedang direncanakan akan dibentuk di desa.

Keterlibatannya dalam banyak agenda kesehatan yang dirancang oleh Puskesmas maupun 'Aisyiyah menjadikan Sri semakin bersemangat mengunjungi penduduk. Kali ini, hampir setiap hari, Sri mengunjungi masyarakat dengan ragam penyakit, berjalan kaki dan tanpa uang transportasi dari organisasi. Ia telah menjadi tempat bertanya bagi masyarakat desa yang mengalami keluhan kesehatan. Ia juga dengan sigap memeriksa para perempuan desa yang khawatir dengan tumbuhnya benjolan pada payudara, memotivasi mereka untuk pergi ke Puskesmas, menemani mereka ke Puskesmas atau bahkan rumah sakit besar di kota. Ia bahkan mendapatkan kepercayaan dari bidan dan dokter Puskesmas untuk membawakan obat dan memastikan para pasien meminum obat sesuai aturan.

Dalam pandangan mantan bidan desa, Sri merupakan sosok teladan.

"Kalau untuk Bu Srikandi, dia gak punya pendidikan tinggi, tapi niat untuk belajarnya gede [besar]. Beliau itu ada kemauan yang kuat, 'Saya hanya bisa beribadah di sini', gitu. Siapapun beliau adalah pemotor yang mau peduli tentang lingkungan, tentang keberadaan kaum yang ada di sekitarnya, dan untuk mengajak seperti yang beliau itu kan perlu proses. Jangankan seperti Bu Sri, jadi kader posyandu aja kadang-kadang orang desa itu, sangat susah loh bu, rasa takutnya besar. Rasa takutnya [karena], 'ah engga ah, saya orang tidak berpendidikan', itu tetep ada. Tapi kalau sudah terbiasa dengan perkumpulan ke desa kayak gitu, dia punya ada niat untuk belajar, terus ada niat ingin tahunya besar, nah berarti dia akan memotivasi diri sendirinya akan kuat." (Bidan Koordinator Puskesmas Kecamatan, desa penelitian di Cirebon, 25 Februari 2019)

Dedikasi yang tinggi sebagai warga yang peduli dengan kesehatan menjadikan Sri semakin dikenal oleh masyarakatnya. Pada tahun 2018, tanpa sepengetahuannya, ia dipilih menjadi Ketua RW dalam rapat yang hanya dihadiri oleh para laki-laki. Puncak dari pencapaiannya saat ini adalah kesempatan sebagai satu dari enam belas perempuan inspiratif se-Indonesia yang diundang dalam acara *International Women's Day* di Istana Negara pada 8 Maret 2019. Dalam kegiatan yang bertema "Mendengarkan Perempuan dari Arus Bawah" yang langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo, ia menjadi satu-satunya perempuan dari Kabupaten Cirebon dan satu-satunya wakil dari 'Aisyiyah se-Indonesia. Menjelang akhir tahun 2019, ia berhasil mendapatkan prestasi berupa Juara II Tingkat Kabupaten Cirebon Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Berprestasi. Memang, raihan tersebut menunjukkan hasil dari kerja keras, komitmen, dan semangat untuk berbagi pengetahuan. Keberhasilannya itu bukanlah pencapaian akhir dari seluruh kerja keras yang pernah ia lakukan. Prestasi ini, malahan, semakin memacu semangat Sri untuk berbuat lebih kepada para perempuan dan masyarakat di desanya.

Sri bertekad untuk selalu melanjutkan sosialisasi kesehatan yang telah ia mulai. Ia akan terus membimbing perempuan di desanya agar semakin paham dengan kanker serviks, kanker payudara, dan penyakit organ vital lainnya, serta pengetahuan tentang KB. Sri ingin kepeduliannya bermuara pada meningkatnya kepedulian dan kualitas kesehatan masyarakat di desanya.

Sulis

Anggota FAKTA-DAMAR

Tanggamus, Lampung¹

Sulis (45 tahun) merupakan anak tertua dari tiga bersaudara, yang sejak lahir tinggal di salah satu desa penelitian di Kabupaten Tanggamus. Sejak kecil, Sulis sudah membantu perekonomian keluarganya untuk beternak kambing, menjual kelapa, sampai bertani singkong dan sagu. Selain membantu perekonomian keluarga, di masa sekolah Sulis juga sudah aktif dalam organisasi, terutama asosiasi RISMA (Remaja Islam Masjid).

Setelah lulus SMA pada tahun 1994, Sulis memutuskan untuk pindah ke Tangerang dan menjadi buruh di perusahaan elektronik. Pada tahun-tahun tersebut, menurut Sulis, ada tren di desa untuk merantau, terutama untuk bekerja di Jakarta. Pada waktu itu banyak orang pergi merantau karena diajak kenalannya yang sudah bekerja di kota besar. Tren merantau ini muncul karena pada saat itu tidak banyak kesempatan bekerja di desa. Sulis kembali ke desa pada tahun 1997, dua tahun setelah dia menikah dan memiliki seorang anak. Namun, ia bercerai dengan suaminya 10 tahun kemudian karena kerap tinggal berjauhan. Sulis kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki dari desanya.

Sesudah kembali ke desa, Sulis aktif mengadakan kegiatan musik untuk anak-anak di musala. Oleh karena komitmen Sulis kepada anak desa, ia diminta oleh Kepala *Pekon* (sebutan untuk desa di Tanggamus) yang terpilih tahun 2006 untuk menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra).

“Setelah melihat saya, menampilkan anak-anak untuk hadroh atau merebanaan itu, pokoknya membimbing anak-anak itu di musholla sini ini. Musholla ini jadi pertama kali itu ... Beliau [Kepala Desa] nyari saya, saya nggak kenal sama beliau gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Saat itu, Kepala Desa juga meminta kesediaan suami Sulis dan menekankan bahwa menjadi Kasi Kesra akan berhadapan dengan permasalahan warga yang tidak hanya dengan perempuan, tetapi juga dengan laki-laki. Suaminya pun mendukung dan mengizinkan Sulis untuk bekerja sebagai aparatur desa. Sejak awal menjabat, Sulis mengaku banyak belajar dari Kepala Desa.

“Sadar nggak sadar, sudah banyak sekali ilmu yang diberikan Kepala Pekon ke saya. Sadarnya ya dari prakteknya, tapi kalau tidak sadarnya ya dari obrolan-obrolan karena ya Alhamdulillah sering diajak ngobrol, dan dari situlah saya curi ilmunya. Masalah usaha pun seperti itu, dari obrolan dengan Pak Kepala Pekon itu saya melahirkan warung sembako.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Sampai tahun 2019 ini, Sulis sudah menjabat selama 13 tahun menjadi Kasi Kesra dan tidak pernah diganti oleh Kepala Desa, walaupun Sulis sudah beberapa kali meminta untuk diganti karena merasa berat dengan tanggung jawab yang diembannya. Hal ini dikarenakan Kepala Desa percaya dengan kemampuan Sulis dan berpikir bahwa tidak banyak perempuan di desa yang mampu menggantikannya.

¹ **Penulis:** Azifah R. Astrina dan Nadlirotul Ulfa. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

“Kebetulan di Pekon itu sudah beberapa tahun saya ya. Itu saya minta ganti, ‘tolong sih diganti saya, saya udah repot, apa-apa saya’, apa-apa saya gitu. Cuma kekeh, Pak Pekon pun seperti itu, ‘wis Mbak Sulis wae [sudah Mbak Sulis saja]’.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Sebagai aparatur desa, gaji Sulis hanya dibayarkan setiap enam bulan sekali karena dana yang diterima desa diprioritaskan untuk pembangunan desa terlebih dahulu. Hal ini sudah disepakati sejak awal, dan aparatur desa yang lain pun sepakat. Namun, jika suatu waktu ada aparatur desa yang membutuhkan, maka boleh mengajukan penarikan gaji lebih awal.

Sulis secara sosial memiliki peran yang cukup penting di masyarakat sebagai “tempat curhat”. Posisinya sebagai Kasi Kesra mengharuskannya bersinggungan dengan masyarakat.

“Curhat itu dari [mulai] saya di sini itu satu periode dengan bapak itu sudah mulai. Karena memang kerja saya itu dengan masyarakat. Saya membangun dengan masyarakat. Jadi ibaratnya kalau kita kerja hanya di kantor aja mereka kan nggak diperhatikan sementara mereka itu butuh perhatian, butuh perhatian banget mereka itu. Nah saya mendekati ke mereka ya. Alhamdulillah selama 13 tahun saya bagian kemasyarakatan nggak pernah digeser sama Pak Pekon.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Selain itu, Sulis juga sering menjadi sumber informasi masyarakat desa terkait dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Pengalamannya merawat sang ibu yang pernah terkena kanker payudara sebelum akhirnya meninggal pada tahun 2015, menjadikannya rajin mencari informasi terkait jaminan kesehatan.

“Saya beranian diri untuk mencari informasi ke BPJS, karena memang BPJS informasinya tidak langsung ke desa. Tetapi kalau minta sosialisasi dari pekon [desa], ya bisa. Nah dari situ saya tau cara-cara ngurusnya seperti ini. Sedangkan masyarakat masih banyak yang takut untuk datang ke rumah sakit dan tanya tentang BPJS, jadi mereka justru datang ke saya.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Sulis juga dikenal cukup aktif mempromosikan program-program kesehatan yang digagas desa maupun Puskesmas. Salah satunya adalah program Bank Darah yang bekerja sama dengan bidan desa. Bank Darah ini dilatarbelakangi kurangnya ketersediaan darah di desa saat dibutuhkan, dan masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui golongan darah mereka. Pendanaan Bank Darah ini diambil dari alokasi Dana Desa. Tantangan terbesar dari program ini adalah banyaknya masyarakat yang masih takut akan jarum suntik, bahkan bapak-bapak.

Perhatiannya terhadap kesehatan masyarakat membuatnya ditunjuk Kepala Desa untuk mengikuti kegiatan DAMAR. Sebagai banyak warga desa ini, Sulis terbuka terhadap pihak yang membawa pengetahuan baru, sikap yang dibentuk oleh latar belakang warga desa sebagai transmigran. Sulis pertama kali mengikuti kegiatan ini pada tahun 2007, dan sejak saat itu cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan DAMAR baik di desa, maupun di Bandar Lampung.

“Saya acungin jempol untuk DAMAR. Benar-benar telaten [sabar] mengajari kita pengertian gender. Peserta pelatihannya bisa ngerti sekali, seneng banget saya sebagai peserta, kasih jempol untuk DAMAR.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Setelah mengikuti kegiatan DAMAR seperti *workshop* tentang kesadaran gender dan kesehatan perempuan, perubahan terjadi tidak hanya pada diri Sulis, tetapi juga pada suaminya. Perubahan yang paling mendasar

adalah adanya pemahaman atas pentingnya kesetaraan gender. Sebelumnya, Sulis mengakui bahwa suaminya masih berpikir bahwa laki-laki itu yang nomor satu, baru kemudian perempuan di nomor dua.

“Perubahannya banyak sekali, yang memang hal yang belum kita tau artinya. Kalau dulu kan memang laki-laki itu nomer satu iya kan, saya lho laki-laki apa-apa nanti perempuan. Tapi Alhamdulillahnya karena memang suami saya mendukung dan memang dia di bidang pendidikan, banyak baca gitu jadi seperti itu tau, dan merestui dengan kegiatan saya apapun di mana pun itu restu dari suami. Hanya kita mau ke sana melangkah ya tetep ijin gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Pandangan tersebut berubah melalui materi yang diberikan DAMAR. Sulis perlahan dapat menceritakan pada suaminya mengenai bagaimana memahami kesetaraan gender. Khususnya, dia menjelaskan bagaimana peran perempuan dan tugas-fungsi perempuan yang melekat di masyarakat saat ini adalah terkonstruksi secara sosial, dan sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama-sama penting. Pendekatan ini tentunya dilakukan secara perlahan, didukung dengan latar belakang pendidikan Sulis dan kegemarannya membaca buku. Suaminya pada akhirnya merestui seluruh kegiatan Sulis, sejauh kegiatan tersebut positif.

“Dampak ke saya itu oh ternyata kita ini sama lho kerjanya dengan laki-laki itu sama. Hanya bedanya ya kita menyusui dan lain-lain. Bagi saya pribadi sih karena memang saya itu mungkin dari gadis wis tomboy ibaratnya laki perempuan sama gitu ya jadi pekerjaan laki itu tuh nek menurut saya itu ya sama aja. Iya orang saya di rumah sekarang pun ya walaupun saya di balai desa sekarang kadang-kadang banyaklah yang mereka image-nya saya di pekon saya harus begini-begini, ya enggak gitu. Saya kalau misalnya belanja ya saya bawa sendiri gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Selain bertambahnya pengetahuan terhadap gender, Sulis mengaku mendapatkan manfaat dalam terkait kepemimpinan perempuan. Walaupun sudah lama aktif dalam banyak organisasi, Sulis merasa bahwa pelatihan kepemimpinan DAMAR membuatnya lebih berani serta lebih bisa berbagi dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Memengaruhi [pelatihan dari DAMAR], memengaruhi banget. Memengaruhi artinya saya merasa saya bisa berani, bisa berbagi dengan masyarakat, bisa bermanfaat dengan masyarakat. Memang ini dari DAMAR kalau saya itu. Belajar dari DAMAR gitu.” (Sulis, desa penelitian di Tanggamus, 12 Juli 2019)

Menurut Sulis, pelatihan DAMAR membuat jiwa kepemimpinannya lebih matang, karena itulah mendorong Sulis untuk maju dalam Pemilihan Kepala Desa pada 2020 dan akan berhadapan dengan Kepala Desa yang memilihnya menjadi Kasi Kesra. Walaupun pemilihan ditunda karena pandemi COVID-19, keinginan Sulis masih kuat. Sulis, melalui pelatihan DAMAR, memperkuat keterampilan kepemimpinannya sendiri dan meluaskan kewajibannya di kampung, dari Kasi Kesra yang dipercaya ke penasihat kunci mengenai pelayanan sosial pemerintah, dan advokat untuk pemahaman kesehatan. Keinginan Sulis untuk menjadi Kepala Desa membuktikan kemajuan di jalan pemberdayaan politik yang begitu besar. Ke depan, Sulis akan terus membagikan pemahaman mengenai kesetaraan gender dan mengabdikan pada masyarakat.

Mariana

Koordinator Desa FAKTA-DAMAR

Tanggamus, Lampung¹

Mariana (47 tahun) merupakan Kepala Dusun (Kadus) perempuan satu-satunya di sebuah desa di kabupaten Tanggamus. Mariana yang lulusan SMA ini diangkat menjadi Kadus oleh Kepala Desa, menggantikan ayahnya pada tahun 2006. Suami Mariana bekerja sebagai penjual gorden yang berjualan ke luar desa, bahkan hingga ke Kota Bandar Lampung. Akibatnya, Mariana sering ditinggal oleh suaminya di rumah beserta dua anaknya. Putra Mariana berkuliah di Bandar Lampung, sementara putrinya masih berada di bangku SD. Selain menjadi bagian dari perangkat desa, Mariana juga berperan sebagai ibu rumah tangga dan guru PAUD sejak tahun 2008.

Desa Mariana merupakan desa transmigran, di mana sebagian besar penduduk berasal dari Jawa Tengah. Latar belakang tersebut membuat sikap terbuka terhadap pihak luar yang membawa pengetahuan baru ke desa dan kultur berorganisasi yang kuat. Semenjak berperan sebagai Kadus, Mariana menjadi perempuan yang aktif di desa karena harus mengikuti kegiatan seperti PKK, Posyandu, dan rapat-rapat pemerintah desa. Dalam perannya sebagai Kadus perempuan, ia sering menjadi tempat curhat perempuan di desa.

“Semenjak jadi Kadus, ya. Saya juga sering keliling, maksudnya ada mintain apa terus duduk. Karna Kadusnya perempuan, ya jadi apa-apa enak. Cuma sama-sama orang gak punya, ya jadi ngasih sarannya sekedarnya saja. Sama-sama ekonominya rendah. Sama-sama ngajak ke badan [diri sendiri] kita juga ya. Cuma kita ya itu ngasih masukan-masukan. Ibu-ibu di sini terbuka semua kok sama saya.”
(Mariana, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

Selain permasalahan ekonomi, Mariana sering dimintai saran terkait cara mendidik anak. Mariana dikenal sebagai ibu yang berhasil mendidik anak di rumah, karena kedua anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan hormat kepada orangtua. Di kala banyak usia remaja yang nakal, anak pertamanya justru berprestasi di sekolah dan mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi.

“Iya, terutama curhat masalah ekonomi, terus masalah anak, gimana caranya mendidik anak. Di sini anak saya jadi percontohan anak-anak di sini. Padahal saya mendidiknya biasa aja. Tergantung anaknya apa ya. Terus kalau masalah ekonomi ya, kok penghasilan saya segini tapi masih kurang. Kadang kita sesama perempuan juga ikut sedih, ikut merasakan juga.” (Mariana, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

Sebagai Kadus sekaligus perempuan yang dijadikan contoh untuk perempuan lainnya tidak membuatnya berhenti belajar. Hal tersebut justru memotivasi Mariana untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk itu, pada saat FAKTA-DAMAR masuk ke desa dan menawarkan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan, Mariana tertarik bergabung dan suami mendukung keputusannya.

“Saya pengen jadi orang pintar. Gak minder-minder amat kalau bergaul dengan teman-teman yang lebih dari kita. Soalnya kita kan sudah bergabung dengan aparatur Pekon [desa] kan orang-orangnya dari kecamatan.” (Mariana, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

¹ **Penulis:** Azifah R. Astrina dan Nadlirotul Ulfa. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

Mariana pertama kali mengikuti FAKTA-DAMAR di kongres pertama Gerakan Perempuan Lampung (GPL) di Bandar Lampung tahun 2008. GPL merupakan inisiasi DAMAR sebagai upaya penguatan serikat perempuan di enam kabupaten/kota se-Lampung. Serikat perempuan di Tanggamus dikenal dengan FAKTA, yang bekerja sama dengan DAMAR untuk melakukan advokasi pemenuhan hak dasar perempuan, salah satunya terkait Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSAR).

Setelah mengikuti kongres tersebut, Mariana sempat berhenti mengikuti kegiatan FAKTA-DAMAR. Pada saat itu belum banyak bantuan dana pemberdayaan perempuan yang masuk ke Lampung, sehingga kegiatan pun tidak banyak terselenggara hingga level kabupaten. Mariana mengikuti kegiatan kembali selang lima tahun kemudian, setelah dihubungi oleh pengurus FAKTA. Sekitar tahun 2013, DAMAR telah merancang pendidikan gender untuk enam serikat perempuan. Mariana salah satu yang mendapatkan manfaat rangkaian pendidikan tersebut.

Pelatihan pertama diikuti oleh Mariana pada 2013 bertema “Adil-Gender dan Anti-Kekerasan” dan “Analisa Sosial Berperspektif Feminisme”. Selepas mengikuti pendidikan kedua tersebut, Mariana diangkat menjadi anggota FAKTA-DAMAR. Setelah mengikuti pelatihan ketiga, Mariana dijadikan kader FAKTA-DAMAR. Pada tahap keempat, Mariana mengikuti pelatihan mengenai “Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Organisasi”. Kelulusannya pada tahap keempat ini membuatnya disebut sebagai guru kader.

Menurut Mariana, pendidikan tersebut membantunya untuk memahami kesetaraan gender dan persoalannya. Selain itu, kegiatannya bersama FAKTA-DAMAR memperluas jaringan teman yang saling berbagi pengalaman.

“Tentang kesetaraan gender [pendidikan yang didapat]. Alhamdulillah saya dapat ilmunya dari situ. Banyak teman dari Lampung Tengah, Lampung Timur. Abis itu kita bagikan ke kelompok-kelompok itu. Terus kita didampingi sama FAKTA dan DAMAR, juga sama UNILA [Universitas Negeri Lampung].”
(Mariana, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

Pada tahun 2015, FAKTA-DAMAR yang didanai MAMPU membuka pelatihan gender di desa Mariana yang dipilih sebagai wilayah dampingan. Mariana menjadi koordinator untuk menyelenggarakan empat kelas, yaitu kelas ibu, kelas ayah, kelas remaja putri, dan kelas remaja putra. Ia cukup telaten dalam memperkenalkan FAKTA-DAMAR dan programnya ke warga sekitar.

“Harus telaten. Dulunya pakai undangan formal. Door-to-door memperkenalkan ada FAKTA-DAMAR. Lama-lama setelah banyak ya dari mulut ke mulut. Harus sabar awalnya, telaten harus mempromosikan bahwa DAMAR itu ilmunya bagus untuk kita, baru kita tularkan ke tetangga. Ya lama-lama mereka berangkat sendiri. Kita juga kasih materi. Jadi pakai kejadian sehari-hari, gitu.”
(Mariana, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

Mariana mengaku banyak perubahan yang terjadi dalam rumah tangganya, terutama yang terkait dengan pembagian peran. Pada awalnya terdapat anggapan bahwa suami bertugas mencari uang, sedangkan istri bertugas mengurus rumah dan mendidik anak. Namun hal tersebut berangsur berubah, ilmu yang ia dapatkan dari pelatihan-pelatihan dibagikan kepada suami dan anak-anaknya untuk menyadarkan pentingnya pembagian peran dalam rumah tangga.

“Alhamdulillah untuk pribadi saya individu banyak sekali perubahan, tadinya kita apa ya, untuk di dalam rumah tangga, taruhlah suami saya yang tidak ingin masak itu kita berbagi peran, gantian masak, nyuci. Kalau aku pulang sore dia yang nyuci, bisa nyapu juga. Berbagi peran lah, kerja sama-sama. Tidak membedakan mana pekerjaan perempuan mana laki-laki.” (Mariana, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

Melihat dampaknya yang baik bagi keluarga, Mariana mendapatkan dukungan dari suami, serta mulai mengajak anak laki-laki pertamanya untuk mengikuti kelas remaja putra. Tujuannya untuk menanamkan pendidikan gender pada putranya agar dia mementingkan kesetaraan gender.

“Untuk cara mendidik anak juga, ya tadinya anak saya gak mau cuci piring sendiri. Setelah ikut kegiatan remaja putra, ya kerjaan ibunya ya dibantu. Ilmunya sangat berarti bagi diri kita sendiri baru kita tularkan ke teman-teman.” (Mariana, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

Selain di lingkup keluarga, program-program FAKTA-DAMAR telah membantunya meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat desa. Mariana mengaku menjadi lebih percaya diri saat memberi sambutan dalam rapat-rapat desa, seperti PKK, Posyandu, dan rapat di desa lainnya.

“Untuk ini, ya setelah ikut FAKTA-DAMAR itu banyak perubahannya. Dari kita pelatihan, sampai praktek di lapangannya. Untuk diri kita sendiri ilmunya bermanfaat benar. Sebelum ikut FAKTA-DAMAR itu kuper [kurang pergaulan], kurang PD [percaya diri]. Setelah ikut FAKTA-DAMAR, setelah ikut pelatihan-pelatihan itu aku jadi PD. Ngomong aja kadang gimana, kalau pertemuan-pertemuan itu kan kita ngasih sambutan, ya. Kadang dari lingkup kecil aja dari PKK Dusun kan agak ini, gitu. Tapi setelah ini ya agak-agak ada perubahan, gitu.” (Mariana, desa penelitian di Tanggamus, 5 Juli 2019)

Berkat keterlibatannya dengan FAKTA-Damar, Mariana mempunyai pengetahuan mengenai kesetaraan gender. Ia bahkan telah menerapkan wawasan yang ia dapat di dalam rumah tangga sendiri dengan membuat pembagian tugas rumah dengan suami. Sebagai Kadus, Mariana juga menjadi sosok perempuan yang berempati dan berbagi pemahaman tentang gender dan keadilan.

Mariana berharap kegiatan pemberdayaan perempuan dari FAKTA-DAMAR tidak akan berhenti, agar dapat selalu meningkatkan ilmu perempuan-perempuan di desa. Ia juga menginginkan semakin banyak perempuan-perempuan di desa mengikuti kegiatan FAKTA-DAMAR. Namun, kendala untuk mengajak perempuan adalah izin para suami, tidak sedikit suami yang melarang istri-istri mereka bergabung dalam kegiatan tersebut. Untuk melewati tantangan ini, Mariana terus-menerus menularkan ilmu yang didapatkannya di semua ranah, dari keluarganya sendiri, di dalam rapat, acara-acara desa, ataupun pada saat belanja di warung.



Bagian 5:

Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan

Tari

Wakil Ketua Serikat Perempuan Independen Desa dan Ketua Layanan Berbasis Komunitas Labuhan Batu, Sumatera Utara¹

Tari merupakan Wakil Ketua SPI (Serikat Perempuan Independen) Desa yang juga merangkap sebagai Ketua LBK (Layanan Berbasis Komunitas) Desa. Perempuan yang berusia 45 tahun ini mulai bergabung dengan SPI sejak tahun 2015 karena diajak oleh tetangganya yang saat itu menjabat sebagai Ketua SPI. Beberapa perubahan mendasar yang dialami oleh Tari selama menjadi anggota SPI, antara lain menjadi lebih berani menyuarakan pendapatnya di muka umum, lebih merasa memiliki semangat kepemimpinan, dan lebih baik dalam bekerja dalam kelompok.

Seperti banyak warga desanya, Tari merupakan pendatang dari Bandung. Pada tahun 2004, Tari mengikuti orang tuanya yang sudah pensiun dari pekerjaan mereka sebagai buruh di perkebunan sawit. Suami Tari yang berasal dari Pangkajene di Sumatera Utara bekerja sebagai penjahit keliling. Tari sendiri sebelum aktif dalam SPI adalah seorang ibu rumah tangga.

Sebelum 2015, tidak ada ketertarikan sedikitpun bagi Tari untuk terlibat dalam SPI, walaupun rumahnya berhadapan dengan salah satu pendiri SPI Desa. Ia menjelaskan bahwa keenggannya untuk bergabung awalnya dikarenakan anggapan umum yang menyebar bahwa organisasi perempuan di desa hanya digunakan untuk bergosip, tanpa rencana kerja dan tujuan yang jelas.

“Pengajian di sini dulu saya suka diajak-ajak, tapi saya nggak mau, males. Kadang kalau iseng saya jawab ‘apa dampaknya sama aku kalau ikut? Paling yang ikut pengajian yang sok-sok sosialitasnya sini.’ Kadang kan kita nggak nyaman gitu. Tapi itu dulu, sekarang saya sudah ikut pengajian. PKK juga gitu, diajak-ajak tapi saya males, saya jawab ‘saya belum cinta sama PKK.’ Tapi kalau PKK sampai sekarang saya nggak ikut. Ngapain dateng PKK cuma kumpul, ngeteh, ngobrol, terus pulang.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Tari juga dikenal sebagai orang yang tertutup dan jarang bergaul dengan masyarakat sebelum mulai berorganisasi (Soemiyati, Anggota SPI Desa, 13 Oktober 2019). Akan tetapi perlahan-lahan berubah setelah bergabung dengan SPI Desa. Awalnya Tari hanya iseng mengikuti kegiatan serikat, namun lambat laun ia merasa kegiatan SPI sejalan dengan kata hatinya. Atas bujukan temannya yang juga anggota SPI untuk mengikuti kegiatan SPI, Tari merasa ada urgensi dan ilmu pengetahuan baru yang bisa ia dapatkan dengan bergabung bersama SPI Desa.

“Pertama kali dateng kegiatan SPI karena diajak dan ya, saya pikir nggak rugi-rugi banget dapet kue dan kalau kegiatannya di luar desa bisa naik mobil. Tapi kemudian lama-lama kok saya paham sama materinya, dan saya suka.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Materi awal yang diberikan oleh SPI kepada anggota baru, seperti Tari, berupa pengantar mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan sosialisasi mengenai UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Pengetahuan baru tersebut semakin menyentuh hati Tari, ia pun mulai aktif dalam SPI dan berani berbicara saat diskusi internal SPI Desa. Keberanian Tari dalam diskusi

¹ **Penulis:** Azifah R. Astrina dan Smita Tanaya. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

tersebut mendorongnya untuk berani berbicara di forum yang lebih besar lagi, seperti musyawarah dusun (Musdus) dan desa (Musdes), bahkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada tahun 2016. Di musyawarah tersebut, sebagai anggota SPI Desa, Tari aktif mendorong dan memantau proses penyusunan peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan anak.

“Dulu kami diwajibkan datang musyawarah dusun awalnya sama Kak Liana, Ketua kami. Dan kalau datang harus ngomong. Ngapain datang duduk doang, katanya. Aku dulu males gitu ya datang gitu-gitu, apalagi ngomong. Males dan nggak peduli. Kadang mau ngomong, tapi mulut nggak bisa ngomong udah gemetar duluan, dan percuma gitu mikirnya kalau mau ngomong. Tapi kemudian ingat pesan Kak Liana. Akhirnya pelan-pelan berani ngomong. Misalnya pas sesi tanya jawab sekarang ya langsung tanya aja, tapi sebelumnya kita bekalin diri dengan baca undang-undang gitu. Minimal garis besar dan nomor undang-undangnya kita tahu, jadi saat orang dengar mereka pikir kita sudah paham.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Dengan data tentang kasus kekerasan di desa yang dikumpulkan SPI menguatkan kerja sama antara SPI dan pemerintah desa untuk mendirikan LBK (Layanan Berbasis Komunitas) Desa di tahun 2016, sampai pada disahkannya Perdes No. 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selama proses penyusunan Perdes, Tari secara aktif menghubungi Ketua BPD dan Kepala Desa untuk memastikan penyusunan Perdes dilaksanakan dengan baik oleh aparat desa. Semenjak SPI Desa melakukan sosialisasi pembentukan LBK, Tari diangkat menjadi Ketua LBK Desa. Dalam mengemban posisi ini dia aktif mengikuti forum-forum desa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.

“Awalnya gini dulu, dulu lama kita nggak ... maksudnya bergerak sendiri ya organisasi kalau ada korban apa kalau nggak ke rumah ... Dulu kalau waktu belum ada Perdes kan kayaknya kita bergerak sendiri gitu, lama-lama kan kok udah dikenal ini.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Dalam menjalankan peran sebagai paralegal di LBK, Tari menyaksikan perubahan di masyarakatnya setelah pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hak perempuan ditingkatkan. Walaupun dulu perempuan-perempuan desa lebih memilih curhat tentang kekerasan yang mereka alami, termasuk beberapa perempuan dalam keluarga Tari sendiri, sekarang mereka lebih berani melaporkannya. Setelah adanya Perdes 2018 ini, Tari dan teman-teman SPI merasa lebih didukung oleh pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan.

“Dulu kalau waktu belum ada Perdes kan kayaknya kita bergerak sendiri gitu, lama-lama kan kok udah dikenal ini korban ini tambah ada yang berani ngelapor. Jadi tambah ada yang tambah dikenal, tambah banyak yang lapor, tambah kayak oke kayaknya aku kalau gini ada yang bantu gitu. Lama-lama kok kayaknya perlu nih desa peduli gitu.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Keaktifan Tari dalam organisasi kemasyarakatan merupakan suatu pencapaian tersendiri bagi dirinya, sebelumnya ia merasa tidak cukup aktif dalam kegiatan sosial. Sebelum bergabung dengan SPI tidak banyak warga yang mengenal keseharian Tari. Warga sempat terkejut saat beberapa tahun yang lalu ketika Tari melahirkan putranya, karena warga tidak mengetahui Tari sedang hamil. Sebaliknya, saat ini hampir seluruh warga desa, mengakui Tari sebagai salah satu tokoh perempuan desa.

Tari memiliki kecakapan berpikir dan berbicara yang lebih unggul daripada anggota SPI Desa lainnya. Tentunya kemampuan tersebut baru terasah ketika Tari bergabung dengan SPI Desa. Tari merasa bergabung dengan SPI Desa membuka matanya terhadap permasalahan perempuan yang sangat dekat dengan kehidupannya. Melalui pelatihan yang diperoleh dari SPI dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, Tari menjadi lebih percaya diri memediasi permasalahan suami dan istri. Menurut Tari, proses mediasi ini membutuhkan kesabaran yang ia petik dan pelajari dari pengalamannya bersama kolega paralegal.

“Satu kita belajar pendampingan ini kan kita pasti; prinsip pendampingan, pendamping harus mendengarkan korban, harus sabar kan itu pasti gitu. Jadi dampaknya ke diri kita itu jadi sabar.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Keterlibatan Tari dalam SPI Desa sangat didukung oleh suami dan anak-anaknya. Bahkan anak perempuan pertamanya, Diana, ikut terlibat aktif di kegiatan SPI Kabupaten sebagai staf magang. Kesempatan Diana untuk belajar langsung bersama SPI Kabupaten terkait penanganan kasus KDRT dan kesetaraan gender, menjadi sebuah kebanggaan untuk Tari sendiri. Proses magang yang dilakukan Diana membuka wawasan dan mengarahkan minatnya untuk mengambil pendidikan sarjana hukum. Diana berharap dengan gelar sarjana hukumnya, ia dapat terus membantu perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan.

Saat ini, Tari masih aktif sebagai Wakil Ketua SPI Desa dan Ketua LBK Desa. Bagi Tari, masalah perempuan terutama kekerasan bukan lagi masalah pribadi, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi masalah yang bersifat kolektif di desa. Dengan keberadaan LBK, Tari turut mendorong aktor-aktor lain di desa untuk ikut bertanggung jawab atas banyaknya kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

“Kadang gini kalau dari SPI pelatihan secara khusus berani enggak tapi kalau misalnya kayak acara di mana ayo nanya silakan misalnya kayak kemarin kan penguatan penyintas di mana di Kafe Aira. Ayo silakan ngomong apa saja jangan takut salah, itu secara nggak langsung gitu sih. Ya saya juga terpancingnya dulu kan gitu. Jangan mikirin salah benarnya, minimal berani ngomong.” (Tari, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Ke depannya, Tari berkeinginan untuk dapat terus meningkatkan keberanian perempuan di desa untuk melawan kekerasan yang menimpa diri mereka sendiri. Tari berharap melalui kegiatan SPI Desa, ia dapat membangun kepercayaan diri dan kemampuan perempuan-perempuan desa untuk kehidupan yang lebih baik.

Laeli

Ketua Kelompok Konstituen Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat¹

Laeli (40 tahun) merupakan ketua dari Kelompok Konstituen di salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur. Dia pindah ke desa ini setelah menikah, dan mulai aktif mengikuti kegiatan masyarakat desa. Laeli juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Posisi ini ia dapatkan karena suaminya merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena suaminya juga aktif sebagai Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lombok Timur, Laeli turut mengikuti kelompok Muslimat NU.

Meski ia sendiri merupakan lulusan Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak (PGTK), Laeli memilih untuk menjadi pengusaha kecil di desa. Ia memproduksi kerupuk yang dibuat berdasarkan pesanan, sekaligus memiliki pabrik tahu kecil yang beroperasi di belakang rumah. Untuk membuat kerupuk, Laeli dibantu oleh tiga orang perempuan. Para perempuan tersebut ialah tetangganya sendiri yang ditinggalkan oleh suami mereka. Laeli mengaku tergerak untuk membantu mereka sekaligus mengembangkan usaha kerupuknya.

“Saya banyak mempekerjakan perempuan, terutama janda. Janda-janda yang ditinggal suaminya TKI [Tenaga Kerja Indonesia], kan jadi beban mereka. Suami yang sudah menceraikan istrinya terus pergi ke Malaysia atau ke luar negeri, terus anaknya gak diurus. Jadinya istrinya yang cari uang, saya pekerjakan ada tiga untuk yang kerupuk. Kalau untuk tahu sih, karena pekerjaannya berat, jadi laki-laki.” (Laeli, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Laeli meminjam kredit pinjaman sebesar enam puluh juta rupiah dari bank untuk membangun pabrik kecil dan membeli bahan-bahan. Meski dibantu beberapa pekerja dalam produksi kerupuk dan tahu, Laeli mengelola sendiri bagian pemasaran usahanya. Setiap pagi, Laeli akan menjual tahu hasil produksinya tersebut kepada masyarakat di lingkungan rumahnya. Pekerjaan tersebut ia jalankan setelah mengerjakan keperluan rumah tangga serta mempersiapkan kebutuhan suami dan keempat anak perempuannya. Dalam mengurus pekerjaan domestik, Laeli sesekali dibantu oleh salah seorang tetangga, namun kebanyakan masih ia lakoni sendiri. Laeli mencuci, membersihkan rumah, memasak, termasuk mengurus suaminya yang ia sebut “manja” karena menolak untuk membantunya dalam mengurus pekerjaan domestik.

Kesibukan aktivitas ekonomi dan domestiknya tidak mengurangi aktivitas sosial Laeli. Keterlibatannya dalam Kelompok Konstituen dimulai sejak kelompok ini diinisiasi oleh BaKTI di desa. Pada awalnya, Laeli diajak oleh ketuanya di PKK periode sebelumnya untuk mengikuti kegiatan Diskusi Kampung yang diselenggarakan oleh BaKTI dan pemerintah desa. Ketika Kelompok Konstituen mulai terbentuk, ia pun dipilih sebagai sekretaris karena dinilai aktif dalam masyarakat.

“Ibu [Laeli] PKK, Posyandu ... Saya sibuk jualan. Ada juga sekretaris KK, guru PAUD dia. Ibu Laeli. Guru dia.” (Laeli, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Ketika Ketua Kelompok Konstituen mengundurkan diri karena merasa terlalu sibuk, Laeli sempat diminta untuk menggantikannya oleh forum. Akan tetapi, ia menolak karena merasa belum memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memimpin Kelompok Konstituen. Hal sama terjadi ketika Ketua Kelompok Konstituen yang

¹ **Penulis:** Hening Wikan Sawiji dan Wigke Capri Arti. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

selanjutnya diangkat sebagai Kepala Desa. Akhirnya, Laeli dipilih langsung oleh para anggota untuk memimpin Kelompok Konstituen di desa.

“Proses pemilihannya anggota Kelompok Konstituen yang memilih. Ditunjuk langsung, suara terbanyak. Namanya kita di kampung kan, Kelompok Konstituen langsung sebut ya sudah. Pas Pak Kepala Desa menjabat jadi Kepala Desa akhirnya, ‘digantikan Bu Laeli sudah’, kan kami berdua sering keluar. ... Mau ikut dan menjadi Ketua mungkin karena terdorong ya, sesama perempuan.” (Laeli, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Setelah bergabung dengan Kelompok Konstituen, Laeli menjadi aktor penting bagi kerja-kerja BaKTI di desa. Ia pun menjadi lebih dekat dengan staf lapangan BaKTI. Perkenalan mereka dimulai ketika BaKTI melakukan pendekatan langsung ke pemerintah desa. Di kemudian hari, staf lapangan BaKTI berperan sebagai rekan diskusi sekaligus menjadi bagian dari rantai pengetahuan dan jaringan Laeli.

Laeli mengembangkan keterampilan dan kemampuannya dengan mengikuti pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk menanamkan keberanian perempuan untuk berpendapat. Untuk menarik anggota baru, Laeli menjelaskan bahwa cara mengundang perempuan untuk ikut berdiskusi adalah dengan memasukkan materi belajar memasak.

“Kita kasih undangan. Kan ada Diskusi Kampung. Pokoknya sering kalau MAMPU ada pelatihan apa, pembuatan kue, pembuatan saus berbahan tomat. Jadinya kita undang masyarakat. Dari situ mereka tau. Kita gilir kalau undangan 20 orang, bukan itu-itu saja yang kita undang. Jadi kalau misal Mba A. kontak, ‘tanggal segini ada ini tolong diundang 20 kelompok konstituen’. Jadi saya gak monoton ngundang yang itu-itu aja jadi gantian.” (Laeli, desa penelitian di Lombok Timur, 5 Juli 2019)

Laeli juga mengikuti pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perannya dalam menyusun Perdes ini menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuannya dalam mengartikulasikan gagasan di depan umum. Perdes ini juga berguna untuk meningkatkan daya tawar perempuan dan anak-anak di desa dalam menghadapi ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perdes ini juga memperkuat posisi Kelompok Konstituen sebagai mitra strategis yang bekerja sama dengan pemerintah desa dalam melakukan penanganan terhadap kasus KDRT. Tercantum pula pernyataan bahwa pemerintah desa akan mengalokasikan anggaran untuk segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan peraturan desa tersebut. Akan tetapi, sampai saat ini usulan anggaran yang diajukan Kelompok Konstituen yang diketuai Laeli belum disetujui.

Menurut Laeli, terdapat banyak perubahan dalam dirinya setelah ia memiliki keterlibatan langsung baik melalui kedekatan secara personal dengan staf lapangan BaKTI maupun sebagai bagian dari Kelompok Konstituen. Perubahan tersebut bersifat personal dan sosial. Perubahan bersifat personal berupa kepercayaan dirinya yang meningkat dan berani mengutarakan pemikirannya di depan forum. Ia juga mendapatkan perubahan sosial berupa kepekaannya terhadap hal-hal sulit yang dihadapi perempuan.

Secara pribadi, jaringan yang ia peroleh sangat penting untuk perkembangan usaha kerupuknya. Staf lapangan BaKTI memperkenalkan Laeli pada Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten agar dapat mengurus izin usahanya supaya dapat diperdagangkan di toko-toko besar. Selanjutnya, Laeli juga masuk dalam grup percakapan WhatsApp pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“Mental ya terutama. Jadi dengan banyak kenalan, jadi tidak merasa kesulitan. Jadi lebih pede [percaya diri]. Akhir-akhir ini sama Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Disperindag [Dinas Perindustrian dan

Perdagangan]. Sampai dimasukkan ke IKM, industri kecil menengah. Lebih pintar ngomong jadi mental sudah terbentuk. Tidak takut lagi mau mengeluarkan uneg-uneg. Termasuk perubahan, ya sekalipun candaan sama bapak, 'Awat ya kayak gini-gini sudah ada Perdes'. Jadi dari mulut ke mulut orang-orang di kampung. Mereka takut karena adanya Perdes. Takut ada sanksi dari desa." (Laeli, desa penelitian di Lombok Timur, 13 Juli 2019)

Laeli mengakui bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ia mulai merasa terbebani dengan peran-peran yang harus ia jalankan. Mulai dari peran kepemimpinannya di kelompok sosial kemasyarakatan, pengelolaan usaha tahu dan kerupuk yang ia miliki sekaligus "tanggung jawab" domestik yang hanya bertumpu pada dirinya.

"Pernah dulu saya lupa masak. Bibi [merujuk pada Asisten Rumah Tangga] gak datang, dia gak ngasih tau gak datang. Saya ingat, itu Desember saya full jadwal. Dari PKK saya selalu ditunjuk. Jadi dalam sebulan kan anggaran akhir tahun mereka habiskan, selalu saya dapat undangan ... Kadang anak saya di pondok itu selalu ditanya mamaknya kerja apa, selalu pergi pelatihan kan, padahal jualan. Mamak pergi rapat, jualan. Saya jelasin sekarang ngerti. Sekarang kan gak terlalu padat." (Laeli, desa penelitian di Lombok Timur, 13 Juli 2019).

Kesibukan yang Laeli geluti selama beberapa tahun menyebabkan hubungan Laeli dan anaknya terasa berjarak. Ia pun berencana mengurangi intensitas kegiatannya agar mempunyai lebih banyak waktu untuk keluarga dan usaha kerupuknya. Walaupun sudah mempunyai keinginan untuk beristirahat dari Kelompok Konstituen, masih ada perasaan berat di hati Laeli untuk meninggalkan organisasi yang telah mengubahnya. Kelompok Konstituen telah membantunya mengasah keberanian untuk bersuara di depan publik. Organisasi ini juga telah membuka mata dan perasaan Laeli akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan di kampungnya.

Husnul

Anggota Kelompok Konstituen Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat¹

Husnul (52 tahun) merupakan anggota Kelompok Konstituen di salah satu desa di Lombok Timur. Dalam kesehariannya, ia tinggal bersama suami, menantu dan cucunya. Sebagai anak perempuan, Husnul juga dianggap bertanggungjawab untuk mengurus kedua orang tua dan mertuanya. Sampai tahun 2016, Husnul merawat ayah dan kedua mertuanya yang sakit-sakitan sebelum ketiganya meninggal dunia. Ia memandikan, menyuapi, dan merawat mereka sembari mengurus keperluan anaknya yang masih kecil setiap hari.

Sejak Husnul menikah dan mengandung anak pertamanya, suaminya bertolak ke Malaysia. Bukannya mendapatkan banyak uang, suaminya mendapat berbagai kesusahan karena berstatus sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Husnul mencoba membiayai kehidupan keluarganya dengan menjahit, membordir, dan bekerja sebagai koki di Puskesmas Pembantu (Pustu). Ketika suaminya pulang, Husnul selalu hamil setiap satu tahunnya, atau setahun setengah, hingga anak kelima. Ia tidak bisa bekerja banyak, malahan biaya keluarga semakin membengkak. Ia pun beberapa kali mengalami masalah kesehatan karena sering melahirkan. Pada tahun 2018, nasib baik menghampiri Husnul dan keluarganya, ia memulai usaha membuat keripik pisang dan ubi kayu. Usaha ini dia mulai secara iseng, tetapi ternyata memiliki banyak peminat karena rasanya yang khas. Usaha keripik ini menjadi pendapatan ekonomi utama bagi Husnul dan keluarganya.

Sejak tahun 1990an, Husnul telah menjadi kader Posyandu di desanya. Ia kerap membantu warga desa yang membutuhkan pertolongan medis. Pengalamannya merawat orang tua juga membuat Husnul memahami alur pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Perjumpaan Husnul dengan BaKTI bermula ketika Diskusi Kampung tahun 2014. Pada saat itu, ia menjabat sebagai Ketua Kader Posyandu Bunga Putih, dan diberikan akses untuk mengikuti pertemuan tersebut.

Sejak perkenalan itu, Husnul mulai aktif terlibat dalam acara-acara isu perempuan yang didukung oleh BaKTI, seperti kursus paralegal tentang prosedur penanganan kasus kekerasan dan advokasi kebijakan berbasis data, serta penyusunan Peraturan Desa Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Ia juga aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi yang terkait dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan upaya untuk mencegah KDRT di desa. Selain itu, Husnul juga pernah ikut serta dalam pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Lombok Timur mengenai pengelolaan keuangan dan pemasaran usaha. Pelatihan, diskusi, dan kegiatan lain Husnul dalam pelbagai peran memberi wawasan baru kepadanya Husnul. Cakrawala pengetahuannya menjadi lebih terbuka.

“Saya juga ikut pelatihan koperasi yang pengelolaan keuangan sama pemasaran. Dua kali saya ikut di pelatihan pengelolaan pangan di lesehan. Kalau pelatihan dari BaKTI ada pelatihan itu kan, tentang kalau orang tua berantem di depan anak itu bagaimana, terus paralegal.” (Husnul, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Pemasaran produk keripik pisang dan ubi milik Husnul pertama kali dilakukan pada pameran yang didukung oleh BaKTI. Staf lapangan BaKTI memperkenalkan usaha Husnul pada Disperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) dan Dinas Koperasi dan UKM untuk membantu mempermudah perizinan

¹ **Penulis/Author:** Hening Wikan Sawiji dan Wigke Capri. **Penyunting/Editor:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

usahanya. Oleh karena relasi tersebut, Husnul berkesempatan untuk bergabung dalam kelompok usaha kecil menengah Lombok Timur.

Pelatihan-pelatihan tersebut juga membuat Husnul merasa lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Pelatihan tersebut mengajarkan Husnul untuk dapat mengendalikan rasa gugup dan malu ketika hendak berbicara di forum yang besar. Sekarang untuk menyampaikan pendapatnya di forum-forum tersebut, Husnul menulis pendapatnya terlebih dahulu untuk dipaparkan.

“Karena kan setelah diskusi disuruh nulis trus dipaparkan. Jadinya lebih gampang mengemukakan pendapat, masalah perempuan ... Kan kita diskusi masalah kampung gitu kan, masalah TKW, masalah KDRT. Masih banyak teman-teman yang masih jadi TKW yang di luar [merujuk pada luar negeri]. Seperti teman saya itu, minta makan dia karena lapar. Ngutang-ngutang. Makanya kerja dia jadi TKW.” (Husnul, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Dalam Kelompok Konstituen, Husnul berperan sebagai Ketua Divisi Pendampingan. Ia menjadi rujukan para perempuan, terutama perempuan dari dusunnya, untuk mengadu. Kepribadian Husnul yang mudah dekat dengan orang lain membuat para perempuan merasa nyaman untuk menceritakan masalah pribadi mereka. Meski Husnul menganggap permasalahan tersebut sebagai curhat rumah tangga biasa, pelatihan paralegal yang telah ia ikuti menekankan pentingnya peran “curhatan” sebagai langkah awal untuk mengatasi KDRT, sebelum pembuatan visum dan mediasi.

“Saya kasih tahu ke Pak Kades, nanti mereka ke Pak Kades, paling kalau ada yang sakit, dulu saya yang antar pake motor, sebelum ada ambulans [di desa], pake ojek.” (Husnul, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Di ranah politik desa, Husnul mendapat undangan dari pemerintah desa untuk ikut serta dalam Musrenbangdes sebab posisi penting yang disandanginya dalam Kader Posyandu dan Kelompok Konstituen. Dalam musyawarah tersebut, Husnul tidak ragu untuk mengusulkan pemenuhan kebutuhan kesehatan, termasuk anggaran Dana Desa untuk Posyandu, serta meminta peralatan baru untuk memperbaiki Puskesmas.

“Ya peralatan-peralatan Puskesmas untuk Posyandu. Belum ada data, belum ada kelengkapan data. Timbangan ibu hamil, plang Posyandu. Waktu Pak Kades, ukuran tinggi badan bayi dan balita. Cuma kursi dan meja yang belum jadi.” (Husnul, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Husnul melihat perubahan dalam diri perempuan desa semenjak Perdes Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disahkan. Para perempuan menjadi leluasa untuk menjelaskan kepada para lelaki tentang hak-hak mereka. Mereka juga menjadi lebih vokal untuk melawan kekerasan dan pengabaian keluarga kepada perempuan dan anak. Husnul juga menerapkan hal yang sama pada keluarganya. Apabila sang suami terlihat menggunakan kekerasan pada anak mereka, Husnul akan menggunakan Perdes untuk melindungi anaknya. Ia merasa memiliki pegangan berupa dasar hukum yang kuat untuk memperingatkan suaminya secara efektif.

“Sekarang semenjak Perdes sudah tidak ada kasus KDRT sudah jarang, pada takut. Kalau dulu sering pukul istri, ada yang istrinya dipukul sampe memar, ditangkap polisi, dipenjarakan sebentar. Ditebus uang 500 ribu baru keluar, ada yang satu hari di penjara. Cuma satu orang di situ. Tapi setelah ada Perdes jarang. Ada perbedaannya. Di sana bisa kita obrolin masalah apa gitu. Lebih bebas untuk ngobrol, setiap pertemuan selalu kumpul ... Sudah ada perlindungan tentang anak. Kayak suami saya itu kan anaknya sering dipukul, terus saya bilang ke suami saya nggak boleh seperti itu.” (Husnul, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Menurut Husnul, kebutuhan utama perempuan desa adalah akses kepada pelatihan dan modal usaha. Ketika dia merefleksikan pengalaman pribadinya dalam berorganisasi, Husnul merasa beruntung karena sebagai Kader PKK dia memiliki akses terhadap pelatihan-pelatihan dari pemerintah yang tidak ditawarkan kepada semua perempuan di desa. Menurutnya, apabila akses untuk pelatihan dan modal usaha terbuka kepada seseorang, maka taraf hidup masyarakat desa akan meningkat. Setelah itu, perempuan desa juga perlu dibekali dengan keterampilan pemasaran atau jaringan yang bisa memasarkan produknya.

Pada saat memulai bisnis keripiknya, Husnul mendapatkan banyak cibiran dan ejekan dari tetangganya, terutama perempuan. Mereka mengejek keputusan Husnul dan mengatainya hanya perlu menjalankan peran domestik saja. Akan tetapi, dikarenakan tekanan ekonomi yang menghimpit dan tekad yang kuat, Husnul tidak patah arang. Berbekal pinjaman alat dari tetangganya, Husnul tetap melanjutkan usahanya tersebut. Ia bahkan mengajak beberapa perempuan, terutama janda, di sekitar tempat tinggalnya untuk bersama-sama membuat usaha keripik talas. Kini, Husnul sudah memiliki merek dagang untuk usaha keripiknya tersebut.

“Saya sendiri itu merintis keripik pisang. Dulu kan awalnya pas ada pameran PKK di kecamatan, 2018. Nah saya bikin bentuk unik kayak taro gitu biar beda sama yang lain. [Ada yang mengatakan] ‘Udah ngurus anak aja’, gitu. Tapi kan saya coba-coba, mana tahu menghasilkan untuk keluarga. Kan teman-teman MAMPU juga membantu untuk mencari sponsor. Semua masukan saya terima, kayak di Santri Mart saya nitip. Semua kita masukkan, istilahnya kita nitip gitu. Kemarin diberi tahu CO [community organiser atau staf lapangan] BaKTI, kita buat talas yang sama perempuan dan janda di desa. Dulu kan berkelompok. Ubi, talas, saya coba lanjutkan. Trus saya usul sebelum usaha sendiri, gimana gitu kalau kita bikin kripik seperti taro gitu? Gimana caranya gitu kan? Ya saya pinjam-pinjam alat ke tetangga.”
(Husnul, desa penelitian di Lombok Timur, 11 Juli 2019)

Ke depan, Husnul, yang sekarang sudah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan sosok pemimpin di desanya, berharap bahwa pihak lelaki juga akan banyak dilibatkan dalam agenda pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Ia bahkan sudah memiliki gagasan untuk mengikutkan para suami dan ayah ke dalam pelatihan-pelatihan atau sekolah-sekolah peduli perempuan. Dengan upaya seperti yang diinginkan Husnul, perempuan tidak perlu berjuang sendirian melawan norma sosial yang meletakkan peran perempuan di ranah domestik saja, ataupun yang memberi pembenaran terhadap kekerasan.

Veronika

Ketua Kelompok Wanita Tani Fauana Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur¹

Mama Veronika (42) merupakan salah satu sosok perempuan pemberani di desa yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak tahun 2013, beliau terlibat secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Fauana. Keterlibatan beliau dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta perjuangan hak perempuan semakin meningkat setelah Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU) masuk ke desa, dan membimbing KWT Fauana pada tahun 2014. Mama Veronika terus memperjuangkan hak perempuan di desanya dan melawan pandangan mengenai perempuan yang dibentuk oleh nilai-nilai adat dan interpretasi agama Katolik.

“Kami ingin mengubah pandangan bahwa perempuan tidak selamanya terbelenggu budaya patriarki. Kami ingin perempuan juga bisa diberi kesempatan, bisa diberi ruang untuk bergabung lebih aktif dalam komunitas. Sehingga ke depannya perempuan juga punya pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan laki-laki, dan dapat menghindari tindakan kekerasan.” (Mama Veronika, desa penelitian di TTU, 30 Juni 2019)

Mama Veronika pernah terpengaruh oleh ekspektasi dan norma sosial tersebut, dan ikut mengamini bahwa perempuan hanyalah pelayan keluarga dan berkewajiban untuk mengurus seluruh pekerjaan rumah. Melalui pendidikan, pandangan Mama Veronika semakin berubah. Mama Veronika juga merasa beruntung bahwa ia terlahir di keluarga yang menghargai pendidikan, sehingga kesadaran beliau terhadap pentingnya pendidikan untuk perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan cukup tinggi. Dukungan dari keluarga Mama Veronika untuk kesempatan pendidikan merupakan hal yang terbilang langka di desanya, karena umumnya dukungan pendidikan diberikan khusus untuk laki-laki. Dalam tiga bersaudara, Mama Veronika adalah satu-satunya anak yang mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mama Veronika didukung penuh oleh ibunya, berkat saran dari sanak saudaranya, untuk melanjutkan pendidikannya hingga Diploma II Pendidikan Guru SD (PGSD). Mama Veronika mengungkapkan bahwa ia juga didukung oleh suaminya untuk menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang diploma. Tapi, sebenarnya, ini merupakan salah satu persyaratan beliau ketika ia hendak dinikahi. Ia adalah satu di antara tiga perempuan di desa yang berhasil mendapatkan gelar dari perguruan tinggi.

Mama Veronika berkata bahwa dengan bersekolah dan berpendidikan hal tersebut akan membuka pintu kesempatan untuk dirinya. Ia termasuk perempuan yang diandalkan di kampungnya dalam hal pengambilan keputusan, bahkan dipercaya sebagai Ketua KWT Fauana sejak tahun 2013. Pada tahun 2014, ia juga diberikan peluang untuk mengembangkan diri melalui YABIKU yang baru masuk ke desa. Keinginan Mama Veronika untuk ikut dalam YABIKU ditolak oleh suaminya. Suaminya berpikir bahwa kegiatan ini terlalu berlebihan untuk dilakukan perempuan. Menurut suaminya, kasus-kasus yang diperjuangkan YABIKU sebenarnya masih ranah pekerjaan laki-laki. Lembaga Adat Timor umumnya hanya diisi laki-laki, dan hampir tidak melibatkan perempuan, bahkan untuk permasalahan perempuan sekalipun. Melalui kegigihan, serta proses komunikasi yang baik, Mama Veronika dapat mengubah pemikiran suaminya dan berhasil mendapatkan dukungan dari suaminya untuk aktif dalam kelompok paralegal.

¹ **Penulis:** Longgina Novadona Bayo dan Smita Tanaya. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

Proses pendekatan yang dilakukan Mama Veronika cukup panjang, ia selalu membagikan pengalaman dan wawasannya kepada suami tentang pentingnya organisasi tersebut untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Pendekatan itu semakin meningkatkan pemahaman suami terhadap kegiatan yang diikuti Mama Veronika, sehingga akhirnya suaminya sangat mendukung kegiatannya.

“Saya bilang ke Bapak bahwa perempuan ini sudah tidak seperti dulu. Perempuan harus lebih aktif berpartisipasi di masyarakat. Saya membangun komunikasi yang baik dengan suami. Hal tersebut sangat penting, agar saya mendapat dukungan untuk melakukan kegiatan yang saya sukai.” (Mama Veronika, desa penelitian di TTU, 30 Juni 2019)

Kegiatan diskusi terkait kesetaraan gender, sosialisasi kekerasan terhadap perempuan, hingga pelatihan kepemimpinan perempuan bersama YABIKU menjadi salah satu faktor yang mendorong Mama Veronika untuk bergerak dan membantu sesama perempuan di desanya. Mama Veronika juga merasa bahwa figur Ibu Yohana, pendiri YABIKU, sangat menginspirasi beliau untuk terus mengembangkan diri.

“Figur Mama Yohana membuktikan bahwa perempuan itu, apabila diberi pelatihan dan berpendidikan luas lalu diberi kesempatan untuk bergerak, kita dapat berubah. Memang tidak langsung dan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi Mama Yohana membuktikan bahwa perempuan itu bisa.” (Mama Veronika, desa di penelitian TTU, 30 Juni 2019)

Sejak tahun 2013, Mama Veronika menjabat sebagai Ketua KWT Fauana atas keputusan anggota. Posisi tersebut tidak tergantikan hingga saat ini, walaupun Mama Veronika sudah berkali-kali menyarankan untuk diadakannya pergantian kepengurusan. KWT Fauana merupakan salah satu dari tiga KWT yang masih aktif berkegiatan di desa ini, sementara sepuluh KWT lainnya di desanya sudah macet dan tidak berkegiatan lagi. Hampir semua warga di desa setuju bahwa faktor kepemimpinan dari ketua kelompok merupakan kunci kesuksesan kelompok tersebut. Anggota KWT Fauana percaya bahwa Mama Veronika merupakan sosok pemimpin muda yang berani, tegas dan mengayomi sesama. Kedekatan dan kepedulian beliau terhadap sesama anggota sangatlah tinggi.

“Kami sepakat memilih Mama Veronika sebagai Ketua, karena beliau pemberani dan dapat berbicara di depan umum. Kami juga senang karena Mama Veronika sangat baik dan tidak pemaarah dalam menghadapi kami yang tidak bisa apa-apa.” (Anggota KWT Fauana, desa penelitian di TTU, 1 Juli 2019)

Mama Veronika juga merupakan seorang pemimpin yang selalu fokus untuk mengembangkan diri sendiri dan mengedepankan masyarakat. Pada awal kepemimpinannya, Mama Veronika sulit membagi waktu dan merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk berbicara di depan umum. Tapi perlahan-lahan, setelah mendapat pelatihan berbicara di depan umum dan kepemimpinan dari YABIKU, Mama Veronika dapat meningkatkan keberaniannya. Beliau juga memiliki inisiatif serta kemauan untuk belajar yang tinggi. Tidak jarang dalam kegiatan YABIKU, Mama Veronika aktif dalam bertanya dalam pelatihan tersebut. Keaktifan beliau tidak berhenti di situ saja, Mama Veronika menerapkan serta membagikan apa yang ia pelajari ke sesama anggotanya. Transfer ilmu pengetahuan ini sangat membantu perkembangan serta kesuksesan dari KWT Fauana.

“Mama Veronika ini salah satu perempuan di [desa ini] yang setelah mendapat pelatihan dari kami, pasti beliau akan langsung menerapkan hal tersebut dalam kelompoknya. Itulah kenapa akhirnya KWT Fauana lebih maju dari KWT lainnya. Mereka ada kemauan untuk maju.” (Staff YABIKU, Kefamenanu, 4 Juli 2019)

Selain menjabat sebagai Ketua KWT Fauana, Mama Veronika juga sekretaris dan pendamping korban kekerasan di Kelompok Paralegal Desa. Mama Veronika beserta sepuluh orang perwakilan dari unsur masyarakat desa mengikuti pelatihan paralegal dari YABIKU pada tahun 2015 di Kefamenanu. Pelatihan

tersebut bertujuan untuk mempersiapkan Kelompok Paralegal Desa dalam mendampingi kasus dan korban kekerasan. Sebagai anggota dari kelompok paralegal, Mama Veronika mendapatkan pelatihan dasar paralegal dan konseling. Mama Veronika juga mempelajari dengan seksama terkait prosedur pengurusan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu pencapaian terbesar Mama Veronika sebagai anggota dari Kelompok Paralegal terlihat dalam komitmennya ketika menangani sebuah kasus kekerasan rumah tangga yang menimpa keluarganya sendiri. Ketika mendampingi kasus ini, Mama Veronika menjunjung tinggi kompetensi serta integritas beliau sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Beliau tidak menggubris perkataan atau tekanan dari keluarganya untuk tidak membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

“Ketika kasus tersebut terjadi, di mana pelakunya merupakan keluarga sendiri, saya bersikap tegas. Saya jelaskan ke keluarga saya bahwa tindakan tersebut harus ditangani dan dilaporkan ke polisi. Tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan, dan tidak boleh diselesaikan oleh keluarga. Kalau kekerasan tersebut sudah terjadi berulang kali dan perempuan kerap dipukuli, kasus tersebut harus langsung dibawa ke polisi.” (Mama Veronika, Kupang, 11 Juli 2019)

Kasus yang ditanganinya memang merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menggemparkan di desanya karena parahnya luka korban. Dalam menyelesaikan kasus ini, Mama Veronika beserta anggota kelompok paralegal lainnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali untuk membawa kasus ini ke meja hijau. Mereka secara intensif memonitor pelaku dan bertekad untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Ketika Mama Veronika bercerita bahwa kasus kekerasan tersebut terulang kembali, beliau bersama anggota paralegal lainnya mengambil siasat lain untuk membuat pelaku tersebut jera.

“Jadi kami beli kartu telepon baru, dan ketika malam hari kami menelepon pelaku tersebut. Berdasarkan pengakuan istrinya, dia suka dipukul saat malam hari ketika mereka mau tidur. Penganiayaannya justru terjadi di saat malam hari. Jadi dengan nomor baru tersebut, kami menelepon seolah-olah kami polisi. Kami telepon pelaku dan menanyakan keberadaannya, dan kami mengingatkan pelaku tersebut untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. Setelah dua hingga tiga kali kami telepon, pelaku tersebut ketakutan dan jera.” (Mama Veronika, Kupang, 11 Juli 2019)

Dengan bantuan dari anggota paralegal lainnya, Mama Veronika mampu menyelesaikan kasus kekerasan tersebut hingga tuntas. Ia merasa sangat bangga karena dapat membuat jera pelaku tersebut. Mama Veronika menekankan dengan tegas bahwa walaupun pelakunya keluarga sendiri, tidak ada ruang toleransi untuk kekerasan terhadap perempuan.

“Saya berpikir saya adalah paralegal. Keadilan itu harus dijunjung tinggi, di mana yang salah tetap salah dan yang benar harus dilindungi. Jadi artinya saya tidak akan membela pelaku tersebut, walaupun ia merupakan keluarga saya sendiri. Saya ada di pihak korban dan akan mengutamakan korban karena keadilan itu harus ada.” (Mama Veronika, Kupang, 11 Juli 2019)

Mama Veronika menjelaskan bahwa ia merasa bangga ikut serta dan menjadi bagian dalam diskusi dan pelatihan bersama YABIKU. Semakin hari, ia semakin semangat mengamalkan pengetahuannya dengan membantu dan melindungi para perempuan dari desanya.

“Mama bangga, Mama artinya bangga karena dapat pengetahuan dapat pengalaman. Seperti itu, habis bangga karena bisa bantu orang lain atau terutama kaum perempuan untuk itu penanganan kasus. Kan kalau dulu sebelum dengan YABIKU kan saya anggap [kekerasan dalam rumah tangga] biasa-biasa tapi kalau sekarang kalau setelah dengan YABIKU dan sudah dapat pengetahuan,

keterampilan terus dapat pelatihan itu memang saya bukan apa tapi bangga karena kita bisa bantu.”
(Mama Veronika, desa penelitian di TTU, 30 Juni 2019)

Vania, anak perempuan pertama Mama Veronika, menuturkan bahwa semenjak Ibunya berkegiatan aktif dengan YABIKU, pembagian peran di rumah berubah secara drastis. Sekarang dalam mengerjakan hal-hal rumah tangga, kakak laki-laknya serta ayahnya turut membantu.

“Kalau Mama pulang dari mengikuti pelatihan YABIKU, mama suka membawa buku, catatan ataupun kertas hasil pelatihan tersebut. Biasanya Mama menyuruh aku untuk juga membaca buku tersebut. Dari situ aku belajar tentang kesetaraan gender dan Mama juga mulai menerapkan hal tersebut di rumah.”
(Vania, anak Mama Veronika, desa penelitian di TTU, 10 Juli 2019)

Perjuangan Mama Veronika untuk terus mengembangkan diri dan bergerak untuk perempuan masih panjang. Beliau terus aktif menagih dan mengawasi janji pemberdayaan perempuan ke pihak pemerintah desa. Tidak jarang beliau menanyakan langsung kemajuan program pemberdayaan ataupun dana untuk pemberdayaan perempuan. Beliau juga menunjukkan kemampuan memimpinya ketika menjabat sebagai Ketua Kelompok Paralegal di tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kelak, Mama Veronika bercita-cita menjadi Kepala Desa perempuan pertama. Ia yakin bahwa desanya tidak akan kekurangan sosok perempuan-perempuan pemimpin untuk masa depan. Walaupun perjalanan untuk mendobrak budaya dan tatanan sosial yang patriarkis pasti akan sulit, beliau tidak gentar dan bertekad untuk terus berusaha untuk menjunjung dan mengangkat harkat perempuan desanya.

Yohana

Pendiri YABIKU dan Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur¹

Ketika membicarakan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan di Timor Tengah Utara, nama Ibu Yohana kerap kali muncul. Yohana adalah pendiri dari Yayasan Amnaut Bife Kuan. Sejak tahun 1999 beliau sudah bergerak aktif di bidang pemberdayaan perempuan bersama YABIKU. Sejak tahun 2014 hingga 2019, beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Tengah Utara (TTU), dan berjuang mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dedikasi Ibu Yohana—atau lebih akrabnya Mama Yohana—untuk perempuan Timor sangat kuat. Walau begitu, ia merasa masih banyak hal lainnya yang masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan Timor.

Motivasi Mama Yohana untuk terjun dalam gerakan perempuan sudah terpupuk semenjak ia duduk di bangku SMA. Oleh karena pekerjaan ayah Yohana sebagai Kepala Bidang Pelayanan di Rumah Tahanan Negara, interaksi bersama narapidana perempuan bukanlah hal yang asing. Ia sering diajak oleh ibunya untuk menggeledah para perempuan narapidana sebelum dan sesudah mereka bertemu dengan tamu di rumah tahanan. Pengalaman ini membentuk pandangannya terhadap permasalahan yang membuat narapidana perempuan dijebloskan dalam penjara. Dalam banyak kasus, Mama Yohana mendapati bahwa perempuan sesungguhnya bukan pelaku utama, melainkan justru perempuanlah yang menjadi korban kekerasan.

“Ketika SMA saya sudah mengerti dan mendapati beberapa kasus perempuan menjadi pelaku kekerasan bukan karena kemauan perempuan itu sendiri. Dia menjadi pelaku kekerasan karena melampirkan emosi yang sudah tidak terbendungkan lagi kepada suami. Perempuan hidup tertekan karena perilaku sang suami yang suka selingkuh, mabuk dan tidak memberikan nafkah. Dari cerita tersebut saya tahu bahwa sebenarnya perempuan ini merupakan korban eksploitasi.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019)

Interaksi Mama Yohana dengan ragam kasus perempuan yang ia temui di Rutan menginspirasi Yohana untuk terus bergerak demi perempuan di TTU yang sering tertekan dalam menjalani hidupnya, bahkan berujung dengan kekerasan. Yohana mengerti betul bagaimana perempuan Timor sering terbebani dengan ekspektasi sosial, beban ekonomi dan budaya. Melihat penderitaan yang dirasakan perempuan Timor, Yohana tergerak untuk membantu dan meringankan beban mereka.

Pada 1999, Yohana mendapati dirinya berada di tengah-tengah ribuan pengungsi yang melarikan diri dari Timor Leste untuk mencari perlindungan di TTU. Bersama Oxfam Australia, Yohana bergabung sebagai relawan dalam tim Kemanusiaan Timor Barat untuk membantu perempuan dan anak di barak-barak pengungsian di TTU. Beliau bekerja sebagai pendamping para pengungsi dan selalu berusaha untuk menjadi teman bagi mereka. Selepas program kerja sama tersebut dua tahun kemudian, banyak perempuan kerap meminta bantuan Yohana untuk mengadvokasi permasalahan kekerasan yang mereka hadapi. Dari hal ini gagasan terbentuknya YABIKU terlahir.

¹ **Penulis:** Longgina Novadona Bayo dan Smita Tanaya. **Penyunting:** Bronwyn A. Beech Jones dan Annisa Sabrina Hartoto. **Disclaimer:** Isi dari publikasi ini dikompilasi oleh para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan, kebijakan dan posisi resmi dari lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, pemberi kerja, perusahaan atau universitas manapun. Semua nama di dalam tulisan ini telah disamarkan.

Pada tahun 2000, Ibu Yohana mendirikan YABIKU bersama teman-teman perempuan lainnya, dan memulai pendampingan untuk perempuan korban kekerasan. “YABIKU merupakan harapan saya. Lembaga ini hadir untuk perempuan dan anak. Lembaga ini untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka,” ujar Yohana (Kefamenanu, 26 Juni 2019). Pada tahun 2001, YABIKU berhasil diakui secara resmi, baik dari akta notaris hingga pengakuan dan rekomendasi dari pemerintah daerah.

Selama hampir 15 tahun YABIKU berjalan untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Di bawah kepemimpinan Ibu Yohana, YABIKU mengutamakan advokasi dan pendampingan perempuan serta anak korban kekerasan. Pada waktu yang sama, melalui kerja tersebut, Ibu Yohana dan YABIKU merasa bahwa sangatlah penting adanya kebijakan yang fokus pada perempuan untuk membuat perubahan yang struktural.

“Dalam perjalanan kita refleksikan bahwa kita tidak hanya bisa masuk pada penanganan kasus, tapi harus memulai dari pencegahan.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019)

YABIKU kemudian mulai mengadvokasikan dan membuat strategi untuk memengaruhi kebijakan. Di sini YABIKU mulai membangun jaringan dengan para pembuat kebijakan untuk menggugah mereka dalam menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan.

“Melihat YABIKU sudah berusia 12 tahun. Saya merasa sudah cukup untuk dipercayakan ke teman-teman yang saya kaderkan di sini. Sehingga dengan persetujuan mereka, saya ingin keluar dari garis perlawanan dan masuk ke parlemen.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019)

Mama Yohana menuturkan bahwa beliau mengalami kesulitan untuk menembus keputusan di pengambil kebijakan. Ia merasa tergerak untuk mencoba menembus parlemen dan meneruskan perjuangan untuk kaum perempuan dari dalam. Merupakan salah satu mimpi dari Yohana untuk membuka dan membuat anggaran responsif gender, agar dapat menggugah kebijakan-kebijakan yang pro-perempuan.

Maka dari itu dimulailah perjuangan Yohana untuk mendapatkan kursi di parlemen TTU. Yohana menceritakan bahwa ia pernah mencoba dua kali untuk masuk ke DPRD TTU. Percobaannya yang pertama dimulai pada tahun 2009, akan tetapi beliau gagal menduduki kursi di DPRD TTU. Permainan politik dan posisi Yohana sebagai seorang perempuan kurang menguntungkan saat itu. Oleh karena itu, Ibu Yohana mencoba untuk kedua kalinya masuk ke DPRD TTU pada tahun 2014 dan berhasil mendapatkan kursi sebagai anggota dewan di DPRD TTU.

Ibu Yohana kemudian terpilih menjadi Ketua Komisi C. Hal ini merupakan batu loncatan dan peristiwa penting baginya. Beliau terpilih menjadi Ketua Komisi C dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Selain itu Yohana sudah melalui semua pembelajaran terkait bagaimana menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Peraturan Daerah.

“Saya merasa sangat beruntung memiliki background LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat]. Saya sudah mempelajari bagaimana menyusun APBD, membuat regulasi daerah bersama YABIKU. Jadi ketika orang lain baru pertama kali belajar, saya sudah mengerti dan memiliki pengalaman untuk melakukan hal tersebut. Itu keuntungan saya, ketika masuk ke dalam parlemen saya tidak kosong sama sekali. Saya sudah memiliki bekal.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019)

Yohana menjelaskan bahwa *bargaining* untuk mendapatkan posisi pemimpin begitu susah. Beliau harus berjuang menembus sekian banyak laki-laki, apalagi ketika kondisi saat itu anggota dewan yang perempuan

hanyalah dua orang. Maka dari itu, Yohana bekerja keras untuk berteman dan memengaruhi dewan perempuan yang lain.

“Terus terang untuk mendapatkan posisi pemimpin sangatlah susah, dan kita harus berjuang menembus sekian banyak laki-laki, sementara dewan perempuan hanya ada dua orang. Saya pertama kali langsung berusaha memengaruhi teman saya yang perempuan itu dengan semangat perempuan. Saya bilang, kita beda fraksi dan partai tapi kita hanya perempuan berdua. Maka dari itu kita harus bisa berbuat sesuatu untuk kaum perempuan.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019)

Selama menjalani jabatannya di DPRD, Yohana bergantung pada kemampuan dan pendekatan personal. Ia juga berusaha untuk unjuk gigi di pemilihan forum-forum kecil. Dari situlah Yohana menunjukkan bahwa ia adalah kompetitor yang tangguh. Bermodalkan hal tersebut Yohana memulai perjuangannya untuk membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Beliau menjelaskan bahwa dalam sejarah DPRD TTU belum pernah menghasilkan satu Peraturan Daerah (Perda) inisiatif. Melihat hal tersebut, Yohana mencoba menjadi corong dan memengaruhi semua fraksi lewat pendekatan personal untuk menghasilkan perda inisiatif perlindungan perempuan dan anak.

Bersama YABIKU, Yohana mengatur strategi dan bekerja sama dengan NGO lainnya untuk menggerakkan audiensi di DPRD TTU dan berjuang menghasilkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut. Di sinilah peranan mitra MAMPU dan Oxfam sangat membantu untuk mengadvokasi terwujudnya Perda tersebut. Yohana mengadvokasi peraturan daerah yang sensitif terhadap gender, di mana ia bertanggung jawab untuk mengurus teknis pembentukan Perda bersama DPRD TTU. Sementara itu, YABIKU dan mitra lainnya berfokus kepada penguatan isu Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di level akar rumput. YABIKU menjangkau aspirasi dan mempersiapkan komunitas, sementara Yohana melakukan lobi politik dengan golongan elit politik TTU.

“Setelah satu tahun saya dilantik, saya sering mengganggu anggota DPR lain tentang perda inisiatif. Sejarah DPRD TTU belum pernah menghasilkan perda inisiatif sama sekali. Maka dari itu, saya mencoba menjadi corong untuk memengaruhi semua fraksi lewat hubungan personal. Dan kemudian membuat event, untuk mengumpulkan mereka semua dan teman-teman LSM perempuan untuk membahas perda perlindungan perempuan dan anak.” (Yohana, Kefamenanu, 26 Juni 2019)

Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten TTU mengesahkan dua Perda yang telah diinisiasi oleh Yohana dan dibimbing YABIKU, yakni Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Perda TTU No. 14 Tahun 2016) dan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Perda TTU No. 15 Tahun 2016). Kedua Perda tersebut berisi peraturan terkait tindakan preventif untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, serta penanganan dan perlindungan perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan.

Harapan Yohana kedua peraturan daerah itu dapat menjadi payung bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Perubahan yang dibawa dari pengesahan kedua perda tersebut cukup signifikan dalam menciptakan efek jera di masyarakat. Sosialisasi terkait perda perlindungan perempuan menjelaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi, dan pelaku kekerasan tersebut dapat ditindak pidana. Keberadaan Perda tersebut menjadi tameng bagi para perempuan. Sementara untuk pelaku kekerasan, ancaman dengan mengaitkan perda serta tindak pidana membuat orang lebih enggan melakukan kekerasan. Melihat mulai adanya perubahan pada masyarakat di TTU, membuat Ibu Yohana cukup bangga dan ingin terus memperjuangkan hak-hak perempuan.


Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Ibu Yohana menjabat sebagai anggota DPRD TTU. Beliau mencoba untuk tetap bisa lanjut lima tahun ke depan dan bertarung pada Pemilu 2019, namun ia gagal mendapatkan kursi di DPRD TTU. Walaupun begitu, Yohana mengatakan bahwa ia tidak takut meninggalkan jabatannya sebagai anggota dewan. Berkat pendekatan personal dan relasi yang telah ia bangun selama ini, ia akan terus aktif dengan gerakan perempuan di TTU, dan khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tetap memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.


Yohana adalah contoh bagaimana seorang politisi dan aktivis perempuan di Timor bergerak dan berjuang bersama perempuan. Selama Ibu Yohana menjadi anggota dewan, ia tidak pernah lupa dengan konstituennya atau perempuan-perempuan desa dampingan YABIKU. Tidak jarang Yohana mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu para perempuan di Desa. Ibu Yohana juga menggunakan jaringan dengan dinas untuk memberikan bantuan bagi para perempuan desa di NTT. Tidak jarang para ibu ini juga turun dan mengunjungi beliau di kediamannya di kota Kefamenanu. Ke depan, langkahnya tidak akan berhenti untuk para perempuan Timor.

Daftar Pustaka

- Beech Jones, B.A. "Narrating Intimate Violence in Public Texts: Women's Writings in the Sumatran Newspaper *Soenting Melajoe*". Dalam *Gender, Violence and Power in Indonesia Across Time and Space*, disunting oleh K. McGregor, A. Dragojlovic & H. Loney, 19–28. London & New York: Routledge, 2020.
- Blackburn, S. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- . "Feminism and the Women's Movement in the World's Largest Islamic Nation". Dalam *Women's Movements in Asia. Feminisms and Transnational Activism*, disunting oleh M. Roces & L. Edwards, 21–33. Abingdon: Routledge, 2010.
- Davies, S.G. "Women in Politics in Indonesia in the Decade Post-Beijing". *International Social Science Journal* 57:184 (2005): 231–242.
- Dewi, K.H. *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in post-Suharto Indonesia*. Singapore: NUS & Kyoto University Press, 2015.
- Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P. dan Francis, N. 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Gluck, S.B. "Women's Oral History: Is It So Special?". Dalam *Thinking about Oral History*, disunting oleh T.L. Charlton, L.E. Myers & R. Sharpless, 115–141. New York: AltaMira, 2008.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 Jakarta: Komnas Perempuan, 2020. Tersedia di: https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf
- Migunani. *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia: A Study of Collective Action Initiated by Partners of the MAMPU Program*. Yogyakarta: Migunani & MAMPU, 2017.
- Nyman, M. *Democratising Indonesia. The Challenges of Civil Society in the Era of Reformasi*. Copenhagen: NIAS Press, 2006.
- Pratiwi, A. M. "The Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament in Regency/City-level Legislative Council Period 2014–2019". *Jurnal Perempuan* 24:2 (2019): 151–163.
- Prihatini, E.S. "Electoral (In)quality". *Inside Indonesia* 135 (Januari – Maret 2019): <https://www.insideindonesia.org/electoral-in-equity>.
- Rahayu, R.I. "Menulis Sejarah Sebagaimana Perempuan: Pendekatan Filsafat Sejarah Perempuan". *Jurnal Sejarah dan Budaya* 10 (2016): 100–111.
- Robinson, K. "Indonesian National Identity and the Citizen Mother". *Communal/Plural* 3 (1994): 65–81.
- . *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. London & New York: Routledge, 2008.
- Syukri, M., P.P. Bachtiar, A. Kurniawan, G.S.M. Sedyadi, Kartawijaya, R.A. Diningrat & U. Alifia. *Study of the Implementation of Law No. 6/2014 on Villages: Baseline Report*. Jakarta: The SMERU Research Institute, 2017.
- Wieringa, S.E. "The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism". *Journal of Women's History* 15 (2003): 70–91.

MAMPU

 Setiabudi Atrium, suite 306.
Jl. HR. Rasuna Said Kav.62. Jakarta Selatan 12950

 +62 21 521 0315

 info@mampu.or.id

 @ProgramMAMPU